

JARINGAN ORANG BUGIS DI BATAVIA TAHUN 1799-1837

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum)



Oleh :

Nama : Syakiman Bur

NIM : 21220012

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ISLAM NUSANTARA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

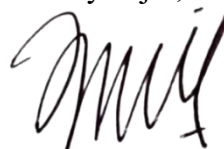
JAKARTA

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837” yang disusun oleh Syakiman Bur (21220012) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Bogor, 03 Juni 2025
Menyetujui,



Alanuari, MA
NIDN: 0312089101

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837” yang disusun oleh Syakiman Bur (21220012) telah diujikan dalam ujian sidang Skripsi pada hari selasa, tanggal 10 juni 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka, skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum).

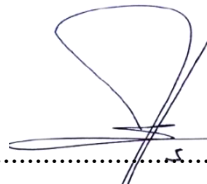
Bogor, 20 Juni 2025

Dekan,


Dr. Ahmad Suaedy, MA. Hum

TIM PENGUJI:

1. Dr. Ayatullah, M.Ud.


(.....)
Tgl. 19 - 06 - 2025

2. Sari Febriani, M.Hum.


(.....)
Tgl. 18 - 06 - 2025

PEMBIMBING

3. Alanuari, MA.


(.....)
Tgl. 19 - 06 - 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

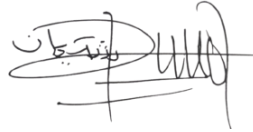
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syakiman Bur

NIM : 21220012

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan.

Bogor, 03 Juni 2025



Syakiman Bur

21220012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik itu secara moral maupun material selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ibu tercinta (Harti) dan ayah tercinta (Burhanuddin) yang menjadi sumber pertama dari segala kebijaksanaan dalam hidup saya. Kasih sayang Ayah dan Ibu telah menjadi fondasi yang memungkinkan saya tumbuh meraih mimpi-mimpi tertinggi. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, dalam setiap pengorbanan yang tak pernah dikeluhkan, dan dalam setiap senyuman yang menyemangati di kala lelah, Ayah dan Ibu telah mengajarkan makna sejati dari cinta tanpa syarat. Karya ilmiah ini adalah buah dari benih-benih kebijaksanaan yang Ayah dan Ibu tanamkan, yang kini telah bertumbuh menjadi pohon pengetahuan.
2. Kepada saudara-saudara, kakak pertama (Ridwan), kakak kedua (Riswan), kakak ketiga (Rudyawan), kakak ke-empat sekaligus kembaran saya (Syakina).

Kalian adalah darah dari darah yang sama, Jiwa yang saling mengisi dalam suka dan duka. Kalian adalah rumah pertama bagiku, Tempat aku belajar mencintai tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi kekuatan di setiap langkahku.

3. Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa sebagai manifestasi intitusi pendidikan yang berhasil mencetak generasi muda yang visioner dan berkarakter. Pondok tercinta dengan beribu cerita yang mewarnai perjalanan hidup saya. Kiyai dan para ustaz dan ustadzah yang senantiasa mendoakan santri-santrinya dalam meraih mimpi. Dengan memajang namanya lah saya bisa mendapat pendidikan keluar daerah melalui program beasiswa. Semoga pondok tercinta ini dan orang-orang di dalamnya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki dalam setiap dedikasinya.
4. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan antara iman dan ilmu pengetahuan. Dalam visi mulia untuk membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Kementerian Agama telah membuka gerbang-gerbang pendidikan yang memungkinkan generasi muda untuk meraih ilmu sambil tetap berpegang teguh pada akar spiritual melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Terima kasih telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari visi mencerdaskan anak-anak bangsa khususnya para santri.
5. Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D., selaku Plt. Rektor Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia atas kesempatan menjadi bagian dari UNUSIA dan dukungan-dukungan fasilitas bagi mahasiswa selama proses studi.

6. Dr. Ahmad Suedy, MA., Hum. selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara yang telah merancang dan membangun struktur pendidikan yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk mengeksplorasi kedalaman ilmu dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Fakultas ini telah menjadi rumah bagi para pencari kebenaran yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya Islam Nusantara.
7. Fuadul Umam, M.Hum. selaku Kepala Prodi Strata 1 Sejarah Peradaban Islam sebagai sang navigator dalam perjalanan akademik yang penuh tantangan. Dengan kebijaksanaan dalam merancang kurikulum dan membimbing arah pembelajaran telah memastikan bahwa setiap mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami esensi dan aplikasi dari ilmu yang dipelajari.
8. Dr. Ayatullah, M.Ud., selaku dosen pembimbing akademik dalam setiap sesi konsultasi tidak hanya memberikan arahan akademik, tetapi juga menjadi teladan dalam berfikir kritis dan bersikap ilmiah.
9. Alanuari, MA., selaku dosen pembimbing skripsi, mentor sejati dalam arti yang paling hakiki. Dalam proses panjang penyusunan karya ilmiah ini telah mengajarkan makna sesungguhnya dari penelitian ilmiah. Dengan kesabaran yang tak terbatas telah membimbing setiap langkah, dari ide awal yang masih samar hingga menjadi karya yang utuh dan bermakna. Kritik konstruktif, saran yang membangun, dan dorongan yang tidak pernah putus menjadi energi penggerak dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

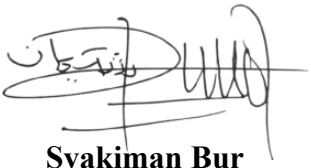
10. Seluruh Dosen Fakultas Islam Nusantara khususnya Prodi Sejarah Peradaban Islam (S1) yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama menjalani pendidikan hingga ada penyusunan skripsi ini.
11. **PPMNU** sebagai rumah kedua diperantauan. **CSSMoRA** sebagai tempat untuk merajut keluarga baru. **PMII** sebagai wadah untuk bergerak dan berdampak. **Pagar Nusa** sebagai tempat untuk mengolah raga dan rasa. **HIMA SPI** sebagai wadah untuk mengenalkan saya arti sejarah. **BEM UNUSIA** sebagai bagian dari dedikasi dan pengabdian terhadap universitas. **IKAMI SULSEL** sebagai obat dikala rindu kampung halaman. Tanpa organisasi dan orang-orang di dalamnya akan membuat perjalanan ini tak bermakna. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa organisasi akan terus dicari bagi mereka yang sadar akan manfaatnya. Akan selalu kudoakan dengan penuh ketulusan bagi mereka yang senantiasa berdedikasi merawat dan mengembangkan wadah-wadah itu.
12. Terakhir kepada seluruh jiwa yang pernah singgah dalam perjalanan ini. Mereka yang mengulurkan tangan saat kabut menghalangi pandangan, yang berbagi cahaya ketika malam terasa panjang, yang menjadi angin sepoi ketika lelah mendera. Kalian adalah kepingan-kepingan hidup yang akan terus ada dalam ingatan saya. Terima kasih untuk setiap senyuman, setiap doa dan setiap dukungan yang tulus. Semoga tiada penyesalan dan kebencian dalam pertemuan kita.

Demikian ungkapan sederhana yang mungkin belum bisa penulis cantumkan semuanya ke dalam skripsi ini. Dengan kesadaran penuh dan insaf, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu,

penulis memberikan ruang sebesar-besarnya atas kritik dan saran demi perbaikan karya ilmiah selanjutnya di masa yang akan datang.

Dalam setiap langkah pencarian kebenaran, ada jejak-jejak kasih yang menuntun, ada tangan-tangan yang merangkul, dan ada jiwa-jiwa yang menerangi jalan menuju cahaya pengetahuan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan menjadi persembahan yang layak atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi para pencari kebenaran.

Bogor, 30 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by the name 'Bur' and a series of loops and flourishes.

Syakiman Bur

Nim: 21220012

ABSTRACT

Syakiman Bur, “*The Bugis Network In Batavia 1799-1837*”, Thesis: Islamic Civilization History Study Program, Faculty of Indoensian Islam, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (UNUSIA), 2025.

This research seeks to uncover the networks of the Bugis in Batavia during the 18th and 19th centuries by limiting the research to the period 1799-1837. This research focuses on exploring three main issues: the Bugis network in Batavia in 1799-1837, the role of the Bugis in the socio-economic development of Batavia in 1799-1837 and the importance of looking at the socio-religious network of the Bugis in Batavia in 1799-1837.

This study is a qualitative research using historical and anthropological approaches. Data collection was conducted through history-based research through the processes of heuristics, source verification, interpretation and historiography. Researchers visited the National Archives of the Republic of Indonesia and the National Library several times. Data research was also conducted in the form of maps through the web pages of Leiden University and the National Archives of the Netherlands as well as other document studies. In addition, interviews with South Sulawesi cultural experts and a review of one of the Bugis communities in Jakarta became supporting sources in this research. The data analysis method used is descriptive-analytical which emphasizes in-depth understanding and systematic presentation of information on social phenomena through the data that has been collected.

The results of this study show that the Bugis people played an important role in the history of Batavia. They built a trade network that connected Batavia with various ports in the archipelago, created an alternative economic system that coexisted with the colonial structure, and contributed to the formation of Batavia's cosmopolitan character as a port city. The Bugis migration is not only understood in a political context, where the Bugis were expelled as a result of the Bongaya treaty as a declaration of the defeat of the Kingdom of Gowa-Tallo against the alliance of the VOC and the Kingdom of Bone. Moreover, their migration can also be understood through cultural aspects, where they have a tradition of *sompe'* (migrating) as the driving force behind leaving their hometowns. In addition, factors in the economic realm also encouraged them to sail to various regions for the needs of living expenses for their families. As a result of these factors, the Bugis have also developed networks, which are a remarkable ability to maintain their cultural identity while adapting to a multicultural urban environment. This strategy not only enabled them to survive the often hostile colonial dynamics, but also contributed to the formation of Batavia's rich and complex cultural mosaic.

Keywords: Networks, Bugis people, Batavia

ABSTRAK

**Syakiman Bur, “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837”,
Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara,
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2025**

Penelitian ini berusaha mengungkap terkait jaringan orang Bugis di Batavia pada abad ke-18 hingga abad ke-19 dengan membatasi penelitian pada periode tahun 1799-1837. Penelitian ini difokuskan untuk menelusuri tiga hal utama, yaitu jaringan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837, peran orang Bugis dalam perkembangan sosial ekonomi di Batavia tahun 1799-1837 dan pentingnya melihat jaringan sosial-keagamaan orang Bugis di Batavia pada tahun 1799-1837.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan antropologi. Pengumpulan data dilakukan melalui riset berbasis sejarah melalui proses heuristik, verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi. Peneliti beberapa kali mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Kemudian dilakukan pula riset data berupa peta melalui laman web Universitas Leiden dan Arsip Nasional Belanda serta studi dokumen lainnya. Selain itu, wawancara terhadap budayawan Sulawesi Selatan dan tinjauan salah satu komunitas Bugis di Jakarta menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis yang menekankan pada pemahaman mendalam dan penyajian informasi sistematis terhadap fenomena sosial melalui data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang Bugis memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kota Batavia. Mereka membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Batavia dengan berbagai pelabuhan di Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19, menciptakan sistem ekonomi alternatif yang berdampingan dengan struktur kolonial, dan berkontribusi dalam pembentukan karakter kosmopolitan Batavia sebagai kota pelabuhan. Migrasi orang Bugis ini tidak hanya dipahami pada konteks politik saja, yang mana orang Bugis terusir akibat dampak dari perjanjian Bongaya sebagai deklarasi kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo terhadap aliansi VOC dan Kerajaan Bone. Lebih dari itu, migrasi mereka juga dapat dipahami melalui aspek budaya, yang mana mereka memiliki tradisi *sompe'* (merantau) sebagai aspek pendorong mereka meninggalkan kampung halamannya. Selain itu, faktor dalam ranah ekonomi juga mendorong mereka untuk berlayar ke berbagai wilayah untuk kebutuhan biaya kehidupan untuk keluarganya. Dengan berbagai faktor pendorong tadi sehingga orang Bugis juga membangun jaringan sebagai kemampuan luar biasa dalam mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan lingkungan urban yang multikultural. Strategi ini tidak hanya memungkinkan mereka bertahan dalam dinamika kolonial yang seringkali tidak bersahabat, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan mosaik budaya Batavia yang kaya dan kompleks.

Kata Kunci: Jaringan, orang Bugis, Batavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Batasan Masalah Penelitian	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.7. Metode Penelitian	9
1.7.1. Jenis Penelitian	9
1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
1.7.3. Sumber Data	12
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.5. Instrumen Penelitian	18
1.7.6. Teknik Analisis Data	20

1.8. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
2.1. Kerangka Teori.....	22
2.2. Kerangka Pemikiran	40
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
BAB III TINJAUAN SEJARAH KEBERADAAN ORANG BUGIS DI	
BATAVIA ABAD KE-17 HINGGA ABAD KE-19.....	44
3.1. Tokoh Bugis Dalam Sejarah Batavia	48
3.1.1. Syekh Yusuf Al-Makassari: Diaspora Intelektual Dan Spiritual.....	48
3.1.2. Arung Palakka: Diplomasi Politik Dan Jejaring Kekuasaan ..	51
3.2. Gambaran Terkait Keberadaan Orang Bugis Dalam Sejarah Dan Perkembangan Batavia Tahun 1799-1837.....	54
3.3. Peran Orang Bugis Dalam Perkembangan Sosial Ekonomi Di Batavia Tahun 1799-1837	61
3.3.1. Sistem Ekonomi Orang Bugis	61
3.3.2. Aktivitas Ekonomi Orang Bugis Di Batavia	63
3.4. Sosial Keagamaan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837 Dan Perkumpulan Ke-Bugis Di Jakarta	68
3.4.1. Profil Perkumpulan Ke-Bugis.....	69
3.4.2. Tradisi Halal Bi Halal Perkumpulan Ke-Bugis	71
BAB IV PENUTUP	80
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Periode Waktu Penelitian	11
-----------	--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pemikiran	34
Gambar 3.1	Manuskrip <i>Amanna Gappa</i> Abad 17	45
Gambar 3.2	Plattegrond der stad Batavia (Kloff,1628)	46
Gambar 3.3	Simbol Kampung Pada Peta Kolonial	47
Gambar 3.4	Kaart Van De Residentie Batavia En De Afdeling, 1837	54
Gambar 3.5	Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809	57
Gambar 3.6	Surat Pemerintah Makassar Ke Batavia	59
Gambar 3.7	Surat Yang Dibuat Di Kastel Rotterdam	59
Gambar 3.8	Logo Perkumpulan Ke-Bugis	70
Gambar 3.9	Kegiatan Halal Bi Halal Ke-Bugis	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Istilah/Glosarium	97
Lampiran 2 Lembar Bimbingan Skripsi	101
Lampiran 3 Dokumentasi Sumber Data Peta	103
Lampiran 4 Dokumentasi Sumber Data Arsip	104
Lampiran 5 Dokumentasi Observasi	105
Lampiran 6 Dokumentasi Diskusi	106
Lampiran 7 Hasil Turnitin	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Orang Bugis merupakan suku yang bermukim di pulau Sulawesi yang secara historis merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut. Asal-usul masyarakat Bugis terkait erat dengan kerajaan-kerajaan yang berkembang di Sulawesi Selatan, seperti kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng. Kerajaan lokal ini dikenal memiliki sistem pemerintahan yang kuat, kebudayaan maritim yang maju, dan adat-istiadat yang terjaga. Dari segi kepercayaan seperti yang diungkapkan oleh Abu Hamid bahwa kepercayaan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1). Arwah nenek moyang, 2). Dewa/agama *patuntung*, 3). Pesona-pesona jahat/ilmu hitam. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan masyarakat kuno di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sistem kepercayaan *Attorioloang* yang berarti “Anutan Leluhur” (Hamid, 1994).

Orang-orang Bugis dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung yang terlibat dalam berbagai jaringan perdagangan maritim serta politik di berbagai wilayah Nusantara. Kehadiran orang Bugis di Batavia yang jejaknya dimulai pada abad ke-17 merupakan fenomena menarik yang mencerminkan dinamika mobilitas maritim dan pembentukan jaringan diaspora di Nusantara. Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu bukti tokoh penting dalam sejarah perjalanan orang Bugis di Nusantara. Setelah kekalahan Kesultanan Gowa oleh Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten atas perintah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai ulama, sufi, dan pejuang yang berperan besar dalam penyebaran Islam serta perlawanan terhadap VOC. Perjalanan hidup dan perjuangannya memberikan bukti nyata tentang kontribusi orang Bugis dalam sejarah Islam dan nasionalisme di Nusantara. Selain itu, adanya sosok Arung Palakka yang melakukan kerja sama dengan VOC untuk membebaskan kerajaannya Bone dari Gowa menjadikan bukti adanya interaksi orang Bugis dengan VOC. Bahkan, kehadiran Arung Palakka di Batavia membuatnya harus membantu VOC dalam penaklukan beberapa wilayah di pulau Jawa.

Sebagai pelaut dan pedagang ulung, orang Bugis tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa serta nilai-nilai budaya, sistem sosial, dan keterampilan maritim yang memperkaya corak kehidupan di Batavia. Selain itu, fenomena tradisi migrasi orang Bugis yang dikenal sebagai *Sompe'* atau merantau juga membuktikan eksistensi identitas budaya orang Bugis yang mengakar (Bandung, 2020). Merantau bagi orang Bugis bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi juga dianggap sebagai pencarian hidup yang lebih baik dan pembuktian kemampuan diri. Kegiatan merantau yang dilakukan ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama ke berbagai wilayah di Indonesia hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara (Khusyairi, 2017). Di manapun mereka berada, orang Bugis biasanya tetap memelihara tradisi dan budaya mereka, termasuk bahasa, adat, serta jaringan sosial yang kuat di antara sesama perantau.

Migrasi orang Bugis ini tidak hanya menghasilkan pengaruh budaya pada wilayah yang mereka tinggali, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi, baik bagi daerah asal maupun tujuan. Menurut Leonard Andaya, pada abad ke-18 komunitas Bugis di Batavia telah berkembang menjadi kelompok yang berpengaruh. Mereka memiliki pemukiman sendiri dan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial (Andaya, 2015). Di wilayah-wilayah baru, orang Bugis sering dikenal sebagai pedagang, nelayan, atau petani yang ulet dan adaptif. Budaya migrasi ini berperan dalam menjaga ketahanan sosial ekonomi orang Bugis di tengah perubahan zaman, dan memperkuat identitas mereka sebagai kelompok etnis yang tangguh dan dinamis.

Penelitian ini bermaksud untuk menelusuri jejak jaringan orang Bugis di Batavia pada tahun 1799-1837. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan dibantu oleh antropologi, peneliti akan menelusuri terkait keberadaan orang Bugis di Batavia. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dampak adanya VOC yang memegang kebijakan di Batavia pada abad ke-18 tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab terhadap wacana keilmuan terkait fenomena keberlanjutan jaringan dan interaksi orang Bugis di Batavia, yang berperan tidak hanya

dalam konteks perdagangan tetapi juga dalam pembentukan hubungan sosial dan politik di Nusantara. Tradisi merantau (*sompe'*) yang mengakar kuat dalam budaya Bugis, ditambah dengan keahlian mereka dalam pelayaran dan perdagangan maritim, mendorong terbentuknya jaringan orang Bugis yang luas di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Batavia. Migrasi orang Bugis ke Batavia sendiri tidak dapat dilepaskan dari konteks politik di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-18. Penaklukan VOC atas Makassar melalui Perjanjian Bongaya (1667) mendorong gelombang migrasi orang Bugis ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk ke Batavia. Dalam catatan Heather Sutherland mengatakan bahwa abad ke-18 adalah periode migrasi besar-besaran orang Bugis ke berbagai wilayah Nusantara termasuk Batavia (Sutherland, 2001). Ini terjadi setelah jatuhnya Makassar ke tangan VOC pada 1669, mendorong banyak orang Bugis mencari wilayah baru.

Berdasarkan catatan sejarah seperti Dagh-Register Batavia dan arsip VOC, keberadaan komunitas Bugis di Batavia mulai terlihat signifikan pada awal abad ke-18. Mereka tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga membentuk jaringan sosial yang kompleks dengan berbagai kelompok etnis lainnya. Orang Bugis memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam membentuk aliansi dan jaringan di berbagai wilayah perantauan mereka (Andaya, 2015). Menurut Noorduyt (1988), keberadaan orang Bugis di Batavia sudah tercatat sejak pertengahan abad ke-17, namun jumlahnya meningkat secara signifikan pada akhir abad ke-18. Periode 1799-1837 sendiri menarik untuk dikaji karena bertepatan dengan masa transisi dari kekuasaan VOC ke pemerintahan Hindia Belanda, yang membawa perubahan dalam kebijakan kolonial terhadap kelompok etnis di Batavia. Hal ini berdampak terhadap lingkungan yang mendorong berbagai kelompok etnis termasuk Bugis untuk membangun jaringan dagang mereka di Batavia (Andaya, 1975).

Catatan Anthony Reid menjelaskan bahwa abad ke-18 merupakan periode penting dalam pembentukan jaringan politik dan perdagangan regional (Reid, 2003). Sehingga orang Bugis juga ikut andil memainkan peran signifikan dalam dinamika politik di berbagai wilayah termasuk Batavia. Selain itu,

abad ke-18 juga merupakan periode pembentukan dan konsolidasi orang Bugis yang secara signifikan tumbuh di Batavia. Hal ini ditandai dengan munculnya perkampungan Bugis dengan kondisi sosial yang lebih terstruktur (Knaap, 1996). Lebih lanjut, Christian Pelras mencatat bahwa pada abad ke-18, VOC memberikan *privilege* khusus kepada pedagang-pedagang Bugis di Batavia (Pelras, 1996). Kebijakan VOC yang lebih terbuka terhadap pedagang pribumi pada periode ini memungkinkan dokumentasi yang lebih baik tentang aktivitas orang Bugis. Adanya pengelompokan atau polarisasi yang dilakukan oleh VOC terhadap etnis yang berada di wilayah *Ommelanden* memberikan ruang bagi setiap etnis untuk membangun eksistensinya. Pada akhirnya, orang Bugis bermukim di beberapa kawasan, dengan dominasi utama di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Angke. Mereka memainkan peran penting dalam perdagangan maritim, terutama dalam distribusi rempah-rempah, tekstil, dan komoditas lainnya. Jaringan dagang mereka membentang dari Sulawesi hingga ke berbagai pelabuhan di Nusantara, menciptakan jaringan perdagangan informal yang beroperasi di samping sistem perdagangan VOC yang formal (Knaap, 1996).

Adanya proses migrasi, adaptasi, dan integrasi komunitas-komunitas maritim di Batavia menciptakan lingkungan multikultural yang sangat unik. Fenomena yang menarik bahwa bagaimana orang Bugis berhasil membangun dan mempertahankan eksistensinya di Batavia atas dominasi VOC dan pemerintahan Belanda serta persaingan dengan kelompok etnis lainnya. Mereka membangun identitas dan jaringan mereka di berbagai kota pelabuhan, termasuk Batavia. Jaringan ini tidak hanya mencakup aspek perdagangan, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Dapat kita simpulkan bahwa abad ke-18 merupakan masa keemasan perdagangan maritim yang melibatkan pedagang Bugis. Hal ini didukung oleh meningkatnya jaringan perdagangan teripang yang merupakan jenis komoditas laut di Sulawesi serta beberapa komoditas lain yang mencapai puncaknya pada periode ini (Sutherland, 2000).

Terkenalnya kawasan Sulawesi Selatan sebagai tempat berdirinya kerajaan Islam membuat mayoritas orang Bugis juga menganut ajaran Islam. Banyak

interaksi antara budaya lokal dan Islam yang menarik terjadi di kawasan tersebut. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana eksistensi etnis Bugis di Batavia atau Jakarta melalui kegiatan sosial-keagamaannya. Sebagai salah satu etnis yang memiliki falsafah hidup *pangaddereng* dibenturkan oleh lingkungan yang multi-etnis tentu akan terjadi interaksi antar budaya yang dapat menjadi bukti pendukung interaksi sosial-keagamaan orang Bugis di Batavia atau Jakarta.

Olehnya itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong karena kurangnya perhatian terhadap peran komunitas Bugis dalam narasi sejarah Batavia. Kebanyakan penelitian sejarah kolonial lebih fokus pada interaksi antara VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dengan kekuatan lokal besar, seperti Kesultanan Banten dan Mataram, sehingga mengabaikan kontribusi penting komunitas-komunitas maritim yang lebih kecil seperti Bugis. Hal ini semakin relevan mengingat minimnya studi komprehensif yang mengungkap dinamika internal komunitas Bugis di Batavia, khususnya terkait pola interaksi sosial, strategi adaptasi, dan pembentukan jaringan ekonomi-politik serta budaya mereka. Kebanyakan studi yang ada cenderung berfokus pada aspek perdagangan semata, tanpa melihat kompleksitas relasi sosial yang dibangun orang Bugis dengan berbagai kelompok etnis lainnya di Batavia. Selain itu, dengan berkembangnya kajian post-kolonial, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengungkap peran kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dalam historiografi mainstream (Luthfi et al., 2010). Oleh karena itu, mengeksplorasi interaksi dan jaringan orang Bugis dalam konteks sejarah Batavia adalah langkah penting dalam menambah wawasan mengenai struktur sosial dan ekonomi di kota tersebut.

Orang Bugis mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika sosial dan politik Batavia yang dikuasai VOC dan jaringan mereka mempengaruhi hubungan antar komunitas dan proses pembentukan identitas lokal di wilayah tersebut. Keterbatasan sumber-sumber lokal tentang kehadiran Bugis di Batavia juga menjadikan penelitian ini semakin mendesak untuk dilakukan. Mayoritas catatan yang tersedia berasal dari perspektif kolonial, sehingga diperlukan upaya reinterpretasi dengan mempertimbangkan *oral history* dan

tradisi tertulis Bugis. Hal ini penting untuk memberikan narasi yang lebih berimbang tentang peran komunitas Bugis dalam membentuk lanskap sosial-ekonomi Batavia. Batavia sebagai pusat perdagangan VOC di Asia menjadi magnet yang menarik berbagai kelompok etnis untuk datang, menetap, dan membangun jaringan sosial-ekonomi (Zaenuddin, 2014).

Batavia pada saat itu dipandang sebagai wilayah strategis di Asia Tenggara yang menarik berbagai komunitas dari Nusantara, Asia, dan Eropa. Di antara berbagai etnis yang hadir di Batavia, orang Bugis memainkan peran yang sangat signifikan namun seringkali luput dari perhatian dalam historiografi Indonesia. Dengan demikian, kajian tentang jaringan orang Bugis di Batavia abad ke-18 tidak hanya penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan historis, tetapi juga relevan dalam konteks kajian urban dan maritim kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi kota pelabuhan kolonial dan peran aktif komunitas lokal dalam membentuk sejarah urban Nusantara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika interaksi antar kelompok etnis di Batavia serta bagaimana jaringan orang Bugis memberikan dampak dalam sejarah kota tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah penegasan masalah yang terkandung dalam latar belakang. Dalam konteks penelitian “Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837”, identifikasi masalah penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk merumuskan masalah penelitian (*research problem*) berdasarkan masalah sosial (*social problem*) yang telah dipaparkan dalam latar belakang.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatasnya kajian mengenai keberadaan orang Bugis di Batavia pada abad ke-18 dan ke-19.
2. Pentingnya melihat peran orang Bugis dalam perkembangan sosial-ekonomi di Batavia pada abad ke-18 dan ke-19.

3. Pentingnya melihat jaringan sosial-keagamaan orang Bugis di Batavia pada abad ke-18 dan ke-19.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah mengenai keberadaan orang Bugis di Batavia abad ke-18 hingga abad ke-19, penelitian ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran terkait keberadaan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837?
2. Apa saja peran orang Bugis dalam perkembangan sosial ekonomi di Batavia tahun 1799-1837?
3. Bagaimana jaringan sosial keagamaan orang Bugis terbentuk di Batavia tahun 1799-1837 dan jejaknya saat ini?

1.4. Batasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. Pembatasan yang jelas diperlukan karena suatu penelitian akan bermanfaat jika dilakukan secara terbatas. Dalam konteks penelitian “Jaringan Orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837”, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa keberadaan orang Bugis di Batavia mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-18 dan abad ke-19. Namun, penelitian ini akan membatasi periodisasi pada tahun 1799-1837. Tahun 1799 merupakan masa transisi kekuasaan dari VOC kepada Pemerintah Belanda. Sedangkan tahun 1837 merupakan mulai terdokumentasinya perkampungan Bugis di Peta Batavia terbitan kolonial.
2. Batasan secara geografis adalah kawasan Ommelanden (wilayah di luar tembok Batavia) yang saat ini berada di Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara dalam lingkup administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Untuk memperkuat argumentasi mengenai keberadaan jaringan orang Bugis di Batavia, peneliti merasa perlu untuk melakukan riset lapangan dengan melakukan observasi terhadap salah satu komunitas Orang Bugis di Jakarta dan beberapa objek yang diperkirakan pernah bersinggungan dengan orang Bugis di Batavia atau Jakarta saat ini.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran terkait keberadaan jaringan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.
2. Mengetahui peran orang Bugis dalam perkembangan sosial ekonomi di Batavia tahun 1799-1837.
3. Mengungkapkan pentingnya melihat jaringan sosial-keagamaan orang Bugis di Batavia pada tahun 1799-1837

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya diskursus mengenai teori jaringan sosial, konsep diaspora dan migrasi serta identitas dalam konteks masyarakat maritim di Asia Tenggara pada masa kolonial. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang peran orang Bugis dalam membentuk dinamika interaksi antar etnis dan proses negosiasi kekuasaan di Batavia. Penelitian ini juga penting untuk mengisi kekosongan historiografi maritim Indonesia, khususnya dalam konteks *urban history* dan *diaspora studies*. Pemahaman tentang peran orang Bugis di Batavia dapat memberikan perspektif baru dalam memahami proses pembentukan identitas urban dan jaringan perdagangan maritim di Nusantara. Lebih jauh, studi ini dapat memperkaya kajian tentang agency dari komunitas lokal dalam konteks kolonialisme, di mana orang Bugis tidak semata menjadi objek pasif kebijakan VOC.

1.6.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini relevan dalam memperkuat pemahaman tentang warisan budaya dan sejarah komunitas maritim di Indonesia, yang bisa dijadikan landasan untuk studi lebih lanjut tentang mobilitas dan diaspora Bugis di wilayah lain. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pola-pola pembentukan komunitas urban dan strategi adaptasi kelompok migran di kota-kota pelabuhan. Pembelajaran dari pengalaman historis orang Bugis di Batavia dapat menjadi referensi penting dalam memahami dan mengelola dinamika urban kontemporer, khususnya terkait dengan isu multikulturalisme dan kohesi sosial di kota-kota besar.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian terkait “Jaringan Orang Bugis di Batavia Tahun 1799-1837” ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan antropologi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan melalui pengamatan langsung di lapangan, tanpa bergantung pada prosedur statistik atau pengukuran kuantitatif (Sujarweni, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui interaksi dengan para partisipan. Seperti yang dikemukakan oleh Danin, kebenaran dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat dipahami dengan mempelajari individu dalam konteks interaksi sosialnya (Danim, 2013). Melalui pendekatan yang interaktif dan adaptif, peneliti berupaya menggali dan memahami berbagai perspektif partisipan untuk mengungkap realitas sosial yang kompleks (Wekke, 2019). Dari segi keilmuan, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan antropologi untuk membantu dalam mengeksplorasi

dinamika kompleks jaringan orang Bugis di Batavia selama periode VOC dan pemerintahan Belanda pada tahun 1799-1837.

Adapun terkait pendekatan sejarah dapat dipahami dari dua perspektif utama yang saling melengkapi yaitu, subjektif dan objektif serta memiliki pendekatan metodologis yang khas dalam penelitiannya. Dalam pengertian subjektif, sejarah merupakan konstruksi atau bangunan naratif yang disusun oleh penulis, mengintegrasikan berbagai fakta historis menjadi suatu kesatuan cerita yang menggambarkan proses atau struktur dari suatu peristiwa di masa lalu. Sementara dalam arti objektif, sejarah merujuk pada kejadian aktual yang telah berlalu dan tidak dapat terulang kembali (Kartodirdjo, 1993). Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah merupakan kajian sistematis tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia. Kajian ini dilakukan secara ilmiah dengan memperhatikan kronologi, memberikan interpretasi, dan analisis kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu peristiwa (Haryanto, 2017).

Penggunaan pendekatan sejarah atau pendekatan historis menjadi metodologi penting dalam penelitian ini. Peneliti mengkaji objek studinya berdasarkan konteks kesejarahan secara sistematis. Dalam penelitian tentang masyarakat Bugis, pendekatan historis digunakan untuk memahami secara mendalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik mulai dari aktivitas sehari-hari hingga tradisi. Signifikansi pendekatan sejarah terletak pada kemampuannya membawa seseorang memahami suatu peristiwa sesuai dengan konteks zamannya. Hal ini sangat penting karena pemahaman yang terlepas dari konteks historis dapat menimbulkan interpretasi yang keliru atau menyesatkan (Afroni, 2019).

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi sebagai alat bantu. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, mulai dari asal-usul, keragaman fisik, adat istiadat, hingga kepercayaan di masa lampau (Mahyudi, 2023). Menurut Koentjaraningrat (2009), terdapat tujuh unsur universal kebudayaan

yang dapat ditemukan di seluruh bangsa di dunia, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Tujuan utama antropologi adalah membantu kita memahami diri sendiri melalui pemahaman terhadap kebudayaan lain, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan kesatuan esensial manusia yang mendorong sikap saling menghargai. Dalam konteks keagamaan, pendekatan antropologis berupaya memahami agama dengan mengamati praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat (Huda, 2016). Pendekatan ini memungkinkan agama menjadi lebih dekat dengan permasalahan manusia serta dapat memberikan penjelasan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

Sejarah dan antropologi memiliki hubungan yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Antropologi berkontribusi dengan menyediakan data prasejarah sebagai fondasi penulisan sejarah bangsa-bangsa, serta menawarkan metode dan konsep yang membantu sejarawan memahami konteks sosial di balik peristiwa politik yang tercatat dalam prasasti, dokumen, dan arsip kuno. Di sisi lain, antropologi memerlukan pengetahuan sejarah untuk memahami proses akulturasi dan pengaruh kebudayaan luar pada suku-suku bangsa yang diteliti, bahkan terkadang perlu merekonstruksi sendiri sejarah perpaduan budaya tersebut. Pendekatan yang mengintegrasikan kedua bidang ini sangat bermanfaat, seperti dalam penelitian tentang orang Bugis di Batavia abad ke-18, yang bertujuan mengungkap peran mereka dalam perkembangan masyarakat serta pelestarian tradisi yang masih diwariskan hingga saat ini.

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan yang dimulai pada bulan Januari-Mei 2025. Adapun pembagian waktunya mencakup beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Waktu penelitian (Bulan)					Ket
		Januari	Februari	Maret	April-Mei	Juni	

1	Pencarian & kritik sumber						Pustaka, Lisan
2	Tinjaun Pustaka berupa peta, dokumen, dll						Termasuk bimbingan, dll
3	Penelitian Lapangan						Penelusuran di ANRI dan PERPUSNAS RI serta Komunitas Ke-Bugis, wawancara
4	Pembahasan & Historiografi						Termasuk bimbingan, dll
5	Seminar Hasil Akhir						Termasuk bimbingan dan revisi-an

Tabel 1.1 Periode Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah berfokus kepada wilayah Ommelanden Batavia yang saat ini berada di antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di bawah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, peneliti mengunjungi Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI untuk mengumpulkan sumber tertulis tentang Bugis. Penelitian ini juga mengobservasi keberadaan komunitas orang Bugis sebagai wadah konsolidasi budaya dan agama bagi orang Bugis di Jakarta.

1.7.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono, sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Sugiyono, 2008). Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

- Data Primer

Informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara disebut sebagai data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Dalam hal ini, sumber primer berinteraksi secara langsung dengan peneliti untuk memberikan data, berbeda dengan sumber sekunder yang menyediakan data melalui perantara. Penelitian kualitatif mengutamakan pengambilan data dalam situasi yang natural, dengan mengandalkan sumber primer dan menggunakan metode seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, serta dokumentasi (Hardani et al., 2020).

Dalam konteks penelitian tentang masyarakat Bugis di Batavia, sumber yang menjadi rujukan utama adalah peta-peta yang dibuat pada abad ke-18 yang salah satunya diterbitkan tahun 1837 mengenai kawasan Batavia oleh Biro Statistik Sekretariat Jenderal Pemerintah Batavia. Ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemukiman Bugis di Batavia yang membantu peneliti memahami pola pemukiman dan distribusi spasial komunitas Bugis. Ini ditemukan berupa peta digital dari koleksi Universitas Leiden dan Nasional Arsip Belanda yang berasal dari abad ke-18. Peta tersebut memuat informasi penting tentang wilayah Ommelanden di Batavia, di mana terdapat area yang dinamakan kampung Bugis. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan data melalui Arsip Nasional tentang aktivitas surat-menyurat antara pemerintah Batavia dengan Kerajaan di Makassar pada abad ke-18 dengan judul “*“Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809”*”. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan tokoh budayawan dan tokoh komunitas Bugis di Jakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat mengungkap informasi mengenai jejaring komunitas Bugis di Batavia pada abad ke-18, termasuk aspek politik, ekonomi, dan tradisi budaya yang masih bertahan hingga masa kini.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau melalui perantara. Maksudnya ialah bahwa sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto, 2015).

Penggunaan data sekunder dalam penelitian mengenai jaringan orang Bugis di Batavia abad ke-18 melibatkan berbagai sumber literatur dan dokumen historis. Penelitian ini memanfaatkan catatan perjalanan para pelaut dan pedagang Eropa yang mengunjungi Batavia pada abad ke-18 hingga ke-19. Selain itu, Karya-karya akademis tentang Bugis, seperti penelitian Leonard Andaya dan Christian Pelras serta Bondan Kanumoyoso memberikan konteks yang lebih luas tentang pola perpindahan dan pembentukan jaringan orang Bugis di berbagai wilayah, termasuk Batavia. Selain itu, keberadaan komunitas Ke-Bugis dapat dijadikan bukti penguat mengenai keberadaan orang Bugis di Jakarta (Batavia saat ini).

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya akan menghasilkan informasi deskriptif. Khusus untuk riset berbasis sejarah, prosesnya mengikuti empat langkah metodologis yang terdiri dari pencarian sumber (heuristik), verifikasi sumber (kritik), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Walaupun pendekatan utama menggunakan pendekatan sejarah, namun peneliti juga menggunakan pendekatan studi lainnya dalam melengkapi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu, peneliti melakukan observasi dan wawancara ke salah satu komunitas orang Bugis di Jakarta.

- Pencarian Sumber (Heuristik)

Menurut etimologi, Ditinjau dari akar katanya, heuristik berasal dari "*heuristiken*" dalam bahasa Yunani yang berarti proses mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber sejarah sendiri

merujuk pada berbagai bentuk material historis yang tersebar di berbagai tempat dan hadir dalam beragam bentuk (Pranoto, 2010). Sumber-sumber sejarah mencakup arsip, dokumen, buku, jurnal/majalah, koran, serta beberapa sumber lainnya. Pada saat ini, informasi sejarah dapat diperoleh dengan beragam metode yang tidak hanya melibatkan penelitian pustaka; sumber sejarah juga tersedia dalam format cetak maupun digital (Susilo & Isbandiyah, 2018).

Dalam proses penelusuran objek kajian, peneliti menemukan peta digital yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Peta digital ini dapat diakses di laman web Universitas Leiden Belanda dan *Archief national*. Terdapat puluhan peta yang menunjukkan terkait “Kampung Bugis” yang rata-rata diterbitkan pada abad ke-19. Selain itu, peneliti juga menelusuri arsip-arsip tentang Batavia pada Arsip Nasional Indonesia yang di dalamnya memuat aktivitas administrasi pemerintahan Belanda. Terdapat data dokumen yang menunjukkan aktivitas surat-menyurat antara pemerintah di Batavia dengan kerajaan di Makassar.

Oleh karena itu, sumber-sumber ini akan dijadikan sebagai data primer untuk memperkuat eksistensi penelitian jaringan orang Bugis di Batavia. Selain itu, sumber-sumber yang lain akan tetap dimuat sebagai bahan untuk memperluas konteks penelitian dan memperkaya historiografi sejarah yang disusun peneliti.

- Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber atau dikenal sebagai kritisisme merupakan tahap evaluasi untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Tahapan ini sangat krusial dalam metodologi penelitian sejarah, bahkan dianggap begitu fundamental sehingga keseluruhan proses metodologi sejarah sering disebut sebagai Kritisisme Sejarah. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai materi sumber sejarah

untuk menentukan tingkat reliabilitas dan validitasnya (Wasino & Hartatik, 2018).

Kritik sumber merupakan langkah untuk mengevaluasi suatu sumber, termasuk menentukan apakah sumber tersebut asli atau palsu (kritik eksternal) serta menilai apakah isi dari sumber tersebut dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan (kritik internal) (Haif, 2016). Kritik eksternal merujuk pada penilaian terhadap keaslian informasi atau dokumen, yang mencakup aspek bahan (seperti tulisan dalam dokumen) dan individu yang terlibat (baik pelaku maupun saksi). Verifikasi keaslian dokumen tidak hanya dilakukan pada sumber tertulis, tetapi juga melibatkan sumber benda (seperti artefak), serta penjelasan dari pelaku atau saksi sejarah yang sering dikenal sebagai sejarah lisan, dan sumber lainnya. Di sisi lain, kritik internal berkaitan dengan verifikasi kredibilitas atau keandalan data, yang berfokus pada isi informasi dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Dalam konteks ini, seorang penulis harus bersikap objektif dan netral saat menggunakan data yang telah dikumpulkan, agar kebenaran peristiwa sejarah dapat terjamin (Yuliani, 2020).

Dalam upaya memperjelas data yang didapatkan, maka peneliti melakukan verifikasi sumber dengan melakukan perbandingan beberapa peta digital yang di dalamnya mencantumkan nama “Kampung Bugis”. Dengan melakukan perbandingan landscape geografis antara peta dulu hingga sekarang akan membantu dalam memahami pola pemukiman orang Bugis di Batavia. Adapun arsip surat-menyurat pemerintahan di Batavia dengan Kerajaan di Makassar harus dilakukan penerjemahan bahasa karena sumber arsip tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda. Sebelumnya, proses pengambilan data arsip di Arsip Nasional harus melalui prosedur dan tahap administrasi untuk bisa mengakses data tersebut. Tentunya, penerjemahan data akan dibantu oleh dosen ataupun ahli di bidang bahasa Belanda. Sehingga hasilnya tentu saja akan menjadi penguat terkait adanya hubungan kerajaan dulu dengan pemerintah Batavia,

baik itu secara formal maupun non-formal yang terjadi pada periode yang sesuai dengan batasan penelitian.

- Penafsiran (Interpretasi)

Interpretasi adalah suatu bentuk imajinasi atau penggambaran mengenai konteks peristiwa yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis sejarah atau sejarawan diharapkan dapat membayangkan bagaimana keadaan masa lalu untuk kemudian dituangkan dalam bentuk narasi sejarah. Selain itu, tahap interpretasi ini juga merupakan proses yang menarik, di mana sejarawan menafsirkan peristiwa-peristiwa dari masa lalu untuk direkonstruksi dan disajikan kembali di masa kini.

Penafsiran dalam konteks ilmu sejarah tidak dilakukan tanpa dasar yang kuat atau hanya berdasarkan asumsi dan emosi penulis. Hal ini penting untuk menghindari penulisan sejarah yang rentan terhadap subjektivitas dan prasangka individu, yang dapat mengaburkan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu, interpretasi ini harus didasarkan pada sumber-sumber yang telah melalui proses kritik sebelumnya, sehingga validitas data yang digunakan sudah terjamin dan representatif untuk diinterpretasikan (Padiatra, 2020).

Penafsiran terkait peta digital yang menunjukkan tentang “kampung Bugis” di Batavia khususnya tahun 1837 menegaskan bahwa ternyata orang Bugis secara administratif sudah diakui oleh penguasa wilayah yakni VOC maupun Pemerintahan Belanda. Selain itu, berdasarkan titik lokasi kampung menunjukkan bahwa wilayah tersebut berdekatan dengan sumber air seperti laut dan sungai. Sehingga ini menunjukkan bahwa orang Bugis memiliki pola pemukiman di sekitaran pesisir laut yang menjadikannya disebut-disebut sebagai seorang pelaut dan ahli dalam Maritim. Adapun terkait arsip yang ditemukan pada Arsip Nasional Indonesia menunjukkan bahwa adanya hubungan secara administratif antara Pemerintah di Batavia dengan Kerajaan lokal di Makassar yang ditandai dengan aktivitas surat-menyurat. Hal ini tentu saja menjadi

bukti yang penting dan pendorong utama urgensi penelitian ini dilakukan.

- Penulisan (Historiografi)

Historiografi merupakan fase penulisan yang mengubah hasil penelusuran dan analisis jejak masa lalu menjadi narasi sejarah yang utuh. Tahap ini menuntut kemampuan untuk merangkai fakta-fakta historis menjadi cerita yang mengalir dan bermakna, di mana keahlian menulis memegang peranan penting dalam menciptakan rekonstruksi peristiwa masa lampau yang koheren (Herlina, 2020). Historiografi adalah metode dalam menulis, menyajikan, atau melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Seperti halnya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya memberikan gambaran yang jelas mengenai seluruh proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Dari penulisan sejarah tersebut, dapat dievaluasi apakah penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, apakah sumber atau data yang digunakan untuk mendukung kesimpulan memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup, dan sebagainya.

Pokok utama dalam historiografi membahas tentang sejarah penulisan sejarah itu sendiri. Dalam konteks yang lebih praktis, hal ini dapat dipahami sebagai cara manusia mencatat sejarahnya dari periode tertentu. Dengan demikian, fokus pembahasan ini adalah mengenai sejarah penulisan sejarah, atau lebih jelasnya, mempelajari bagaimana manusia mendokumentasikan sejarahnya dari waktu yang spesifik (Putri & Nurjihan, 2024). Dengan demikian, melalui tahap penulisan ini akan menentukan kualitas penelitian sejarah tersebut.

Dengan adanya penelitian tentang orang Bugis di Batavia diharapkan untuk menambah historiografi terkait peran orang-orang lokal dalam sejarah Indonesia. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan, sehingga peneliti berharap agar historiografi sejarah ini kiranya menjadi salah satu rujukan untuk lebih mengungkap terkait penelitian-penelitian di kawasan Batavia.

Harapannya tentu saja akan memunculkan lebih banyak perspektif baru tentang sejarah bangsa Indonesia yang lahir dari rahim bangsa sendiri.

1.7.5. Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian, instrumen memainkan peran vital sebagai komponen prosedural yang tak terpisahkan. Instrumen berperan sebagai perangkat pendukung untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penyusunan instrumen pada hakikatnya identik dengan merancang perangkat evaluasi, mengingat proses evaluasi bertujuan untuk memperoleh data mengenai objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dapat diukur menggunakan parameter yang telah ditetapkan peneliti sebelumnya (Siyoto, 2015).

Khusus dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pengumpul informasi utama, baik dengan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber, maupun dengan mendelegasikan pengumpulan data kepada pihak lain dengan tetap mengikuti prosedur yang sama (Sahir, 2021). Adapun kisi-kisi instrumen penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang jaringan orang Bugis di Batavia abad ke-18 sebagai berikut:

1. Tinjauan Sejarah Keberadaan Orang Bugis di Batavia Abad ke-17-19
 - a. Mengidentifikasi bukti-bukti keberadaan orang Bugis di Batavia tahun abad ke-17-19.
 - b. Mengidentifikasi tokoh-tokoh Bugis di Batavia abad ke-17-19
 - c. Mengidentifikasi hubungan orang Bugis dengan penguasa dan masyarakat di Batavia abad ke-17-19
2. Jejak Keberadaan Orang Bugis di Batavia Tahun 1799-1837
 - a. Menelusuri kampung Bugis di Batavia dalam peta, arsip dan sumber informasi lainnya

- b. Mengidentifikasi Dinamika hubungan orang Bugis dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia dalam rentang tahun 1799-1837.
 - c. Mengidentifikasi pola pemukiman orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.
- 3. Orang Bugis dan Aktivitas Sosial Ekonomi di Batavia Tahun 1799-1837
 - a. Mengidentifikasi aktivitas perdagangan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.
 - b. Mengidentifikasi komoditas utama orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.
 - c. Mengidentifikasi sistem mata pencaharian orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.
- 4. Aspek Budaya dan Agama Orang Bugis di Batavia Tahun 1799-1837 dan Komunitas Bugis di Jakarta Saat Ini
 - a. Mengidentifikasi adat istiadat orang Bugis di Batavia yang masih lestari.
 - b. Mengidentifikasi bahasa orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837 hingga sekarang.
 - c. Mengidentifikasi praktek keagamaan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837 hingga sekarang.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan sistematis untuk mengolah informasi yang dikumpulkan melalui berbagai sumber data yang ditemukan. Prosesnya melibatkan pengorganisasian informasi ke dalam kelompok-kelompok, pemecahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan kembali, penataan dalam struktur tertentu, dan pemilahan informasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti memulai dari data spesifik yang terkumpul untuk kemudian mengembangkan dugaan sementara atau

hipotesis (Hardani et al., 2020). Hasil dari hipotesis selanjutnya akan berkembang menjadi sebuah temuan hasil penelitian.

Proses analisis dalam pendekatan penelitian kualitatif merupakan kegiatan berkelanjutan yang tidak terbatas pada satu tahap saja. Kegiatan penelitian dimulai sebelum peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengumpulkan data sehingga hasilnya sesuai dengan proposal skripsi ini. Sebagaimana dikemukakan Nasution (1988), aktivitas analisis sudah dimulai ketika peneliti mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan kritik dan interpretasi terhadap sumber-sumber yang ada. Prosesnya terus berlanjut hingga tahap penulisan hasil penelitian atau historiografi.

Dalam kajian terkait orang Bugis di Batavia masih belum terlalu banyak yang membahasnya sehingga fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan lebih difokuskan menyesuaikan dengan ketersediaan sumber selama di lapangan. Dalam proses analisis lapangan peneliti mengadopsi pendekatan Spradley dengan memanfaatkan informan kunci yang memiliki kredibilitas dan otoritas dalam komunitas. Informan kunci ini berperan penting dalam memfasilitasi akses peneliti ke lokasi penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui sesi wawancara dengan berbagai interlokutor, dimana peneliti mendokumentasikan setiap informasi yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti mengamati objek penelitian secara seksama sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat deskriptif. Tahap akhir meliputi pengolahan dan analisis mendalam terhadap data hasil wawancara yang telah terkumpul (Naufanita et al., 2018).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman isi skripsi yang terbagi dalam bab dan subbab, yang mencerminkan kesatuan secara utuh. Dalam penelitian kualitatif (*field research*), sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I, yaitu berisi **Pendahuluan**. Pada bagian ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batasan masalah

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mana berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir dari isi pendahuluan adalah sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran besar sebuah permasalahan mengenai jaringan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837.

BAB II, yang berisi **Kajian Teori**, pada bagian ini meliputi kerangka teori, kerangka penelitian, dan tinjauan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

BAB III, yang berisi **Hasil dan Pembahasan**, pada bagian ini menyajikan tentang jejak keberadaan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837, Peran orang Bugis dalam perkembangan sosial-ekonomi di Batavia dan jaringan sosial-keagamaan orang Bugis hingga sekarang.

BAB IV, yang berisi **Penutup**, yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka, merupakan daftar bahan bacaan atau referensi yang menjadi sumber dan dasarpenulisan karya ilmiah. Referensi dapat berupa buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, laporan- wawancara, sumber yang diakses dari internet, dan sebagainya dengan tetap memenuhi kaidah ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Jaringan Sosial (Social Network Theory)

Secara umum, menurut Nisfu Laily, jaringan sosial (*Social Network*) merupakan pendekatan teoritis yang sangat penting dalam memahami dinamika hubungan sosial dan interaksi antarmanusia dalam berbagai konteks. Teori ini berakar pada pemahaman mendalam tentang bagaimana individu-individu terhubung, berinteraksi, dan saling mempengaruhi dalam struktur sosial yang kompleks. Teori jaringan sosial ini berangkat dari pola interaksi antar individu yang nantinya membentuk struktur organisasi di masyarakat (Hidayatullah et al., 2020). Van Dijk (2006) menjelaskan pula bahwa jaringan sosial merupakan sistem sosial yang menampilkan ikatan konkret dalam hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan sosial terdiri dari pelaku sosial yaitu manusia yang melakukan komunikasi dengan sesamanya sehingga terhubung sebagai bagian dari interaksi dan menjalin relasi antar individu secara tidak langsung.

Menurut Streeter dan Gillespie (1992), jaringan sosial merupakan kumpulan ikatan antar unit-unit sosial yang saling terhubung satu sama lain. Definisi tersebut mengandung tiga aspek penting. Aspek yang pertama adalah bahwa jaringan memiliki batasan tertentu, di mana terdapat kriteria-kriteria yang menentukan siapa saja yang termasuk dalam suatu jaringan. Batasan dalam beberapa jenis jaringan seperti sistem kekerabatan, kelompok pertemanan, dan tim kerja umumnya mudah diidentifikasi karena memiliki struktur yang jelas. Namun dalam sistem sosial yang lebih besar, jaringan sosial cenderung melekat sehingga batas-batasnya menjadi sangat sulit untuk didefinisikan. Aspek kedua yang penting adalah keterkaitan dalam jaringan. Setiap anggota harus memiliki atau berpotensi membangun hubungan dengan anggota lainnya untuk menjadi bagian dari jaringan sosial tersebut.

Hubungan ini dapat terjalin baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun ada kemungkinan beberapa anggota terpinggirkan atau tersisih dari jaringan, yang terpenting adalah setiap anggota harus terhubung dengan anggota lain agar dapat dianggap sebagai bagian dari jaringan.

Kemudian aspek yang terakhir berkaitan dengan unit sosial. Analisis jaringan dapat diterapkan pada berbagai tingkatan unit sosial yang lebih luas. Penerapannya bisa dilakukan pada tingkat individu, khususnya untuk jaringan dukungan sosial. Selain itu, analisis ini juga dapat diterapkan pada lembaga layanan sosial, institusi sosial dalam komunitas lokal, atau bahkan bangsa dalam konteks ekonomi global. Dalam berbagai bidang profesi seperti pekerjaan sosial, analisis jaringan sosial dapat digunakan secara langsung dalam penelitian yang mencakup praktik klinis, analisis kebijakan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen organisasi (Rauf et al., 2019).

Lebih lanjut, teori jaringan sosial juga merupakan pendekatan analitis yang sangat penting dalam memahami dinamika hubungan dan interaksi sosial dalam berbagai konteks kemasyarakatan. Menurut Mark Granovetter, jaringan sosial tidak hanya sekadar menggambarkan struktur hubungan antarmanusia, melainkan juga menjelaskan bagaimana informasi, pengaruh, dan sumber daya mengalir di antara aktor-aktor sosial (Granovetter, 1973). Dapat dipahami bahwa adanya teori ini akan mengungkap bagaimana ikatan dan relasi sosial berkembang antara individu atau organisasi melalui koneksi dan ketergantungan satu sama lain. Sebuah jaringan sosial terbentuk ketika terjadi interaksi dan saling ketergantungan antara individu/organisasi dengan pihak lainnya, terutama saat mereka mulai berinteraksi untuk berbagi pemikiran dan sumber daya, mengungkapkan aspirasi dan emosi, mencari bantuan, memberikan saran, serta bertukar informasi melalui komunikasi dua arah yang terjadi secara berulang atau berkelanjutan.

Dalam perspektif sosiologis, jaringan sosial memungkinkan untuk membantu dalam pemetaan kompleksitas hubungan sosial yang terbentuk melalui berbagai ikatan, baik yang kuat maupun lemah. Ronald Burt (1992) juga mengembangkan konsep lebih lanjut dengan menjelaskan bagaimana struktur jaringan dapat menciptakan keuntungan atau kerugian bagi individu dalam konteks sosial dan profesional (Burt, 2010). Analisis jaringan sosial tidak hanya terbatas pada studi sosiologi, tetapi telah meluas ke berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, psikologi sosial, dan ilmu komunikasi. Sebagaimana pandangan Granovetter sebelumnya, bahwa Teori jaringan sosial menguraikan keterkaitan antara hubungan sosial dan dampak ekonominya. Menurut Granovetter, aktivitas ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan tertanam dalam hubungan sosial. Artinya, kegiatan yang tidak berhubungan dengan ekonomi (seperti pertemanan atau kekerabatan) ternyata bisa memberikan keuntungan ekonomi. Sebagai contoh, jaringan sosial bisa menjadi tempat munculnya ide-ide baru (inovasi) yang kemudian menyebar ke masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kita miliki tidak hanya bermanfaat untuk bersosialisasi, tetapi juga bisa membawa keuntungan ekonomi (Mudiarta, 2009). Barry Wellman dalam penelitiannya juga menekankan bahwa pendekatan jaringan sosial ini memungkinkan kita memahami bagaimana individu terhubung satu sama lain melalui ikatan kompleks yang melampaui batas-batas tradisional seperti keluarga, organisasi, atau komunitas (Wellman, 1997).

Dalam konteks kontemporer, teori jaringan sosial semakin relevan dengan munculnya media sosial dan teknologi digital. Manuel Castells menggambarkan bagaimana jaringan digital telah mentransformasi cara manusia berinteraksi, menciptakan ruang-ruang baru untuk koneksi sosial yang melintasi batas geografis dan kultural (Castells & Castells, 2010). Dari perspektif teoritis, jaringan sosial tidak hanya sekadar menggambarkan hubungan, tetapi juga menjelaskan bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu dan kolektif. Hal ini membuka

ruang untuk memahami kompleksitas interaksi manusia dengan cara yang lebih mendalam dan komprehensif, melampaui pendekatan tradisional dalam memahami fenomena sosial. Secara metodologis, analisis jaringan sosial menggunakan berbagai alat dan teknik untuk memetakan serta mengukur struktur hubungan, termasuk analisis matriks, sosiometri, dan berbagai perangkat khusus lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola interaksi, menganalisis posisi aktor dalam jaringan, serta memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam sistem sosial.

Konsep jaringan sosial yang dikemukakan oleh J.A. Barnes (1954) menjadi landasan utama dalam memahami pola hubungan dan interaksi orang Bugis di Batavia. Menurut Barnes, jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan yang mengikat satu aktor dengan aktor lainnya dalam suatu sistem sosial. Barnes kemudian membedakan Jaringan menjadi jaringan total, yang mengacu pada jaringan sosial yang kompleks, dan jaringan parsial, yang hanya mencakup satu jenis hubungan sosial. Selain itu, jaringan sosial juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari hubungan sosial yang membentuknya. Dalam konteks orang Bugis di Batavia, teori ini membantu menganalisis bagaimana mereka membangun dan mempertahankan hubungan sosial, ekonomi, dan politik baik sesama orang Bugis maupun dengan kelompok etnis lainnya (Hidayaturrehman et al., 2020).

2.1.2 Konsep Diaspora dan Migrasi

Konsep diaspora dan migrasi merupakan fenomena sosial kompleks yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika perpindahan manusia di seluruh dunia. Menurut KBBI, Diaspora merupakan masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia (2016). Penelitian ini menggunakan teori diaspora dari William Safran (1991) untuk menelaah cara orang Bugis mempertahankan identitas budaya dan koneksi dengan tanah asal mereka saat hidup di perantauan. Analisis ini juga didukung oleh

pemikiran Everett S. Lee (1966) mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menarik terjadinya migrasi, yang memberikan pemahaman tentang alasan dan karakteristik perpindahan masyarakat Bugis ke Batavia.

Masyarakat Bugis, yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kelompok maritim dan perantau yang paling berpengaruh di kepulauan Indonesia. "*Passompe*" atau budaya merantau telah mengakar dalam kehidupan Bugis sejak lama, menciptakan jejaring dagang dan komunitas yang tersebar luas. Menurut Pelras (2006), kebiasaan merantau suku Bugis yang dimulai pada abad ke-16 dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk jiwa dagang maritim, nilai-nilai "*siri*" dan "*pesse*", kemampuan berlayar, serta situasi politik di daerah asal. Persebaran orang Bugis mencakup berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan pengamatan Lineton, orang Bugis di perantauan memiliki karakteristik khusus, yaitu kecenderungan bermukim di area pesisir atau dekat muara sungai, membangun kelompok masyarakat yang solid, menjaga tradisi, serta mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan (Lineton, 1947).

Konsep diaspora dapat dibagi dalam tiga era utama yaitu **Pertama**, era klasik yang mencakup masa prasejarah hingga abad pertengahan. **Kedua**, era modern yang bermula setelah abad ke-17. **Ketiga**, era kontemporer yang dimulai sekitar tahun 1980-an. Selama era klasik dan modern, diskusi tentang identitas menjadi fokus utama dalam kajian diaspora. Di era modern, konsep diaspora diperluas mencakup berbagai kelompok bangsa, meski tetap mengacu pada model Yahudi dan Yunani sebagai contoh utama. Karakteristik diaspora pada masa ini meliputi kehidupan di luar tanah leluhur, pemeliharaan ingatan bersama, pandangan dan mitos tentang tanah asal, perasaan terasing di tempat baru, anggapan bahwa tanah asal adalah tempat ideal, keinginan untuk pulang bila memungkinkan, keyakinan kolektif untuk membangun tanah asal, serta kesadaran komunitas yang saling

terhubung. Dalam konteks kontemporer yang berkaitan dengan globalisasi, pemahaman diaspora lebih ditekankan pada aspek ekonomi politik, ditandai dengan berkembangnya berbagai lembaga diaspora. Fokus diskusi tidak lagi sekadar mendefinisikan diaspora atau menentukan kelompok mana yang termasuk diaspora, tetapi lebih kepada bagaimana diaspora dapat berkontribusi dalam pembangunan sebagai bentuk penguatan hubungan antara komunitas diaspora dengan negara asal mereka (Naufanita et al., 2018).

Awalnya, kata diaspora memang digunakan untuk menggambarkan situasi masyarakat Yahudi yang mengalami pengusiran dan tersebar di berbagai wilayah, melewati batas-batas etnis, agama, dan negara, jauh dari tanah leluhur mereka. Konsep munculnya diaspora ini seringkali dikaitkan dengan istilah-istilah serupa seperti hibriditas, migrasi, dan kreolisasi yang menggambarkan kekuatan progresif dalam hal posisi, pencampuran budaya, serta pemahaman tentang identitas dan teritorial. Makna diaspora kemudian mengalami evolusi seiring waktu. Ditinjau dari segi etimologi, kata ini berasal dari bahasa Yunani "*diaspeiro*" yang memiliki arti penyebaran atau penaburan benih. Pada masa Yunani kuno, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan penduduk dari suatu kota kerajaan ke daerah-daerah taklukannya, dengan tujuan kolonisasi dan asimilasi wilayah tersebut ke dalam kekuasaan kerajaan (Hendraswati et al., 2017).

Sejak pertengahan abad ke-20, istilah diaspora yang berarti persebaran manusia mulai banyak digunakan oleh para akademisi. Mereka mencatat bahwa penggunaan istilah "*Jewish diaspora*" (diaspora Yahudi) dan "*African diaspora*" (diaspora Afrika) pertama kali muncul pada tahun 1965. Setelah itu, studi tentang persebaran orang Yahudi ke berbagai wilayah dan kehidupan orang Afrika di luar negara asalnya menjadi topik yang sangat populer dan berkembang pesat. Meski demikian, penelitian tentang diaspora Palestina dan China juga ada, namun masih dalam skala yang lebih kecil (Santoso, 2014).

Menurut pandangan para ahli antropologi dan sosiologi, diaspora merujuk pada penyebaran sekelompok etnis atau masyarakat dari tanah asalnya ke berbagai wilayah di seluruh dunia, dengan tetap mempertahankan identitas dan ikatan budaya mereka. Dalam konteks historis, studi tentang diaspora awalnya fokus pada pengalaman perpindahan komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia setelah terjadinya diaspora pada masa kekaisaran Romawi. Pada periode sekitar 800-600 SM, yang dikenal sebagai "Zaman Kolonisasi Besar" (*Great Age of Colonization*), masyarakat Yunani melakukan gelombang migrasi besar-besaran ke berbagai wilayah di sekitar Laut Mediterania dan Laut Hitam. Menurut sejarawan John Boardman, faktor pendorong utama migrasi ini adalah pertumbuhan populasi yang pesat di kota-kota Yunani, keterbatasan lahan pertanian, dan konflik politik internal. Masyarakat Yunani mendirikan koloni-koloni baru yang disebut "*apoikia*" di berbagai wilayah, mulai dari pesisir Italia Selatan (yang kemudian dikenal sebagai *Magna Graecia*) hingga pantai Laut Hitam (Boardman, 2000).

Moses Finley juga menjelaskan bahwa kolonisasi Yunani berbeda dengan imperialisme modern karena koloni-koloni ini umumnya bersifat independen dan membangun identitas kultural mereka sendiri, meski tetap mempertahankan hubungan religius dan budaya dengan kota asal mereka. Proses ini membentuk jaringan perdagangan yang luas dan pertukaran budaya yang signifikan (Finley, 1999). Robin Osborne menekankan pula bahwa koloni-koloni Yunani tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berperan dalam penyebaran bahasa, sistem politik, dan tradisi keagamaan Yunani ke berbagai wilayah Mediterania (Osborne, 2009).

Kemudian, pada masa kejayaan Islam juga terdapat fenomena yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam serta penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah. Pola diaspora juga merupakan konsep yang berakar dari khazanah peradaban Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah

ke Madinah pada tahun 622 M menjadi tonggak awal migrasi dalam sejarah Islam. Menurut Hourani (1991), hijrah bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan juga menandai transformasi sosial-politik dalam perkembangan Islam awal. Migrasi ini diikuti oleh para pengikut Nabi (Muhajirin) yang kemudian membentuk komunitas Muslim pertama di Madinah (Hourani, 2002). Berlanjut ke Periode Khulafaur Rasyidin (632-661 M) ditandai dengan ekspansi teritorial yang pesat, mengakibatkan gelombang migrasi besar-besaran. Kennedy mencatat bahwa pada masa ini, terjadi perpindahan penduduk Arab ke wilayah-wilayah baru seperti Suriah, Irak, dan Mesir. Para migran ini membentuk garnisun-garnisun militer yang kemudian berkembang menjadi kota-kota besar seperti Basrah dan Kufa (Kennedy & Barbir, 2003).

Kemudian selama periode Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M), terjadi berbagai gelombang migrasi yang lebih kompleks yakni **pertama**, adanya migrasi pedagang Arab. Menurut Lapidus (2014), jaringan pedagang Arab Muslim membentuk komunitas-komunitas di sepanjang rute perdagangan, dari pantai Afrika Timur hingga Asia Tenggara. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang tetapi juga menyebarkan Islam dan budaya Arab (Lapidus, 2014). **Kedua**, migrasi ilmuwan dan cendekiawan dalam penelitian Bennison menyatakan bahwa perpindahan para ilmuwan dan cendekiawan antar wilayah kekuasaan Islam menciptakan jaringan intelektual yang luas. Perpustakaan dan pusat-pusat pembelajaran seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menjadi magnet yang menarik para sarjana dari berbagai penjuru dunia Islam (Bennison, 2009). **Ketiga**, adanya pertukaran budaya yang mana migrasi menciptakan pertukaran budaya yang intensif, menghasilkan sintesis budaya baru di berbagai wilayah Islam (Robinson, 2018).

Lebih lanjut, kaum muslim yang tinggal di luar negeri juga menghadapi tiga tantangan utama dalam kehidupan mereka. **Pertama**, berkaitan dengan posisi mereka sebagai kelompok minoritas yang hidup

di tengah masyarakat dengan karakteristik yang sangat berbeda - baik dari segi kebiasaan, kebudayaan, keyakinan, latar belakang sejarah, kondisi sosial politik, maupun ekonomi. **Kedua**, menyangkut respons negara tempat mereka bermukim. Beberapa negara seperti Amerika bersikap lebih terbuka karena pengalaman pahit terkait rasisme, sementara negara-negara Eropa yang memiliki sejarah kolonial cenderung lebih sensitif, mengingat sebagian besar Muslim pendatang berasal dari bekas koloni mereka. Keberadaan komunitas Muslim seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah terbentuk selama berabad-abad. **Ketiga**, berkaitan dengan relasi mereka dengan tanah air, termasuk pengaruh kepentingan negara asal serta rasa kepedulian mereka terhadap kampung halaman yang dapat mempengaruhi kehidupan di negara baru. Kondisi tanpa batas ini menciptakan krisis ideologi bagi Muslim perantau. Situasi menjadi lebih kompleks bagi generasi kedua dan ketiga yang lahir dan tumbuh di negara tujuan, karena mereka merasa lebih nyaman mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat Barat (Damanuri, 2012).

Secara makna, kata diaspora memiliki kesamaan arti dengan migrasi. Migrasi berasal dari kata bahasa Inggris "*migration*" yang berarti perpindahan. Berdasarkan KBBI, migrasi merupakan proses berpindahnya sekelompok penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain, atau dapat juga berarti perpindahan penduduk antar negara dengan tujuan untuk menetap. Perjalanan manusia dalam mencari kehidupan yang lebih baik telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Migrasi sendiri dapat dipahami sebagai gerakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan berbagai motivasi. Menurut data United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), pada tahun 2020 tercatat sekitar 280 juta orang di dunia merupakan migran internasional, yang menunjukkan skala fenomena perpindahan penduduk yang signifikan (*UN-DESA | Departemen Ekonomi Dan Sosial*, n.d.).

Menurut Everet S. Lee (1976) memandang migrasi sebagai suatu proses perpindahan tempat tinggal, baik secara permanen maupun sementara, tanpa dibatasi oleh jarak atau sifat perpindahannya (Lee, 1976). Dalam pandangannya, keterbatasan lapangan kerja di daerah asal yang mengakibatkan tingginya pengangguran menjadi pendorong utama masyarakat untuk melakukan migrasi ke luar negeri. Melengkapi pemikiran tersebut, Mantra (2000) mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam bermigrasi. Pertama, dorongan dari dalam diri individu sendiri yang mencerminkan motivasi dan aspirasi personal. Kedua, kondisi-kondisi di daerah asal yang mungkin kurang mendukung perkembangan individu. Ketiga, daya tarik yang ditawarkan oleh daerah tujuan seperti peluang ekonomi yang lebih baik. Terakhir, berbagai tantangan atau rintangan yang harus dihadapi dalam proses perpindahan dari daerah asal menuju daerah tujuan.

Para peneliti telah menemukan perbedaan penting antara konsep diaspora dan migrasi dalam studi perpindahan penduduk global. Menurut Butler, diaspora memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding migrasi biasa. Diaspora melibatkan penyebaran masyarakat ke minimal dua wilayah berbeda, sambil tetap mempertahankan koneksi dengan tanah asal mereka, baik secara fisik maupun simbolis. Kelompok diaspora juga menciptakan identitas kolektif yang kuat dan berlanjut setidaknya selama dua generasi (Butler, 2001). Sedangkan Cohen memandang migrasi sebagai perpindahan yang lebih sederhana, di mana seseorang atau kelompok berpindah lokasi karena alasan praktis seperti mencari kesempatan ekonomi lebih baik, pendidikan, atau peningkatan kualitas hidup. Berbeda dengan diaspora, migran tidak selalu merasa perlu menjaga hubungan erat dengan negara asal mereka (Cohen, 2023).

Selain itu, Safran (2005) menambahkan bahwa diaspora sering bermula dari peristiwa traumatis seperti pengusiran, perbudakan, atau perang. Komunitas diaspora membawa ingatan bersama dan cerita tentang tanah air mereka yang terus hidup dalam kesadaran komunitas.

Mereka juga kerap menghadapi tantangan penerimaan di negara baru, yang menimbulkan kerinduan untuk kembali ke tanah asal. Faktor-faktor psikologis dan sosial ini menjadikan diaspora fenomena yang jauh lebih rumit dibandingkan migrasi biasa (Safran, 2005). Lebih lanjut, Cohen menjelaskan bahwa migrasi dan diaspora memiliki hubungan erat dengan proses transformasi identitas sosial dan budaya. Perpindahan penduduk tidak sekadar perpindahan geografis, tetapi juga merupakan proses negosiasi kompleks antara memori kolektif, identitas asal, dan adaptasi di wilayah baru. Penelitian dari antropolog seperti James Clifford mengungkapkan bahwa diaspora tidak hanya sekadar tentang perpindahan fisik, tetapi juga mencakup konstruksi memori, narasi kolektif, dan praktik budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa diaspora adalah proses dinamis yang selalu berubah dan beradaptasi dengan konteks sosial yang baru.

Pernyataan Santoso pada Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok menyampaikan tentang bagaimana para masyarakat diaspora sering mengupayakan status kewarganegaraan ganda sebagai cara untuk memperkuat posisi mereka dalam konteks kehidupan transnasional, di mana mereka memiliki keterikatan dengan lebih dari satu negara. Selain itu, keberadaan diaspora juga penting dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara negara asal mereka dan negara tempat mereka menetap (Romdiati, 2015). Penting untuk dicatat bahwa proses diaspora dan migrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Adanya proses perpindahan ini justru dalam beberapa wilayah menimbulkan berbagai konflik seperti pendatang Yunani dengan penduduk lokal di wilayah-wilayah koloni, serta bagaimana mereka akhirnya mencapai berbagai bentuk akomodasi dan integrasi sosial.

Dalam konteks Indonesia, fenomena diaspora dapat dilihat dari berbagai kelompok etnis seperti diaspora Tionghoa, Arab, dan Eropa

yang telah lama bermukim dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan identitas nasional. Sejak awal peradaban, wilayah Nusantara telah menjadi titik pertemuan berbagai kelompok etnis. Perpindahan penduduk Austronesia sekitar 4000 tahun yang lalu menjadi gelombang migrasi pertama yang signifikan. Mereka membawa teknologi pertanian dan bahasa yang kemudian menjadi dasar bahasa-bahasa di Nusantara (Bellwood, 2007).

Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahannya memperkenalkan beberapa kebijakan migrasi yang signifikan. Migrasi inilah yang mendasari terciptanya masyarakat multi-kultural di berbagai wilayah (Tirtosudarmo, 2022). Dimulai pada tahun 1905, diadakan program pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, membuka lahan pertanian baru, dan menyediakan tenaga kerja di perkebunan kolonial. Sistem *kultuurstelsel* dan ekonomi perkebunan mendorong perpindahan pekerja antarpulau. Ada juga pembukaan tambang dan perkebunan di Sumatera mengakibatkan migrasi besar-besaran pekerja dari Jawa (Houben & Lindblad, 2002). R. Tirtosudarmo (2009) menyatakan lebih dari 8 juta orang telah dipindahkan melalui program ini hingga tahun 2000. Selain itu, sebagaimana dalam data Kementerian Luar Negeri (2019), diperkirakan ada sekitar 8 juta orang Indonesia dan keturunannya yang menetap di luar negeri. Dimulai sejak 1970-an, Indonesia menjadi pengirim tenaga kerja migran yang signifikan ke Malaysia, Singapura dan Arab Saudi serta negara Timur Tengah lainnya (Tirtosudarmo, 2009).

Kajian mutakhir tentang diaspora dan migrasi semakin menekankan pentingnya memahami dinamika global yang tidak sekadar memperhatikan perpindahan fisik, tetapi juga transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan. Koneksi digital dan globalisasi semakin mempererat hubungan antara komunitas diaspora dengan tanah airnya, menciptakan apa yang disebut sebagai "*transnasionalisme*". Dengan demikian, konsep diaspora dan migrasi tidak sekadar

menggambarkan perpindahan geografis, melainkan representasi dinamika kompleks tentang identitas, memori, adaptasi, dan transformasi sosial yang berkelanjutan sepanjang sejarah manusia.

2.1.3 Identitas Etnis

Identitas etnis merupakan konsep fundamental dalam memahami bagaimana individu dan kelompok membangun, memelihara, serta mengekspresikan keberadaan mereka dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks. Menurut pemikiran para ahli antropologi dan sosiologi seperti Anthony D. Smith dan Erik Erikson, identitas etnis bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan.

Identitas merupakan karakteristik pembeda yang melekat pada individu atau objek. Istilah ini berasal dari kata "*identity*" dalam bahasa Inggris yang merujuk pada ciri khas atau jati diri. Identitas mencakup keseluruhan aspek yang membentuk keunikan seseorang, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Aspek-aspek ini terwujud dalam perilaku, kebiasaan, sikap, dan karakter yang membuat seseorang berbeda dari orang lain (Utami, 2014). Menurut KBBI, Identitas merupakan jati diri yakni karakteristik fundamental yang melekat pada seseorang, mencakup sifat, watak, dan ciri khas yang membentuk kepribadian individu tersebut (Basri et al., 2022). Dalam konteks nasionalisme dimaknai bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri khas atau karakter unik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain (Krisnadi, 2018).

Etnis merupakan identifikasi sosial yang dibentuk masyarakat untuk mengelompokkan orang-orang berdasarkan karakteristik sosial yang khas dan membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ashmore juga menegaskan bahwa pengelompokan etnis ini murni didasarkan pada aspek sosial, bukan aspek ekonomi atau teknologi (Ashmore et al., 2023). Etnis merupakan kelompok masyarakat dengan budaya yang unik dan berbeda dari kelompok lain. Para anggotanya menyadari identitas kolektif mereka yang tercermin dalam perilaku,

agama, bahasa, cara berpakaian, dan adat istiadat bersama. Identitas ini juga ditunjukkan melalui wilayah tempat tinggal yang sama. Keunikan tersebut berakar pada kesamaan leluhur dan sejarah, yang kemudian menghasilkan ciri fisik tertentu serta pengalaman dan pengetahuan kolektif tentang masa lalu bersama (Sibarani, 2013).

Kelompok etnis dapat dipahami sebagai komunitas yang memiliki kesamaan identitas berdasarkan ras, budaya, bahasa, serta sistem nilai dan norma. Hal ini menciptakan dinamika mayoritas-minoritas dalam masyarakat (Susilowati, 2017). Menurut Fredrick Barth, etnis merupakan kumpulan individu yang dipersatukan oleh kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut, yang terikat dalam satu sistem nilai budaya (Barth & Soesilo, 1988). Ensiklopedi Indonesia mendefinisikan etnis sebagai kelompok dalam sistem sosial yang memiliki posisi tertentu berdasarkan garis keturunan, tradisi, kepercayaan, dan bahasa yang mereka anut.

Lebih lanjut, etnis adalah kelompok sosial yang memiliki identitas budaya dan bahasa yang khas. Menurut Koentjaraningrat (2007), kelompok etnis terbentuk dari kesadaran bersama akan identitas dan kesamaan bahasa. Identifikasi etnis melibatkan kesadaran kelompok, budaya bersama, dan asal-usul yang sama. Wilbinson memperluas definisi ini dengan memasukkan aspek fisik, kepercayaan, status minoritas, kelas sosial, afiliasi politik, dan pendidikan. Koentjaraningrat menekankan bahwa kesamaan asal-usul berperan penting dalam menciptakan ikatan etnis (koentjaraningrat, 2007). Etnis adalah kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan kesamaan asal-usul, yang menentukan status keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Konsep ini merujuk pada pengelompokan sosial yang memiliki perbedaan berdasarkan aspek budaya (Said, 2019).

Istilah etnik dan etnisitas awalnya digunakan dalam antropologi untuk merujuk pada individu yang dianggap memiliki afiliasi dengan kelompok budaya yang sama, berbagi adat istiadat, bahasa, dan tradisi. Identitas etnis sering dipahami sebagai karakteristik unik yang dimiliki

oleh suatu kelompok tertentu dan dianggap sebagai inti dari keberadaan mereka. Penelitian mengenai identitas etnis sangat menarik dan penting untuk dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan pelestarian budaya serta bahasa yang diwariskan (Fathurroja et al., 2018). Seiring waktu, konsep ini berkembang melalui gabungan antara etnik dan identitas serta makna yang dikaitkan dengan keduanya, meskipun sering kali tanpa kejelasan mengenai siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah atau definisi yang sering dikutip. Selain itu, istilah ras dan etnisitas sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan karakteristik fisik dan budaya individu sebagai anggota kelompok etnik atau ras tertentu, serta faktor-faktor yang memengaruhi pentingnya karakteristik tersebut.

Definisi identitas etnik merujuk pada cara seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok etnik tertentu, disertai rasa memiliki terhadap kelompok tersebut. Identitas ini mencakup aspek pikiran, persepsi, perasaan, dan perilaku yang muncul sebagai konsekuensi keanggotaannya dalam kelompok etnik tersebut. Meskipun identitas etnik berbeda dari identitas pribadi sebagai individu, keduanya saling memengaruhi. Menurut (Sjamsuddin, 2017), ada empat komponen utama dalam identitas etnik, yaitu:

1. Kesadaran etnik (*ethnic awareness*): Pemahaman seseorang tentang keberadaan etniknya sendiri yang berbeda dari kelompok lain.
2. Identifikasi diri etnik (*ethnic self-identification*): Label atau sebutan yang diberikan seseorang pada kelompok etniknya.
3. Sikap etnik (*ethnic attitudes*): Perasaan terhadap dirinya sendiri dan kelompok lain.
4. Perilaku etnik (*ethnic behaviors*): Pola perilaku khas yang dimiliki oleh suatu kelompok etnik tertentu.

Dimensi psikologis dalam teori identitas etnis juga menjadi perhatian penting para ahli. Menurut Jean Phinney, proses pembentukan identitas etnis melibatkan tahapan eksplorasi dan komitmen di mana individu secara aktif mencari pemahaman mendalam tentang warisan

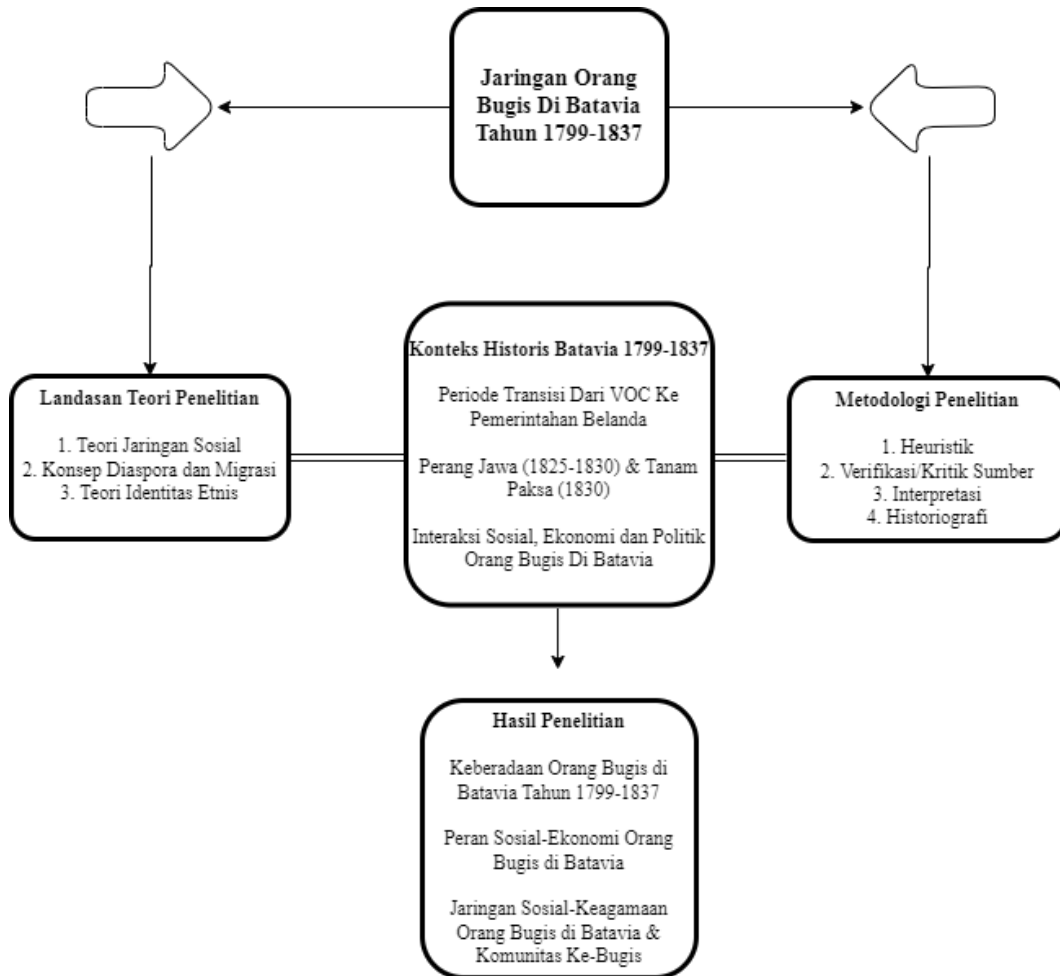
budaya mereka. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan sejarah, melainkan juga pengalaman emosional dan *sense of belonging* terhadap komunitas etnis tertentu. Konsep identitas etnis dikembangkan Phinney (1990) berdasarkan teori identitas sosial dari Tajfel dan Turner (1986). Phinney menjelaskan identitas etnis sebagai sebuah konstruk multidimensi yang merujuk pada identitas seseorang, atau perasaan diri sebagai anggota dari kelompok etnis tertentu (Phinney, 1990). Disamping teori identitas sosial, konsep identitas etnis dikembangkan menggunakan teori identitas dari Erikson (1968). Identitas etnis merujuk pada kualitas dari afiliasi seseorang dengan kelompok etnis (Phinney & Ong, 2007). Identitas etnis dikonseptualisasikan sebagai konstruk multidimensi, perkembangan yang melibatkan proses eksplorasi dari identitas diri seseorang dan komitmen atau perasaan memiliki identitas tersebut (Brown et al., 2014). Dengan demikian identitas etnis adalah pengetahuan tentang kelompok etnis sendiri dan merasa diri sebagai anggota suatu kelompok.

Dalam perspektif teoritis, identitas etnis dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui sejarah, memori kolektif, dan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Manuel Castells dalam karyanya *"The Power of Identity"* menjelaskan bahwa identitas etnis tidak hanya sekadar warisan genetis, tetapi merupakan hasil dari proses negosiasi dan interpretasi yang rumit antara individu, komunitas, dan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Proses pembentukan identitas etnis melibatkan beberapa mekanisme penting. Pertama, proses kategorisasi sosial di mana individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain berdasarkan karakteristik budaya tertentu. Kedua, konstruksi batas simbolik yang membedakan antara kelompok "kita" dan "mereka" melalui praktik kebudayaan, bahasa, agama, dan norma sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fredrik Barth dalam karyanya *"Ethnic Groups and Boundaries"* yang menekankan pentingnya batas-batas simbolik dalam mempertahankan identitas etnis.

Dalam konteks dinamika sosial kontemporer, teori identitas etnis semakin kompleks dengan adanya fenomena globalisasi dan migrasi. Para peneliti seperti Stuart Hall mengargumentasikan bahwa identitas etnis tidak lagi bersifat tunggal dan homogen, melainkan bersifat hibrid, cair, dan dapat berubah sesuai konteks. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, mengadaptasi, dan mentransformasikan identitas etnis mereka dalam berbagai situasi sosial. Dalam konteks Indonesia yang multietnis, teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana berbagai kelompok etnis berinteraksi, mempertahankan keunikan budaya mereka, sambil tetap membangun kohesi sosial dalam keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa identitas etnis bukanlah sekadar warisan statis, melainkan proses kreatif yang terus berkembang dan dimaknai ulang oleh para pelakunya.

2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Artikel Jurnal berjudul Sejarah Migrasi Dan Sistem Penghidupan Migran Etnis Bugis Di Perantauan (Studi Kasus Migrasi Etnis Bugis Di Kelurahan Kampung Laut Dan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi), yang ditulis oleh Lesti Heriyanti, Ekawati Sri Wahyuni, Saharuddin, Aida Vitayala S Hubeis, 2020. Artikel ini memiliki fokus kajian yang jelas pada migrasi etnis Bugis. Hal ini memberikan kedalaman analisis yang signifikan dalam memahami pola migrasi dan adaptasi etnis Bugis di wilayah perantauan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam

tentang sistem penghidupan dan dinamika sosial migran Bugis. Metode ini cocok untuk mengeksplorasi pengalaman dan strategi adaptasi migran. Artikel ini juga mencakup aspek historis dan kontemporer migrasi, yang dapat memberikan konteks yang komprehensif untuk memahami perpindahan dan pemukiman etnis Bugis di wilayah baru. Namun, artikel ini tidak secara eksplisit membahas periode historis migrasi yang sama dengan fokus skripsi Anda (Abad 18), sehingga kontribusinya untuk tinjauan pustaka mungkin terbatas pada aspek metodologis dan konseptual.

2. Tesis berjudul *Diaspora Suku Bugis Di Wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo Bagian Selatan Dan Timur Tahun 1842-1942* yang ditulis oleh Mansyur merupakan kajian penting yang membahas fenomena migrasi dan interaksi budaya di kawasan Borneo. Dengan mengangkat diaspora Suku Bugis di Tanah Bumbu, hal ini jarang dibahas secara mendalam dalam literatur sejarah Indonesia. Rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 1842 hingga 1942, memberikan peluang untuk analisis yang mendalam terkait perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi selama periode kolonial. Penggunaan data primer seperti arsip kolonial dan dokumen sejarah, serta data sekunder dari literatur terkait, memperkuat validitas argumen yang disajikan. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis multidimensional, yang mencakup tidak hanya aspek migrasi tetapi juga interaksi antara komunitas Bugis dengan masyarakat lokal dan kolonial. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai diaspora. Tesis ini juga berhasil menunjukkan kontribusi Suku Bugis dalam pengembangan ekonomi dan budaya lokal di Tanah Bumbu, menyoroti dampak positif migrasi terhadap pembentukan identitas lokal. Namun, keterbatasan dalam menjelaskan perspektif masyarakat lokal dalam menerima dan berinteraksi dengan komunitas Bugis juga kurang tergali, mengurangi keseimbangan dalam narasi penelitian. Selain itu, visualisasi data seperti peta migrasi, diagram, atau tabel statistik tidak disertakan, yang sebenarnya dapat membantu pembaca memahami pola diaspora secara lebih jelas. Rentang waktu penelitian yang

cukup panjang juga tidak dibahas secara merata, sehingga beberapa periode penting kurang mendapat perhatian yang mendalam.

3. Tesis berjudul Petani Bugis ‘Passompe’: Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Bugis Di Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, 1960-2018 yang ditulis oleh Yulia Resha Pertiwi, 2021. Fokus penelitian yang berada di daerah Jambi ini akan memberikan pandangan yang spesifik terkait dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat Bugis di wilayah tersebut. Dengan rentang waktu penelitian yang komprehensif memungkinkan hasil maksimal dalam menyajikan analisis tentang perjalanan dan transformasi sosial-ekonomi komunitas Bugis di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pandangan dan pemahaman terkait pola migrasi dan adaptasi etnis Bugis khususnya di Jambi. Namun, jauhnya pemilihan rentang waktu antara tesis dan penelitian yang akan dikaji menjadikan perlu adanya kajian mendalam untuk memandang kesamaan antara periode-periode penelitian di abad tersebut.
4. Skripsi berjudul Sejarah Keberadaan Etnis Bugis Perantauan Di Teluk Betung Timur yang ditulis oleh Adilah Shobariyah, 2021. Skripsi ini mengkaji terkait migrasi dan pemukiman etnis Bugis di wilayah Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pola penyebaran etnis Bugis ke wilayah pesisir lain di Indonesia. Skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami pola migrasi dan pembentukan jaringan etnis Bugis di beberapa wilayah serta memberikan konteks tambahan tentang mobilitas dan strategi pemukiman etnis Bugis di luar daerah asal mereka. Namun, dalam konteks wilayah penelitian skripsi ini belum bisa menjadi acuan karena kawasan penelitian yang berbeda tempat. Sehingga skripsi tetap akan menjadi kaca mata lain dalam memandang perkembangan Bugis di Batavia.
5. Skripsi berjudul Sejarah Diaspora Orang Bugis Ke Kamal Muara Jakarta Utara Pada Tahun 1960-1980, 2023. Skripsi ini mengkaji terkait diaspora orang Bugis di Kamal Muara Jakarta Utara. Penelitian ini menjadi referensi dalam melihat pola migrasi Orang Bugis yang spesifik di wilayah

Jakarta Utara. Namun, dengan pemilihan rentan waktu penelitian tahun 1960-1980 menjadikan skripsi ini belum menjawab terkait eksistensi orang Bugis di Abad ke-18 atau ke-19. Walaupun demikian, skripsi ini tetap menjadi rujukan penting dalam penelusuran terkait orang Bugis di Jakarta.

BAB III

TINJAUAN SEJARAH KEBERADAAN ORANG BUGIS DI BATAVIA ABAD KE-17 HINGGA ABAD KE-19

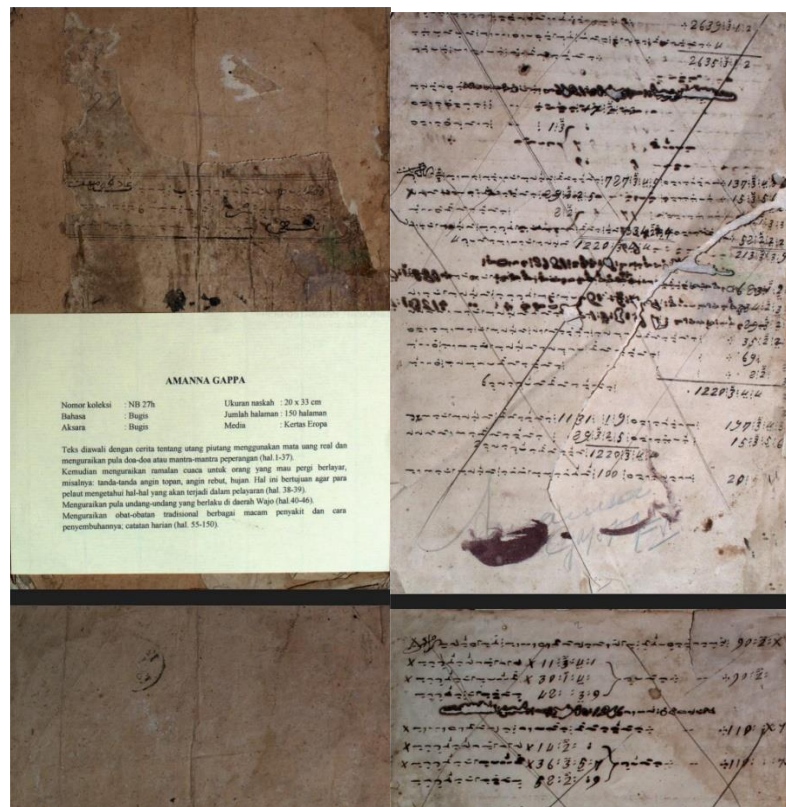
Diaspora orang Bugis ke berbagai wilayah Nusantara, khususnya Batavia, merupakan fenomena sejarah yang memiliki implikasi luas terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Keberadaan mereka tidak hanya merepresentasikan perpindahan demografis semata, tetapi juga mentransformasi lanskap sosio-politik di wilayah tujuannya. Migrasi orang Bugis-Makassar melampaui konsep perpindahan fisik dan memasuki dimensi transfer nilai, pandangan hidup, dan struktur sosial yang kemudian berinteraksi dengan sistem lokal membentuk sintesis baru dalam masyarakat Nusantara (Hamid, 1985).

Menurut catatan Andaya (1995), migrasi gelombang orang Bugis terjadi menyusul Perang Makassar (1666-1669). Pada masa ini, sebagian bangsawan Bugis yang menolak kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan memutuskan untuk meninggalkan daerah asal mereka. Para bangsawan beserta pengikut-pengikut setianya kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara, termasuk ke Batavia. Kelompok migran awal ini didominasi oleh kalangan aristokrat Bugis yang memilih eksodus daripada tunduk pada otoritas VOC setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya (Andaya, 1995). Mereka bukanlah kelompok yang "melarikan diri" melainkan melakukan hijrah strategis untuk mempertahankan marwah dan mencari ruang negosiasi baru.

Dalam konteks suku Bugis, konsep migrasi lebih erat kaitannya dengan istilah *mallakke' dapureng* (memindahkan dapur) dibandingkan dengan *sompe'* (rantau). Perbedaan ini terletak pada makna permanensinya - migrasi dipandang sebagai perpindahan permanen yang didorong oleh prinsip fundamental *Siri'* (harga diri/rasa malu) yang merupakan pandangan hidup orang Bugis. Sebaliknya, merantau tidak selalu berkaitan dengan faktor malu, tetapi lebih kepada keinginan memperbaiki kehidupan di tempat lain dengan harapan dapat kembali ke kampung halaman (Kesuma, 2004).

Aktivitas maritim yang berkelanjutan di wilayah pesisir Sulawesi Selatan telah melahirkan identitas baru berupa budaya migrasi yang dikenal sebagai *Sompe'* (merantau) dalam masyarakat Bugis (Wekke, 2013). Tradisi *sompe'* ini

merupakan kegiatan meninggalkan kampung halaman untuk tujuan-tujuan tertentu. Pada awalnya, budaya ini berkembang di kalangan nelayan karena kegiatan melaut mereka memerlukan waktu berhari-hari sebelum kembali ke darat. Sebagai komunitas yang sangat mengandalkan laut untuk penghidupan, mereka memerlukan seperangkat aturan yang tegas untuk mengatur seluruh kegiatan pelayaran. Hal ini melahirkan seorang ahli hukum maritim yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh pelaut Bugis, tetapi juga memberikan inspirasi dan diadopsi oleh pelaut dari berbagai penjuru dunia (Salim, 2024).



Gambar 3.1 Manuskrip (*Amanna Gappa*, Abad 17)

(Sumber: PERPUSNAS RI)

Lahirnya hukum pelayaran Bugis merupakan jawaban atas kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari komunitas maritim. Berdasarkan catatan sejarah, Amanna Gappa - seorang migran dari Wajo - menjadi pencetus hukum pelayaran dan perdagangan pada abad ke-17. Hukum yang dikembangkan Amanna Gappa yang berangkat dari naskah kuno *Ade' Alloping-loping Bicaranna Pabbalue* terkenal karena prinsip keadilan dan transparansinya dalam menyusun pasal-pasal sistem hukum perdagangan di zamannya (Karwur, 2015). Nilai-nilai transparansi dan keadilan yang kini mulai terkikis dalam sistem perdagangan modern, dulunya

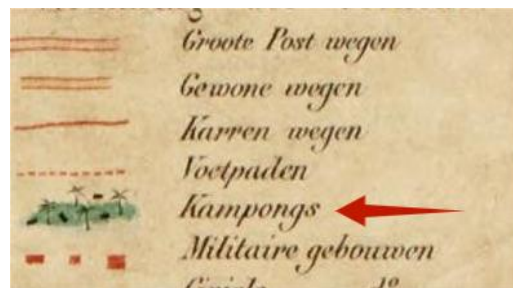
Dalam sebuah peta Batavia tahun 1628 terdapat nama “*Boegis*” yang menunjukkan bahwa sudah terdapat pemukiman orang Bugis yang cukup signifikan di sebelah selatan Batavia. Keberadaan kampung ini menunjukkan bahwa orang Bugis telah memiliki jejak dalam lanskap sosial Batavia lebih awal dari yang umum dicatat dalam historiografi kolonial. Dengan adanya pengabdian Bugis dalam peta resmi Batavia menunjukkan bahwa komunitas Bugis di Batavia bukanlah sekadar pendatang sementara, melainkan telah membentuk identitas kolektif dan mendapatkan pengakuan dalam struktur sosial kota. Kemampuan orang Bugis untuk menegosiasikan ruang dan identitas mereka di tengah kompleksitas politik Batavia mencerminkan kecakapan diplomasi yang telah menjadi ciri khas budaya maritim Nusantara.



Kehadiran Kampung Bugis ini juga merefleksikan sifat kosmopolitan kota-kota pelabuhan Nusantara yang telah terbiasa dengan pergerakan manusia dan pertukaran budaya. Berbeda dengan catatan kolonial yang kerap melihat migrasi Bugis sebagai respons terhadap intervensi Eropa, perspektif Nusantara memahami

bahwa mobilitas ini merupakan kelanjutan dari pola pergerakan yang telah berlangsung berabad-abad dalam jaringan perdagangan maritim regional. Penamaan “*Boegis*” sendiri pertanda akan pengakuan terhadap identitas distinktif komunitas ini, yang mampu mempertahankan kohesi sosial dan budaya mereka di tengah lingkungan multi-etnis Batavia. Ini mencerminkan karakteristik masyarakat Nusantara yang mampu membangun ruang-ruang kultural dalam konteks urban tanpa kehilangan identitas asal mereka.

Di beberapa sumber sejarah, ada banyak penyebutan untuk menandai suatu kampung khususnya di peta Batavia, seperti *kampongs*, *kampong/dessa*, dan *kampoeng*. Semua penyebutan itu menunjukkan suatu tempat atau wilayah bagi suatu perkampungan.



Gambar 3.3 Simbol Kampung Pada Peta Kolonial
(Sumber: KITLV)

Penggambaran kampung di Batavia pada masa kolonial merupakan salah satu kebijakan oleh pemerintah Belanda untuk mengatur tata letak wilayah Batavia. Hal ini juga untuk mempermudah pemerintah untuk menandai setiap kawasan agar lebih mudah dikendalikan secara berkelompok. Dengan adanya polarisasi wilayah dengan menyatukan setiap etnis menjadi strategi yang penting dalam tata ruang dan kota di Batavia.

Studi yang dilakukan oleh Knaap mengungkapkan bahwa populasi orang Bugis di Batavia pada pertengahan abad ke-18 diperkirakan mencapai 5-7% dari total penduduk kota, yang menunjukkan signifikansi keberadaan mereka dalam komposisi demografis Batavia. Yang menarik, keberadaan mereka tidak hanya sebagai penduduk biasa, tetapi juga sebagai kelompok yang memiliki fungsi strategis bagi pemerintah kolonial (Knaap, 1996). Pemerintah kolonial memandang orang Bugis memiliki reputasi sebagai pelaut dan pedagang yang handal. Mereka juga dikenal sebagai prajurit yang tangguh, sehingga sering

direkrut oleh VOC untuk dipekerjakan sebagai pemandu kapal dan prajurit karena keberanian dan keahlian mereka dalam berlayar dan berperang (Reid, 2019).

Sebagian besar permukiman awal orang Bugis di Batavia terletak di luar tembok kota, yaitu di kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Melayu, Kampung Bugis, dan sekitarnya. Identitas mereka tetap terjaga melalui bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang mereka bawa dari tanah asal. Keberadaan mereka di Batavia terdokumentasi dalam arsip VOC dan laporan-laporan etnografi Belanda abad ke-18 (Bruinessen, 1995). Jejak keberadaan orang Bugis di Batavia pada periode 1799-1837 juga terlihat dalam kontribusi mereka terhadap perkembangan kota. Blusse (2010) mengakui bahwa keterampilan maritim orang Bugis berkontribusi pada perkembangan Batavia sebagai pelabuhan penting. Teknologi perkapalan dan pengetahuan navigasi mereka memperkaya tradisi maritim di wilayah ini (Blussé, 2010).

3.1. Tokoh Bugis Dalam Sejarah Batavia

Jejak keberadaan orang Bugis di Batavia tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh sentral yang menjadi katalisator dan simbolisasi dari eksistensi komunitas ini. Dua tokoh yang memiliki pengaruh signifikan adalah Syekh Yusuf Al-Makassari dan Arung Palakka, yang meskipun memiliki latar belakang perjuangan dan orientasi berbeda, keduanya telah memberikan kontribusi substansial dalam membentuk narasi keberadaan orang Bugis di Batavia. Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh lain yang turut memperkuat jejaring sosial, politik, dan ekonomi orang Bugis di kawasan ini.

3.1.1. Syekh Yusuf Al-Makassari: Diaspora Intelektual dan Spiritual

Syekh Yusuf Al-Makassari (1626-1699), atau yang dikenal dengan nama *Tuanta Salamaka* (Tuan kita yang selamat dan diberkati) merupakan seorang sosok ulama yang disegani abad ke-17. Nama aslinya adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Al-Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassari, merupakan figur penting dalam sejarah Islam Nusantara dan diaspora Bugis-Makassar (Kurniawan et al., 2023). Dilahirkan di Kerajaan Gowa dari keluarga bangsawan, perjalanan hidupnya mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan spiritual di Nusantara pada abad ke-17.

Syekh al-Makassari diangkat sebagai salah satu pejabat tertinggi di istana dan menjadi anggota berpengaruh dalam Dewan Penasehat Sultan. Berdasarkan sumber-sumber Belanda terpercaya yang dikutip oleh (Azra, 1999) beliau dikenal sebagai "*opperpriester*" atau "*hoogenpriester*" (pendeta tertinggi) yang memiliki peran krusial dalam urusan politik dan keagamaan. Selain itu, Syekh al-Makassari juga mendapat jabatan sebagai Raja Muda (*viceroi*) Banten. Dalam kapasitasnya tersebut, ia ditugaskan melakukan kunjungan ke beberapa negara Islam di Timur Tengah, terutama Suriah dan Kesultanan Utsmaniyyah, untuk memperkuat hubungan diplomatik. Tercatat bahwa Syekh al-Makassari mengunjungi Kesultanan Utsmaniyyah di Istanbul pada tahun 1675 (Rosyadi, 2022).

Perjalanan Syekh Yusuf ke Batavia tidak terlepas dari keterlibatannya dalam perlawanan terhadap kolonialisme VOC di Sulawesi Selatan. Azyumardi Azra menjelaskan bahwa keberadaan Syekh Yusuf di Batavia merupakan hasil dari pengasingan politik setelah tertangkap dalam perlawanan bersama Sultan Ageng Tirtayasa di Banten melawan VOC pada tahun 1683. Pengasingan ini merepresentasikan persimpangan antara pergerakan anti-kolonial dan transmisi pengetahuan Islam di Nusantara (Azra, 2004). Peranan krusial yang dilakukan Syekh Yusuf dalam perlawanan masyarakat Banten melawan ekspansi kekuasaan Belanda di Kesultanan Banten. Syekh al-Makassari beserta pasukannya tetap gigih berjuang melalui taktik perang gerilya di berbagai wilayah Jawa Barat. Namun, berkat strategi licik Van Happel, komandan pasukan Belanda, Syekh al-Makassari dan pengikutnya akhirnya ikut bersama Van Happel ke Cirebon, kemudian secara resmi ditetapkan sebagai tawanan perang dan dibawa ke Batavia pada tanggal 14 Desember 1683 M (Rahmatullah, 2021).

Bahkan dulu, setelah Perjanjian Bongaya mengakhiri Perang Makassar 1667, terjadi perpecahan di kalangan bangsawan Kerajaan Gowa yang menyebabkan golongan bangsawan *anak karaeng ri Gowa* merasakan posisi mereka melemah. Kelemahan ini terutama disebabkan

hilangnya dominasi kekuasaan di Sulawesi Selatan dan kehilangan wilayah-wilayah yang menjadi sumber ekonomi kerajaan. Dalam upaya mengatasi perpecahan dan memulihkan stabilitas, muncul gagasan untuk mendatangkan kembali seorang ulama besar dan terkenal asal Makassar yang diasingkan Belanda ke Sion karena mendukung Sultan Agung (Sultan Banten) melawan Sultan Haji yang dibantu VOC-Belanda (Kila, 2016).

Gagasan ini cukup unik mengingat ulama tersebut tidak aktif di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai penentang gigih VOC, namun pihak Kerajaan Gowa tetap mengajukan permohonan untuk kepulangannya ke Makassar. Ketika permohonan ini diterima oleh pejabat VOC di Batavia, mereka menolaknya karena mencurigai adanya motif politik di balik permintaan tersebut. VOC menduga rencana ini bertujuan untuk menjadikan tokoh tersebut sebagai pemersatu kekuatan untuk melawan dan menggulingkan kekuasaan VOC di Makassar (Andaya: 2004).

Setelah penangkapan Syekh Yusuf oleh pihak Belanda, perjuangan dilanjutkan oleh pasukan kidul dan Purbaya. Penangkapan Syekh Yusuf merupakan pukulan berat bagi perjuangan rakyat Indonesia. Syekh Yusuf ke Batavia pada tahun 1683 membawa implikasi penting bagi perkembangan komunitas Bugis-Makassar di wilayah tersebut. Meskipun statusnya sebagai tahanan politik, pengaruhnya tetap signifikan dalam membentuk identitas dan solidaritas di sekitar Batavia, Banten dan Cirebon. Sehingga untuk menghilangkan pengaruhnya, beliau kemudian, bersama 49 pengikut setianya, dideportasi ke Tanjung Harapan menggunakan kapal *De Voetboog*. Pada akhirnya, Syekh Yusuf menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada usia 73 tahun pada tanggal 23 Mei 1699 M di Afrika Selatan. Pengaruh Syekh Yusuf terhadap komunitas Bugis-Makassar di Batavia berlanjut bahkan setelah ia dipindahkan ke pengasingan di Tanjung Harapan (Cape Town), Afrika Selatan pada tahun 1694 (Rahmatiah, 2019).

3.1.2. Arung Palakka: Diplomasi Politik dan Jejaring Kekuasaan

Berbeda dengan Syekh Yusuf yang representasi dari perlawanan terhadap kolonialisme, Arung Palakka (1634-1696) menggambarkan dimensi lain dari interaksi orang Bugis dengan kekuatan kolonial. Ketika Arung Palakka dianggap sebagai musuh oleh Kerajaan Gowa, maka pada tahun 1663 ia berhijrah ke Batavia bersama dengan beberapa pengikutnya seperti Arung Bila, Datu Pattojo dan Arung Angpanang untuk meminta suaka politik pada kompeni (Amin, 2017). Sebagai bangsawan Bugis dari Kerajaan Bone, aliansi Arung Palakka dengan VOC dalam Perang Makassar (1666-1669) membawa implikasi signifikan terhadap pola migrasi orang Bugis ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk Batavia. Adanya kemenangan yang dicapai oleh aliansi Arung Palakka-VOC dalam Perang Makassar menghasilkan restrukturisasi politik di Sulawesi Selatan yang mendorong eksodus besar-besaran kelompok yang teralienasi secara politik, termasuk ke Batavia. Fenomena ini merepresentasikan bagaimana konflik internal dapat mendorong mobilitas geografis yang kemudian membentuk konfigurasi etnis baru di berbagai wilayah Nusantara (Andaya, 2015).

Kesepakatan Bongaya (1667) yang merupakan manifestasi dari kemenangan aliansi tersebut, secara fundamental mengubah lanskap politik di Sulawesi Selatan dan menciptakan kondisi yang mendorong migrasi orang Bugis ke berbagai wilayah. Norddholt (2018:134) mengungkapkan bahwa Pasca-Bongaya, polarisasi politik di Sulawesi Selatan semakin mengkristal antara kelompok yang berafiliasi dengan Arung Palakka dan VOC, dengan kelompok oposisi. Bagi kelompok oposisi, migrasi menjadi strategi untuk mempertahankan eksistensi politik dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk perjuangan jangka panjang. Pasca Perjanjian Bongaya tahun 1667, orang Bugis bermigrasi ke berbagai wilayah Nusantara. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan geopolitik signifikan di Sulawesi Selatan. Perjanjian Bongaya sebagai penanda jatuhnya kerajaan Gowa-Tallo merupakan kulminasi dari rangkaian konfrontasi antara VOC yang beraliansi

dengan kerajaan Bone melawan kerajaan Gowa-Tallo yang secara fundamental mengubah lanskap politik di kawasan tersebut (Andaya, 2004). Transformasi struktural ini mengkatalisasi perpindahan signifikan kelompok bangsawan, cendekiawan, dan pengikut bagi pihak yang kalah dari tanah Sulawesi ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Jawa.

Sebagaimana Cummings (2010: 87), Migrasi orang Bugis-Makassar pasca Perjanjian Bongaya bukan semata-mata eksodus demografis, melainkan merupakan transformasi geopolitik yang mendistribusikan pusat-pusat kekuasaan dan pengaruh baru di berbagai kawasan Nusantara. Hal ini menekankan bahwa keberadaan orang Bugis di Batavia tidak sekadar representasi komunitas minoritas etnis, tetapi manifestasi dari jaringan pengaruh politik, ekonomi, dan kultural yang kompleks. Analisis terhadap pola migrasi ini perlu mempertimbangkan interkoneksi antara faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*). Chambert-Loir (2011) dalam studinya tentang diaspora Bugis menekankan bahwa instabilitas politik di Sulawesi Selatan pasca-Bongaya berkorelasi dengan peluang ekonomi dan politik yang terbuka di kawasan kolonial Batavia. Sistem politik VOC yang mengimplementasikan strategi "*divide et impera*" memberikan ruang bagi kelompok-kelompok etnis tertentu, termasuk Bugis.

Hubungan privilege antara Arung Palakka dengan VOC memfasilitasi kehadiran orang Bugis di Batavia, meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Jika pada masa pra-Bongaya, kehadiran orang Bugis di Batavia lebih banyak sebagai tawanan atau budak, pasca-Bongaya terjadi diversifikasi peran yang mencakup pedagang, tentara bayaran, dan bahkan pejabat dalam struktur administratif kolonial. Sutherland (2014:218) menjelaskan bahwa relasi Arung Palakka dengan VOC membuka ruang negosiasi bagi posisi orang Bugis di Batavia. Mereka tidak lagi semata dipandang sebagai '*the other*' tetapi mulai

diakomodasi dalam sistem kolonial dengan berbagai peran strategis, terutama dalam konteks perdagangan maritim dan keamanan.

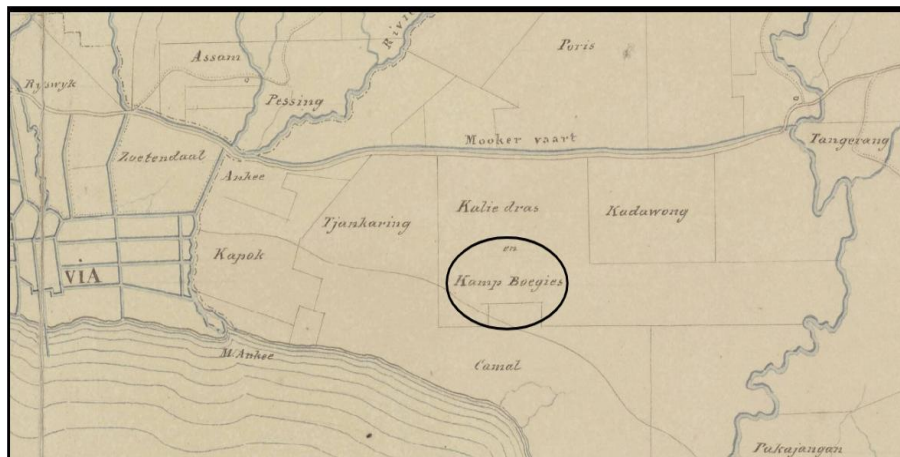
Meskipun Arung Palakka sendiri tidak menetap di Batavia, pengaruhnya terhadap komunitas Bugis di wilayah tersebut signifikan melalui jaringan patron-klien yang dibangunnya. Beberapa kampung yang pernah ditempati oleh orang Bugis seperti Kampung Bugis di wilayah Angke, sebelah utara Jl. Pangeran Jayakarta, sebelah utara Jembatan Lima, kampung Petojo, kampung baru dan beberapa kampung lainnya menjadi titik-titik pemukiman orang Sulawesi (Heuken, 2016). Reid (2020:165) mengungkapkan, Arung Palakka membangun jaringan politik yang ekstensif yang mencakup tidak hanya Sulawesi Selatan tetapi juga komunitas Bugis di berbagai wilayah Nusantara. Di Batavia, beberapa pedagang dan pejabat Bugis beroperasi sebagai perpanjangan tangan kepentingan politiknya, menciptakan koneksi langsung dengan pusat kekuasaan kolonial. Pertumbuhan aktivitas ekonomi orang Bugis di Batavia tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik regional.

Kekuasaan Arung Palakka di Sulawesi Selatan memberikan jaminan kelancaran arus komoditas ke Batavia, sebuah simbiosis yang menguntungkan baik kepentingan ekonomi VOC maupun jaringan dagang Bugis (Kathirithamby-Wells, 2019:199). Namun, hubungan ini juga menciptakan ambivalensi dalam identitas politik komunitas Bugis di Batavia. Di satu sisi, mereka memperoleh manfaat dari hubungan privilege dengan kekuasaan kolonial, tetapi di sisi lain, mereka juga menjadi target kecurigaan dari kelompok anti-kolonial, termasuk dari kalangan orang Bugis sendiri yang berafiliasi dengan kelompok oposisi Arung Palakka. Carey (2007) mencatat bahwa selama Perang Jawa (1825-1830), beberapa orang Bugis di Batavia mengambil posisi strategis sebagai informan dan penerjemah bagi pemerintah kolonial. Namun, tidak semua orang Bugis bersikap kooperatif dengan rezim kolonial. Ada beberapa kasus perlawanan dan perselisihan antara komunitas Bugis dengan otoritas kolonial, terutama terkait dengan

monopoli perdagangan dan peraturan pelayaran. Hal ini tentu saja menjadi fakta bahwa orang Bugis menjadi etnis yang tidak hanya tunduk terhadap kolonial, namun didasari atas kepentingan etnis atau kelompoknya sendiri (Andaya, 2013).

3.2. Gambaran Terkait Keberadaan Orang Bugis Dalam Sejarah dan Perkembangan Batavia Tahun 1799-1837

Keberadaan orang Bugis di Batavia merupakan fenomena yang menarik dalam lanskap perkembangan politik pada masa kolonial. Memasuki periode akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, komunitas Bugis di Batavia mengalami dinamika kompleks sejalan dengan perubahan rezim kolonial dari VOC ke Pemerintahan Hindia Belanda serta interupsi pendudukan Inggris. Ketika VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada 1799, transformasi ke Pemerintahan Hindia Belanda membawa perubahan kebijakan terhadap penduduk pribumi, termasuk komunitas Bugis (Wiharyanto, 2006). Periode ini bukanlah sekadar pergantian penguasa asing, melainkan momentum pergeseran pola relasi kekuasaan yang memungkinkan komunitas Bugis di Batavia untuk merenegosiasi posisi sosial dan ekonomi mereka (Knaap, 1996).



Gambar 3.4 Kaart van de residentie Batavia en de afdeeling, 1837
(Sumber: Nationaal Archief Nederland)

Berdasarkan interpretasi peta Batavia tahun 1837 terbitan kolonial Belanda, terdapat temuan menarik terkait keberadaan komunitas Bugis. Peta tersebut menunjukkan adanya kawasan yang dikenal sebagai "*Kamp Boegies*" di bagian timur Batavia, tepatnya di sekitar muara Sungai Ciliwung. Lokasi

strategis ini menunjukkan pentingnya orang Bugis dalam aktivitas maritim dan perdagangan di kota tersebut. Mereka membangun permukiman yang berkarakteristik rumah-rumah panggung khas Bugis dengan adaptasi terhadap lingkungan rawa-rawa di sekitar muara sungai. Keberadaan permukiman Bugis yang terpisah dari kawasan permukiman etnis lain menunjukkan kebijakan segregasi spasial yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Namun, posisinya yang strategis di dekat pelabuhan menunjukkan peran penting mereka dalam ekonomi maritim Batavia. Keberadaan Kampung Bugis di Batavia mencerminkan bagaimana komunitas Bugis telah membangun jaringan sosial dan budaya yang kuat di luar wilayah asalnya, Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Knaap dan Sutherland (2004) bahwa orang Bugis sejak abad ke-17 memiliki pola migrasi dan diaspora yang luas di seluruh wilayah maritim Asia Tenggara, termasuk ke pusat-pusat kolonial seperti Batavia (Knaap & Sutherland, 2004). Dalam konteks ini, peta tahun 1837 bukan hanya alat kartografis, tetapi juga dokumen sosial yang mencerminkan keberlangsungan identitas etnik di tengah hegemoni kolonial.

Lebih lanjut, pengakuan atas Kampung Bugis dalam peta resmi Belanda menunjukkan adanya konsolidasi komunitas dan peran strategis mereka dalam jaringan perdagangan dan pertahanan kota. Seperti dicatat oleh Reid (1993) dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce*, orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung yang mampu menjalin hubungan dengan berbagai kelompok etnik dan kekuasaan lokal maupun kolonial (Reid, 2003). Keberadaan permukiman yang diidentifikasi secara etnis ini mengindikasikan bahwa orang Bugis telah memperoleh posisi sosial tertentu, baik melalui kemampuan ekonomi maupun afiliasi militer, mengingat beberapa tokoh Bugis dikenal berperan dalam pasukan VOC atau sebagai perantara kekuasaan lokal.

Kampung Bugis bisa dipahami sebagai ruang negosiasi identitas dan kekuasaan, tempat di mana orang Bugis mempertahankan budayanya sekaligus merespons tantangan urban Batavia. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo, yang menekankan

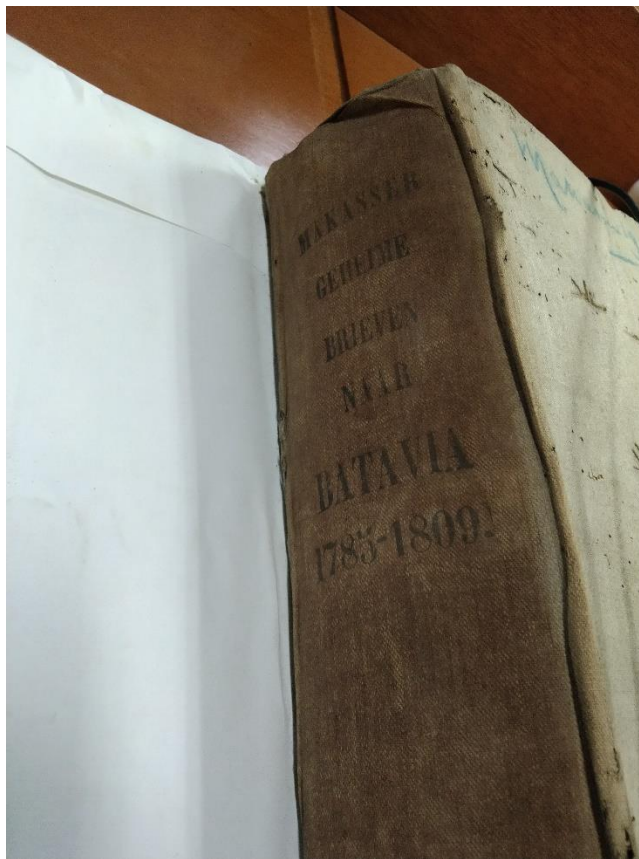
pentingnya melihat sejarah dari perspektif struktur sosial lokal dan dinamika internal masyarakat Indonesia sendiri (Kartodirdjo, 1993). Penemuan peta 1837 dengan label “*Kampong Boegis*” menguatkan pandangan bahwa sejarah Batavia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi komunitas-komunitas Nusantara non-Jawa yang membentuk jejaring sosial plural di kota pelabuhan tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh karya-karya seperti *The Bugis* oleh Christian Pelras (1996), mobilitas dan integrasi orang Bugis di berbagai wilayah Indonesia menjadi kunci untuk memahami bagaimana identitas lokal dapat bertahan dan bahkan berkembang dalam konteks kolonialisme global.

Orang Bugis telah membangun jaringan perdagangan dan permukiman yang luas menjadikan sebuah fakta yang sering terlewatkan dalam historiografi kolonial. Ini bukan hanya sebagai "penemuan" dalam arti kolonial, melainkan sebagai pengakuan terhadap realitas jaringan maritim yang telah lama ada di Nusantara, di mana orang Bugis memegang peran penting sebagai pedagang dan pelaut. Mereka tidak melihat keruntuhan VOC sebagai malapetaka, melainkan sebagai peluang untuk menegaskan kembali kedudukan mereka. Orang Bugis memegang salah satu falsafah hidup “*tellu cappa*” (tiga ujung) dalam menjalani hidup yang berasal dari *Pappaseng To Riolo* berarti pesan/nasehat orang dulu. Adapun ketiga yang dimaksud yaitu, “*cappa lilla*” yang merupakan representasi dari kemahiran diplomasi; “*cappa kawali*” merepresentasikan tentang kekuatan dalam menegakkan harga diri dan keberanian berperang, dan “*cappa lase*” merupakan penerapan strategi pernikahan sebagai jalan untuk peningkatan status atau peran dalam kehidupan bermasyarakat (Iqbal, 2022). Prinsip ini menjadi kompas yang menuntun sikap mereka menghadapi peralihan kekuasaan.

Pengambilalihan oleh Pemerintah Hindia Belanda awal abad ke-19 membawa pendekatan yang lebih sistematis dalam pengelolaan koloni. Bagi orang Bugis, ini berarti menghadapi birokrasi yang lebih ketat. Namun, dengan jejaring dagang yang telah terbangun dan kemampuan adaptasi yang tinggi, komunitas Bugis berhasil menemukan celah dalam sistem baru ini. Mereka memanfaatkan keterampilan maritim dan pengetahuan tentang jalur perdagangan lokal yang tidak sepenuhnya dikuasai Belanda untuk

mempertahankan otonomi relatif dalam kegiatan ekonomi mereka. Transisi dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda menjadi momen krusial dalam sejarah maritim Indonesia. Ketika VOC bangkrut dan kontrol beralih ke tangan negara, struktur birokrasi kolonial mengalami transformasi, tetapi komunitas seperti orang Bugis justru menunjukkan keberlanjutan dan adaptabilitas dalam kondisi tersebut. Surat-surat dari dan ke Makassar dalam kurun 1798–1805 menunjukkan bahwa orang Bugis tetap melakukan mobilitas laut secara aktif, bahkan dalam suasana politik yang tidak menentu (Ricklefs, 2005).

Penemuan terhadap arsip-arsip surat-menyurat antara Batavia dan Makassar pada awal abad ke-19 mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas komunikasi yang intensif, bahkan ketika VOC berada dalam kondisi runtuh pasca-akhir abad ke-18.



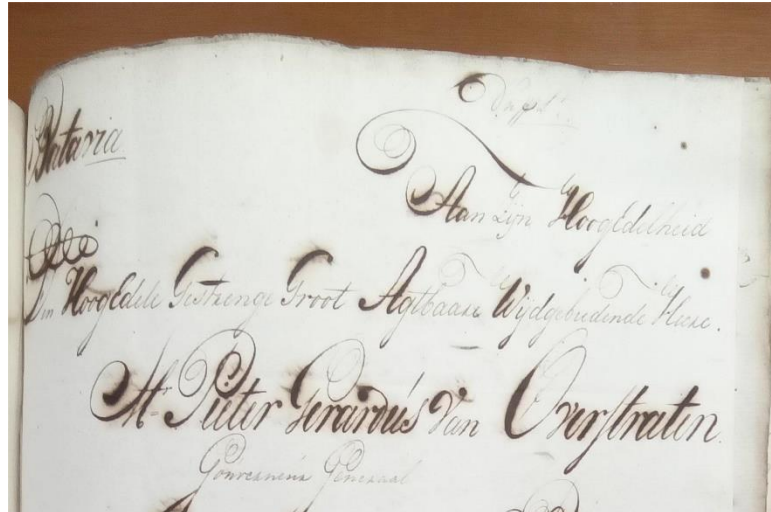
Gambar 3.5 Makassar Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809
(Sumber: ANRI)

Arsip yang berjudul “*Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809*” artinya Surat-Surat Rahasia Makassar Ke Batavia Tahun 1785-1809

merupakan kumpulan surat-surat yang dibuat oleh pemerintah Makassar kepada Batavia (*Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809*, 1801). Arsip rahasia ini menunjukkan bahwa keberadaan orang Bugis di Batavia dipersepsikan oleh pemerintah kolonial sebagai fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekedar migrasi ekonomi. Mereka dilihat sebagai kekuatan politik potensial dengan kapasitas organisasi, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang dapat mempengaruhi stabilitas kolonial secara keseluruhan. Komunitas Bugis di Batavia menunjukkan kemampuan adaptasi dan negosiasi politik yang luar biasa. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensi dalam lingkungan yang awalnya hostile, tetapi bahkan berhasil mentransformasi persepsi kolonial terhadap mereka dari ancaman menjadi aset strategis.

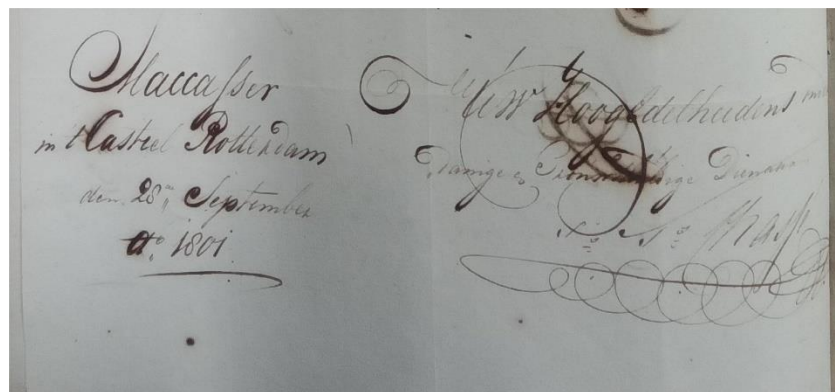
Temuan-temuan ini memberikan konteks yang sangat penting untuk memahami konsolidasi keberadaan orang Bugis di Batavia pada periode 1799-1837. Ketika periode transisi berakhir pada 1799, komunitas Bugis telah memiliki fondasi yang solid untuk menghadapi tantangan-tantangan baru era pemerintahan Hindia Belanda. Strategi adaptasi, jaringan komunikasi, kekuatan ekonomi, dan legitimasi politik yang mereka bangun selama periode 1785-1809 menjadi modal dasar untuk menghadapi transformasi-transformasi selanjutnya, termasuk era reformasi Daendels dan implementasi *Cultuur Stelsel*.

Surat-surat administratif menunjukkan adanya permintaan dari tokoh-tokoh Bugis kepada pejabat kolonial Batavia untuk pengakuan atas status mereka, perlindungan terhadap hak dagang, dan jaminan atas kebebasan bergerak. Ini mencerminkan adanya "politik pengakuan" yang diperjuangkan oleh orang Bugis melalui jalur formal-administratif.



Gambar 3.6 Surat Pemerintah Makassar Ke Batavia
(Sumber: ANRI)

Ini merupakan contoh surat yang ditujukan kepada Mr. Pieter Gerardus van Overstraten yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya terjadi peralihan kekuasaan VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda. Surat ini dibuat di kastel Rotterdam Makassar tahun 1801. Ini menjadi bukti bahwa adanya interaksi yang terus dirawat antara pemerintah Makassar dan Batavia.



Gambar 3.7 Surat Yang Dibuat Di Kastel Rotterdam
(Sumber: ANRI)

Lebih lanjut, interupsi pendudukan Inggris (1811-1816) membawa angin perubahan baru. Kekuasaan Thomas Stamford Raffles justru membuka peluang bagi komunitas Bugis untuk memperluas jaringan perdagangan maritim mereka. Kebijakan Inggris yang lebih liberal dalam perdagangan membuka peluang baru bagi pedagang Bugis. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas memberikan celah bagi pedagang-pedagang Bugis untuk

menjalin koneksi dengan jaringan dagang yang lebih luas di kawasan Samudera Hindia (Farish A. Noor et al., 2008). Beberapa tokoh Bugis di Batavia bahkan berhasil membangun hubungan dengan pejabat Inggris, mengamankan perizinan dagang yang menguntungkan. Mereka melihat pergantian penguasa sebagai permainan siasat yang harus dimainkan dengan cerdas, bukan sebagai ancaman eksistensial.

Setelah kembalinya pemerintahan Belanda pasca Konvensi London 1814, orang Bugis tetap eksis dan menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan tatanan politik baru di Batavia. Heather Sutherland (2004) menyatakan bahwa komunitas Bugis tidak serta-merta kehilangan signifikansi. Mereka tetap memelihara identitas kultural sekaligus beradaptasi dengan sistem administrasi kolonial yang baru. Kampung Bugis di Batavia menjadi ruang negosiasi budaya dan politik yang memperlihatkan kemampuan orang Bugis dalam menyelaraskan diri dengan perubahan tanpa kehilangan esensi ke-Bugis-an mereka (Locher-Scholten & Rietbergen, 2004). Pemukiman tersebut menjadi basis utama dalam konsolidasi dengan kelompok etnis lain dalam menghadapi kebijakan kolonial yang semakin mengekang. Sehingga strategi mereka untuk keluar dari situasi tersebut dengan secara formal tunduk pada aturan kolonial sambil diam-diam mempertahankan praktek tradisional dan jaringan sosial-ekonomi mereka.

Yang menarik adalah bagaimana orang Bugis memandang pergolakan politik kolonial ini bukan dalam kerangka "penjajah versus terjajah" semata, melainkan ruang negosiasi yang dinamis di mana agensi lokal tetap berperan. Konsep "*sipakatau*" (saling memanusiaikan) membuat mereka mampu menjalin hubungan pragmatis dengan berbagai pihak tanpa kehilangan identitas. Mereka tidak sepenuhnya menolak atau menerima kekuasaan kolonial, melainkan mengambil posisi yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang dalam kondisi apapun. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa orang Bugis yang berhasil memanfaatkan situasi untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam struktur pemerintahan kolonial, khususnya di bidang perdagangan dan keamanan maritim (Kathirithamby-Wells, 1993). Memasuki pertengahan abad ke-19, ketika sistem Tanam Paksa

(*Cultuurstelsel*) diberlakukan, komunitas Bugis di Batavia kembali menunjukkan ketangguhan adaptif. Berbeda dengan kelompok etnis lain yang terpaksa menjadi buruh perkebunan, banyak orang Bugis di Batavia yang berhasil mempertahankan otonomi ekonomi mereka melalui jaringan perdagangan maritim yang telah terbangun sejak lama (Sutherland, 2011).

Keberadaan orang Bugis di Batavia selama masa transisi kekuasaan kolonial merefleksikan kearifan Nusantara dalam menghadapi perubahan yang tidak melawan arus secara frontal, tetapi juga tidak hanyut begitu saja. Mereka adalah pelaku sejarah yang aktif merespons perubahan geopolitik dengan strategi budaya dan ekonomi yang khas Nusantara. Keberadaan orang Bugis di Batavia tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang penting. Noorduyn (1983) menyatakan bahwa elit Bugis sering membangun aliansi dengan penguasa kolonial untuk mempertahankan pengaruh mereka. Mereka juga memainkan peran sebagai perantara budaya dan politik antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal.

3.3. Peran Orang Bugis Dalam Perkembangan Sosial dan Ekonomi Di Batavia Tahun 1799-1837

3.3.1. Sistem Ekonomi Orang Bugis

Dalam dinamika perekonomian tradisional Nusantara, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, terdapat suatu sistem yang menjadi manifestasi dari filosofi ekonomi Bugis yang mengutamakan keadilan dan nilai-nilai kegotongroyongan. Sistem *te'seng* merupakan sebuah mekanisme ekonomi bagi hasil yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bugis sejak masa lampau khususnya di Kerajaan Bone. *Te'seng* merujuk pada suatu bentuk kerja sama ekonomi yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik modal atau tanah dengan pekerja atau penggarap. Istilah ini berasal dari bahasa Bugis yang secara harfiah bermakna "pembagian" atau "distribusi hasil". Sistem ini mencerminkan konsep ekonomi yang berkeadilan sosial, di mana setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan kontribusinya.

Dalam struktur sosial masyarakat Kerajaan Bone, Te'seng berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang mengatur hubungan antara berbagai lapisan masyarakat, mulai dari bangsawan (*anakarung*), orang bebas (*to maradeka*), hingga rakyat biasa (*ata*). Sistem ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang kuat dalam menjaga harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat. Te'seng mengandung makna filosofis yang mendalam tentang kerjasama dan saling berbagi dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak sekadar merupakan praktik bisnis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai luhur masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi prinsip "*sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*" (Prabowo & Kalsum, 2021).

Praktik te'seng mencerminkan *worldview* masyarakat Bugis yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konteks ini, keuntungan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dimonopoli oleh satu pihak, melainkan sebagai berkah yang harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Biasanya, sistem ini diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga kegiatan maritim yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bugis. Di sektor perdagangan misalnya, sistem te'seng memungkinkan pedagang dengan modal terbatas untuk bermitra dengan pemilik modal yang lebih besar. Pedagang kecil dapat mengakses barang dagangan tanpa harus memiliki modal besar di awal, sementara pemilik modal dapat memperluas jangkauan bisnisnya tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

Sistem ini juga mencerminkan konsep "*siri*" (harga diri) dalam budaya Bugis. Setiap pihak yang terlibat dalam te'seng diharapkan menjaga kehormatan dan integritasnya dengan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap kesepakatan te'seng tidak

hanya berdampak ekonomi, tetapi juga merusak reputasi dan harga diri pelaku di mata masyarakat (Prabowo et al., 2025).

Te'seng sebagai sistem ekonomi bagi hasil dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Sistem ini tidak hanya mencerminkan kearifan ekonomi masyarakat Bugis, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi fondasi bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelestarian dan revitalisasi praktik te'seng dalam konteks modern menjadi penting tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga sebagai alternatif model pembangunan ekonomi yang lebih humanis dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang te'seng, kita dapat belajar bagaimana membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.

3.3.2. Aktivitas Ekonomi Orang Bugis Di Batavia

Orang Bugis memiliki peran strategis sebagai bagian dari jaringan perdagangan antarpulau yang sangat penting bagi Batavia sebagai pelabuhan internasional. Dengan memegang salah satu filosofi Bugis "*Kegisi monro sore lopie, kositu tomallabu sengereng*" artinya dimana perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan, maka Orang Bugis di Batavia periode 1799-1837 memainkan peran penting dalam sektor perdagangan dan pelayaran (Khusyairi et al., 2016). Keahlian maritim mereka yang telah teruji selama berabad-abad menjadikan mereka aktor penting dalam perdagangan antar pulau dan regional. Mereka memanfaatkan pengetahuan navigasi tradisional yang tercermin dalam peta-peta bahari Bugis abad ke-19, yang menunjukkan penguasaan mereka terhadap rute-rute perdagangan di Kepulauan Melayu.

Keahlian maritim orang Bugis menjadi aset berharga sebagai penyedia jasa transportasi laut yang menghubungkan Batavia dengan berbagai pelabuhan di Nusantara. Pinisi dan perahu tradisional Bugis lainnya menjadi pemandangan umum di pelabuhan Batavia,

mengangkut penumpang dan kargo ke berbagai destinasi. Jasa pelayaran ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama karena orang Bugis memiliki pengetahuan mendalam tentang navigasi, cuaca laut, dan jalur-jalur perdagangan tradisional. Mereka mampu mencapai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal Eropa yang lebih besar. Bukti kemahiran orang Bugis, yaitu adanya perahu pinisi yang merupakan kapal warisan nenek moyang masyarakat Bugis-Makassar. Dengan berbagai keahlian mereka tentu saja sangat bermanfaat dalam aktivitas pelayaran di Nusantara (Femas, 2024).

Lebih lanjut, sektor perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi orang Bugis di Batavia. Mereka memanfaatkan jaringan maritim tradisional yang telah dikuasai selama berabad-abad untuk mengembangkan bisnis perdagangan antar pulau. Komoditas yang diperdagangkan meliputi hasil bumi dari Sulawesi seperti kopra, cengkeh, pala, dan kayu, serta produk-produk manufaktur yang diperoleh dari Batavia untuk didistribusikan ke wilayah timur Nusantara (Kesuma, 2004). Pedagang Bugis di Batavia mengembangkan strategi bisnis yang adaptif, memanfaatkan hubungan dengan VOC sekaligus mempertahankan jaringan perdagangan independen. Mereka beroperasi dalam skala yang beragam, mulai dari pedagang kecil yang menjual produk lokal di pasar-pasar Batavia hingga saudagar besar yang mengelola jalur perdagangan regional.

Sebagai pedagang, orang Bugis mengembangkan jaringan perdagangan yang menghubungkan Batavia dengan berbagai wilayah di Nusantara. Mereka menjadi perantara penting dalam distribusi komoditas seperti rempah-rempah, hasil hutan, dan produk-produk lokal lainnya. Mereka membawa hasil bumi dari wilayah timur Indonesia seperti beras dari Sulawesi Selatan, rempah dari Maluku, dan bahkan budak dari Flores dan Sumba, yang menjadi komoditas penting di pasar Batavia (Andaya, 1993). Sebagai pelaut dan

pedagang bebas (*freelance traders*), mereka tidak bergantung sepenuhnya pada VOC, melainkan sering beroperasi dalam ruang-ruang abu-abu antara perdagangan resmi dan tidak resmi (Reid, 2005). Pelras (1996) dalam penelitiannya tentang masyarakat Bugis menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa orang Bugis di Batavia tidak hanya hadir sebagai kelompok yang termarginalisasi, tetapi juga memiliki jaringan ekonomi dan sosial yang luas. Mereka menjaga hubungan dengan tanah kelahiran mereka, sekaligus membangun aliansi baru dengan kelompok etnis lainnya di Batavia. Ini memperlihatkan peran mereka dalam menopang ekonomi Batavia tidak hanya sebagai pemasok barang, tetapi juga sebagai perantara ekonomi alternatif yang memberi ruang bagi sirkulasi barang di luar kontrol monopoli VOC.

Keberadaan mereka dalam sistem perdagangan ini memungkinkan terciptanya jaringan dagang trans-nusantara, yang menghubungkan Batavia dengan Makassar, Banjarmasin, hingga Pattani dan Riau. Dalam pendekatan Nusantara, ini menunjukkan bahwa Batavia bukan sekadar kota kolonial Eropa, melainkan simpul dalam jaringan ekonomi maritim lokal yang digerakkan oleh pelaku-pelaku pribumi seperti orang Bugis. Menurut penelitian J.C. van Leur, pedagang Bugis di Batavia mengembangkan model bisnis yang fleksibel, beradaptasi dengan regulasi VOC sambil mempertahankan jaringan perdagangan independen dengan wilayah yang berada di luar kontrol langsung VOC. Mereka menguasai perdagangan komoditas seperti tripang, agar-agar, mutiara, dan produk laut lainnya yang sangat diminati di pasar Tiongkok (Leur, 2015). Catatan komersial yang dianalisis oleh Gerrit Knaap menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-18, pedagang Bugis di Batavia juga terlibat dalam perdagangan tekstil, rempah, kopi, dan bahkan budak, mendemonstrasikan diversifikasi aktivitas ekonomi mereka (Knaap, 1996).

Orang Bugis di Batavia memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi kota selama periode kolonial.

Kontribusi mereka mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan maritim, pertahanan, hingga pengembangan infrastruktur dan budaya. Meskipun perdagangan menjadi fokus utama, sebagian komunitas Bugis di Batavia juga terlibat dalam aktivitas pertanian dan perikanan. Sebagaimana penelitian Hendrik E. Niemeijer dan bondan Kanumoyoso abad ke-17 hingga abad ke-18 menjadi periode penting dalam pembangunan kota Batavia. Adanya ekspansi ke *Ommelanden* dimotivasi oleh kebutuhan praktis yang mendesak. Batavia yang tumbuh pesat memerlukan pasokan makanan yang stabil, bahan bangunan, dan lahan untuk menanam tanaman komersial yang menguntungkan VOC. Proses pembukaan lahan ini melibatkan pembersihan hutan tropis, pengeringan rawa-rawa, pembangunan sistem irigasi, dan establishment perkebunan yang terorganisir. Karakteristik geografis *Ommelanden* yang berupa dataran rendah dengan sistem sungai yang kompleks menuntut teknologi dan tenaga kerja intensif untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan saluran air, tanggul, dan sistem drainase menjadi prasyarat mutlak sebelum lahan dapat digunakan untuk aktivitas pertanian atau pemukiman. Kompleksitas teknis ini memerlukan koordinasi yang ketat antara pemerintah kolonial, pengusaha swasta, dan tenaga kerja dalam jumlah besar (Niemeijer, 2012).

Pembukaan lahan di *Ommelanden* tidak dapat dipisahkan dari sistem perbudakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Batavia. Penelitian menunjukkan bahwa pada abad ke-18, lebih dari 60% populasi Batavia terdiri dari budak yang bekerja untuk VOC dan individu-individu swasta. Angka ini mencerminkan ketergantungan ekstrem ekonomi kolonial terhadap tenaga kerja tidak bebas. Sistem perbudakan di Batavia menunjukkan karakteristik yang terorganisir dan sistematis. Berbeda dengan praktik perbudakan yang bersifat sporadis atau berdasarkan penjarahan semata, perbudakan di Batavia diintegrasikan ke dalam struktur ekonomi formal. Budak tidak hanya digunakan untuk pekerjaan domestik, tetapi juga menjadi tenaga

utama dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan benteng, jalan, dan yang paling penting, pembukaan serta pengolahan lahan di Ommelanden (Kanumoyoso, 2023).

Komposisi budak di Batavia sangat beragam, mencerminkan jaringan perdagangan budak yang luas. Salah satu penyumbang terbesar budak berasal dari Sulawesi yang mencapai sekitar 40%. Dengan angka demikian, tenaga kerja orang Bugis menjadi salah satu tenaga yang dibutuhkan bagi perkembangan sektor ekonomi Batavia. Dengan adanya praktik perbudakan menjadikan Batavia sebagai kawasan multi-etnis sehingga keragaman etnis ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana identitas etnis sering kali menentukan jenis pekerjaan dan status dalam hierarki perbudakan (Haris, 2007).

Peran ini tidak hanya memengaruhi kehidupan komunitas Bugis sendiri tetapi juga berdampak signifikan pada perkembangan Batavia secara keseluruhan. Kehadiran jaringan Arung Palakka di Batavia memberi komunitas Bugis akses terhadap privilege ekonomi dan politik yang tidak dimiliki kelompok etnis lainnya. Para pedagang Bugis di Batavia memanfaatkan koneksi dengan Arung Palakka untuk mengamankan akses preferensial terhadap komoditas perdagangan dari Sulawesi Selatan seperti beras, kopi, dan rempah-rempah. Ini menciptakan basis ekonomi yang kuat bagi komunitas Bugis untuk mengembangkan pengaruh politik di kemudian hari. Hingga abad ke-20, orang Bugis terus membentuk pola migrasi dalam upaya untuk *massappa dalle'* atau mencari nafkah. Menurut Mashadi Said & Hendro Prabowo dalam buku *Diaspora Bugis*, salah satu kampung yang memiliki presentase 40% dihuni oleh orang Bugis yaitu Kamal Muara pesisir Jakarta Utara. Kedatangan orang-orang Bugis diterima oleh penduduk setempat (orang Betawi) dan melakukan akulturasi yang saling menguntungkan antar sesama etnis dengan baik. Hubungan antar etnis terjalin harmonis dan saling bergantung satu

sama lain menciptakan masyarakat yang plural dan majemuk (Bakti, 2010).

3.4. Sosial Keagamaan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837 dan Perkumpulan Ke-Bugis Di Jakarta

Jaringan sosial keagamaan orang Bugis di Batavia merupakan aspek penting dalam memahami bagaimana mereka mempertahankan kohesi sosial dan identitas kulturalnya di lingkungan urban kolonial. Jaringan ini berperan tidak hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam mengatur dinamika sosial, ekonomi, dan politik komunitas Bugis. Walaupun secara spesifik belum ditemukan sumber tentang aktivitas keagamaan orang Bugis di Batavia, namun tentu keterkaitan tokoh ulama seperti Syekh Yusuf menjadi satu variabel yang penting dalam perkembangan jaringan ulama dan tarekat di Batavia.

Dalam konteks masyarakat Bugis, migrasi bukan hanya dimaknai sebagai pelarian atau keterpaksaan akibat konflik, tetapi juga sebagai bagian dari prinsip hidup "*siri' na pacce*" yang mendorong seseorang untuk menjaga harga diri dan solidaritas sosial bahkan dalam perantauan. Orang Bugis di Batavia berhasil mempertahankan identitas mereka melalui praktik budaya dan sistem kekerabatan, sambil beradaptasi dengan konteks urban kolonial (Pelras, 1996). Jaringan sosial keagamaan orang Bugis di Batavia memainkan peranan besar dalam mempertahankan identitas Islam mereka di tengah pluralitas masyarakat kota. Orang Bugis dikenal sebagai pemeluk Islam yang taat, dan mereka membawa serta tradisi Islam yang kuat dari Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Gibson (2007) tentang praktik keagamaan Bugis abad ke-19 menunjukkan bahwa Islam yang dipraktikkan oleh orang Bugis di Batavia memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan elemen-elemen kepercayaan pra-Islam dengan prinsip-prinsip Islam. Sintesis ini menciptakan bentuk Islam lokal yang khas dan menjadi penanda identitas bagi komunitas Bugis. Praktik Islam orang Bugis di Batavia menunjukkan kontinuitas dengan tradisi keagamaan di Sulawesi Selatan, di mana elemen-elemen kepercayaan lokal terintegrasi dengan ajaran Islam dalam bentuk yang unik (Gibson, 2007).

Masyarakat Sulawesi Selatan telah dikenal lama sebagai bangsa pelaut yang tangguh, dan budaya kemaritiman mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Suku Bugis, yang merupakan kelompok etnis dominan di Sulawesi Selatan, menunjukkan perpaduan budaya yang menarik. Kehidupan masyarakat Bugis mencerminkan penyatuan antara tradisi lokal dan ajaran Islam, dimana agama Islam telah mengakar kuat sebagai kekuatan dalam masyarakat. Penelitian terhadap komunitas nelayan di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa tanggal 1 Muharram dipandang sebagai hari yang sebaiknya dihindari untuk berlayar. Hari tersebut dianggap sebagai hari *Nakhase* atau hari sial. Nelayan meyakini bahwa jika tetap melaut pada hari itu, mereka akan mengalami kerugian atau bahkan musibah, bukan keuntungan (Hamdani et al., 2023). Begitu juga dengan hari Jumat, sebagian besar nelayan Bugis menganggapnya sebagai hari yang kurang baik untuk menangkap ikan. Kepercayaan yang mengakar dalam diri mereka menyatakan bahwa melaut pada hari Jumat berisiko menghadapi dua kemungkinan buruk: mengalami bencana di laut atau pulang dengan tangan kosong tanpa hasil tangkapan sama sekali (Naping, 2017).

3.4.1. Profil Perkumpulan Ke-Bugis

Di tengah dinamika kota metropolitan Jakarta, terdapat sebuah komunitas yang tetap mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai sosial keagamaannya dengan penuh ketekunan. Komunitas ini dikenal sebagai Ke-Bugis, sebuah simpul sosial yang terdiri dari para perantau Bugis yang bertekad melestarikan identitas etnis dan religius mereka di tengah arus modernisasi dan urbanisasi. Komunitas Ke-Bugis terbentuk dari dorongan kuat para perantau Bugis untuk mempertahankan identitas etnis sekaligus membangun solidaritas sosial di wilayah urban yang multikultural. Komunitas ini bukanlah entitas formal yang berbadan hukum, melainkan jaringan kekerabatan dan asal-usul daerah yang dipererat melalui aktivitas sosial dan keagamaan. Dalam pandangan mereka, hidup di Jakarta tidak menghapus identitas kebugisan, melainkan mempertegasnya melalui pertemuan-pertemuan komunitas yang sarat makna simbolik dan religius



Gambar 3.8 Logo Perkumpulan PB KEBUGIS

(Sumber: Pedulirakyat.co.id)

Komunitas Bugis di Jakarta cenderung membentuk pola interaksi sosial berbasis kekeluargaan (genealogis) yang dihidupkan kembali melalui aktivitas keagamaan kolektif seperti pengajian, perayaan Maulid Nabi, dan kegiatan sosial lainnya. Keberadaan komunitas seperti Ke-Bugis menjadi semacam ruang kultural di mana proses transmisi nilai-nilai Bugis berlangsung secara aktif. Nilai-nilai yang mengikat komunitas Ke-Bugis adalah manifestasi dari ajaran adat Bugis yang beririsan erat dengan prinsip-prinsip Islam. Tiga nilai utama yang sering dikedepankan dalam kehidupan sosial mereka adalah; *Sipakatau* (saling memanusiakan), *Sipakalebbi* (saling menghormati), dan *Sipakainge'* (saling mengingatkan). Ketiga prinsip ini merupakan bagian integral dari lontara' sebagai sumber ajaran etika orang Bugis yang secara substansial sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk saling membantu dalam kegiatan keagamaan, pemberian nasihat dalam lingkup keluarga besar, dan upaya menjaga harmoni sosial dalam komunitas.

Komunitas Ke-Bugis memiliki fungsi ganda dalam kehidupan anggotanya, yaitu sebagai sarana penguatan religiusitas sekaligus sebagai pengikat solidaritas etnis. Dalam ruang-ruang pengajian dan kegiatan keagamaan, terdapat dialog antar-generasi yang memungkinkan proses pewarisan nilai-nilai adat dan agama secara simultan. Anak-anak muda diajarkan tidak hanya membaca Al-Qur'an,

tetapi juga mengenali tradisi Bugis seperti *mappatabe'* (permohonan izin atau restu), *massure'* (musyawarah adat), dan penggunaan bahasa Bugis dalam konteks ibadah. Kegiatan keagamaan juga menjadi medium konsolidasi sosial dalam menghadapi tantangan hidup di kota besar. Dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, komunitas Ke-Bugis menunjukkan solidaritas tinggi melalui penggalangan dana sosial, bantuan untuk anggota yang sakit, dan dukungan moral saat terjadi kematian dalam komunitas. Dengan demikian, komunitas ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial berbasis agama dan adat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah dan pengaruh ekonomi orang Bugis di Jakarta, khususnya di sektor maritim dan perdagangan, *halal bi halal* mulai terlembagakan. Pada 1972, dibentuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang kemudian menjadi payung formal bagi berbagai sub-etnisitas dari Sulawesi Selatan, termasuk Bugis. Namun, karena kekhasan identitas dan jaringan sosialnya, komunitas Bugis tetap memelihara forum tersendiri yang kemudian dikenal sebagai Ke-Bugis. Dr. Andi Faisal Bakti, sejarawan sosial yang meneliti diaspora Bugis, mencatat bahwa dekade 1970-an adalah periode konsolidasi identitas Bugis di Jakarta. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang menekankan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, komunitas Bugis menemukan momentum untuk mengorganisir diri secara lebih terstruktur. *Halal bi halal* menjadi salah satu mekanisme utama untuk memperkuat jaringan sosial dan ekonomi (Bakti, 2010).

3.4.2. Tradisi Halal Bi Halal Perkumpulan Ke-Bugis

Pada tanggal 1 Mei 2025 yang berlokasi di aula utama Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial RI dipenuhi dengan hiasan berwarna-warni yang menyimbolkan kesucian, kemakmuran, dan kemuliaan dalam tradisi Bugis. Momen tahunan yang dinanti-nanti oleh ribuan perantau Bugis di Jakarta ini tidak hanya sekadar acara silaturahmi pasca-Idul Fitri, tetapi juga merupakan manifestasi dinamis dari sejarah panjang adaptasi budaya dan religiusitas komunitas Bugis urban.



Gambar 3.9 Kegiatan Halal Bi Halal Ke-Bugis

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Halal Bi Halal merupakan tradisi khas Indonesia yang merupakan perpaduan bahasa Arab dengan nilai lokal ini telah mengalami proses transformasi unik di tangan komunitas Ke-Bugis Jakarta. Acara yang semula merupakan adaptasi dari tradisi silaturahmi pasca Ramadhan ini telah berkembang menjadi forum kultural, ekonomi, dan politik yang menegaskan eksistensi dan relasi kuasa komunitas Bugis dalam konstelasi sosial ibukota. Perkembangan awal tradisi Halal Bi Halal tidak dapat dipisahkan dari proses Islamisasi di Nusantara yang berlangsung secara gradual sejak abad ke-13. Namun, kristalisasi tradisi ini sebagai praktik sosial yang terstruktur diperkirakan terjadi pada periode abad ke-16 hingga ke-18, seiring dengan konsolidasi kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa, Sumatra, dan Sulawesi (Salis Irvan Fuadi & Robingun Suyud El Syam, 2023).

Para ulama dan pedagang Muslim yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara mengadopsi pendekatan akomodatif terhadap tradisi lokal. Prinsip permintaan maaf dan rekonsiliasi sosial yang inheren dalam ajaran Islam disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Nusantara yang menekankan harmoni komunal. Tradisi Halal Bi Halal

terintegrasi dengan sistem sosial hierarkis yang berlaku di masyarakat Jawa dan Melayu. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual religius, tetapi juga sebagai mekanisme pemeliharaan kohesi sosial dan legitimasi struktur kekuasaan tradisional (Husna, 2019).

Periode kolonial menandai fase konsolidasi tradisi Halal Bi Halal sebagai bentuk resistensi kultural terhadap dominasi politik dan budaya kolonial. Pemerintah kolonial Belanda, melalui kebijakan politik etis dan sistem *indirect rule*, memberikan ruang terbatas bagi praktik budaya-religius masyarakat pribumi. Dalam konteks ini, tradisi Halal Bi Halal berkembang sebagai arena preservasi identitas Islam-Nusantara. Praktik ini menjadi medium untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan realitas sosio-politik kolonial.

Era awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1909), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926). Organisasi-organisasi ini berperan dalam proses institusionalisasi tradisi Halal Bi Halal melalui pembakuan prosedur dan ritualisasi praktik. Pasca-kemerdekaan Indonesia, tradisi Halal Bi Halal mengalami proses nasionalisasi sebagai bagian dari pembentukan identitas budaya nasional. Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya membangun kesatuan nasional, mengadopsi tradisi-tradisi lokal yang memiliki nilai universal sebagai elemen pembentuk karakter bangsa.

Presiden Soekarno, melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), memberikan legitimasi terhadap praktik-praktik keagamaan yang sejalan dengan semangat persatuan nasional. Tradisi Halal Bi Halal dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tradisi Halal Bi Halal mengungkapkan kompleksitas proses akulturasi budaya-religius dalam konteks Islam Nusantara. Tradisi ini merepresentasikan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal melalui proses adaptasi yang kreatif dan dinamis. Perkembangan

historis tradisi ini mencerminkan resiliensi budaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi, kolonialisme, dan globalisasi. Dalam konteks kontemporer, tradisi Halal Bi Halal tetap relevan sebagai medium pemeliharaan kohesi sosial dan dialog antarbudaya (Mufida, 2024).

Halal Bi Halal komunitas Ke-Bugis merupakan transformasi dari tradisi *tudang sipulung* (duduk bersama) yang secara tradisional diadakan setelah panen di tanah Bugis. Acara *Tudang sipulung* pada mulanya adalah forum musyawarah petani Bugis untuk evaluasi panen dan perencanaan masa tanam berikutnya. Elemen ritualnya kemudian berakulturasi dengan Islam, khususnya setelah Idul Fitri yang dianggap sebagai masa panen spiritual. Tema halal bi halal Ke-Bugis 2025 "Dengan Silaturahmi Kita Tingkatkan Kualitas Kekeluargaan Bugis Sidenreng Rappang di Perantauan" merefleksikan upaya komunitas untuk menegosiasikan identitas tradisional dengan memperkuat akar tradisi. Dengan mengedepankan konsep nilai *sipakatau* yang mengajarkan kita untuk tetap memanusiakan orang lain bahkan dalam interaksi virtual. Adapun media sosial juga seharusnya menjadi ruang untuk *sipakalebbi* (saling menghargai) bukan tempat untuk saling merendahkan. Dan fungsi *sipakainge* (saling mengingatkan) menjadi sangat relevan untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Acara ini mencerminkan dialektika antara upaya mempertahankan esensi nilai Bugis dan kebutuhan untuk terus relevan dalam konteks sosial yang berubah.

Pada periode awal migrasi besar-besaran orang Bugis ke Jakarta pasca kemerdekaan, halal bi halal dilakukan dalam skala kecil, biasanya terbatas pada ikatan kekerabatan (*asseajingeng*) atau kampung asal (*wanua*). Diadakan di rumah-rumah perantau Bugis yang sukses atau di musholla-musholla kecil di permukiman Bugis seperti di kawasan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, acara ini lebih bersifat informal. Memasuki dekade 1990-an hingga awal 2000-an, halal bi halal Ke-Bugis mengalami proses politisasi yang signifikan. Periode ini

bertepatan dengan meningkatnya kesadaran politik identitas di kalangan kelompok etnis di Indonesia. Halal bi halal tidak lagi sekadar acara silaturahmi, tetapi juga menjadi arena kontestasi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam konteks desentralisasi politik pasca-Reformasi, identitas etnis menjadi modal politik yang penting (Satryo Pringgo Sejati & Ahmad Burhan Hakim, 2023). Halal bi halal Ke-Bugis menjadi panggung bagi tokoh-tokoh Bugis untuk memproyeksikan pengaruh dan membangun dukungan politik, baik untuk kepentingan di Jakarta maupun di daerah asal. Pada fase ini, halal bi halal sering dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintahan dari kalangan Bugis dan politisi yang mencari dukungan dari komunitas Bugis. Pertunjukan budaya menjadi lebih elaboratif, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai pernyataan simbolik tentang eksistensi dan kebanggaan identitas Bugis.

Periode kontemporer menandai fase baru dalam evolusi halal bi halal Ke-Bugis. Menghadapi tantangan globalisasi dan erosi identitas pada generasi muda, komunitas Ke-Bugis melakukan revitalisasi tradisi Halal bi Halal dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap teknologi digital. Inovasi dalam fase ini termasuk live streaming acara untuk menjangkau komunitas Bugis global, penggunaan media sosial untuk dokumentasi dan promosi nilai-nilai budaya, serta integrasi elemen-elemen kontemporer dalam pertunjukan seni dan kuliner.

Acara halal bi halal Ke-Bugis di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial RI pada 1 Mei 2025 merepresentasikan kulminasi dari proses historis panjang adaptasi budaya dan religiusitas Bugis dalam konteks urban. Beberapa elemen penting dalam acara ini mencerminkan dimensi historis yang berbeda:

A. Simbolisme Spasial dan Material

Pemilihan Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial RI sebagai venue tidak sekadar pertimbangan teknis, tetapi juga simbolis. Sebagai institusi negara yang bergerak di bidang kesejahteraan

sosial, gedung ini merefleksikan nilai *sipakatau* (saling memanusiakan) yang menjadi inti filosofi sosial Bugis. Dekorasi ruangan dengan motif *balo renni* (corak kecil) pada kain sutra sebagai backdrop panggung dan penggunaan *bosara* (wadah makanan tradisional Bugis) untuk hidangan pembuka merupakan representasi material dari identitas kultural yang dipertahankan di tengah modernitas. Setiap elemen material dalam acara halal bi halal memiliki fungsi semiotik yang penting. Penggunaan kain sutra dengan motif tertentu, misalnya, tidak hanya dekoratif tetapi juga mengkomunikasikan status sosial dan asal geografis dalam tradisi Bugis.

B. Struktur Acara: Dialog antara Tradisi dan Agama

Struktur acara halal bi halal 2025 mencerminkan sintesis antara tradisi Bugis pra-Islam dan religiusitas Islam yang telah berlangsung berabad-abad yaitu, dimulai dari pembukaan dengan *mappatabe*. Ini merupakan ritual meminta izin yang disampaikan dalam bahasa Bugis tinggi (*basa to riolo*), menegaskan hierarki sosial dan penghormatan pada leluhur. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang pemilihan surah atau ayatnya menyesuaikan dengan konteks persaudaraan dan perdamaian. Hal ini merefleksikan integrasi nilai Islam dalam identitas Bugis.

Ada juga sambutan tokoh yang di dalamnya mencakup tokoh adat (*matoa*), tokoh agama, dan pejabat pemerintah dari kalangan Bugis, yang masing-masing mewakili dimensi adat, agama, dan negara dalam kehidupan orang Bugis. Selain itu *massalama* sebagai prosesi doa bersama untuk keselamatan yang sebelumnya dilengkapi dengan penyampaian dakwah dipimpin oleh *anreguru* (ulama Bugis) dengan bahasa Arab dan Bugis secara bergantian. Ini merepresentasikan nilai harmonisasi dua tradisi yang tercermin dalam sistem *pangaddereng* (sistem adat) (Wafa, 2023).

Pertunjukan budaya dalam Halal Bi Halal Ke-Bugis 2025 menunjukkan proses reinterpretasi kreatif terhadap tradisi estetika

Bugis. Ada penampilan-penampilan paduan suara wanita Bugis dengan kolaborasi menyanyikan lagu-lagu tradisional Bugis. Selain itu, penggunaan *baju bodo* atau busana tradisional khas Sulawesi oleh para panitia pelaksana dan beberapa tokoh yang menampilkan interpretasi penguatan tradisi dari penggunaan *songkok recca* dan *baju bodo* (pakaian tradisional khas Bugis).

Pertunjukan budaya dalam Halal bi halal Ke-Bugis merupakan arena eksperimentasi estetika yang menjembatani tradisi dan modernitas. Ini adalah bentuk resistensi kreatif terhadap homogenisasi budaya global sekaligus adaptasi yang memastikan keberlangsungan elemen kultural dalam bentuk yang relevan bagi generasi baru. Pada intinya, struktur acara Halal bi halal Ke-bugis dapat dimaknai sebagai cerminan konsep *pangngaderreng* (sistem norma) dalam masyarakat Bugis yang mencakup *ade'* (adat), *bicara* (hukum), *rapang* (keteladanan), *wari* (stratifikasi), dan *sara'* (syariat Islam). Setiap elemen acara merepresentasikan satu atau lebih aspek dari sistem nilai ini.

C. Halal Bi Halal sebagai Arena Transmisi Nilai

Fungsi sosial terpenting dari halal bi halal Ke-Bugis di Jakarta adalah sebagai mekanisme transmisi nilai antar generasi. Dalam masyarakat Bugis yang semakin terfragmentasi oleh migrasi dan urbanisasi, acara tahunan ini menjadi momen penting untuk mengkomunikasikan dan menegosiasikan esensi ke-Bugis-an kepada generasi yang lahir dan tumbuh di perantauan. Halal bi halal menjadi semacam ritual inisiasi informal yang memperkenalkan generasi muda pada aspek-aspek identitas Bugis yang mungkin tidak mereka alami dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta. Ini adalah forum di mana narasi tentang kejayaan Bugis masa lalu, nilai-nilai filosofis, dan kode etik diwacanakan dan diinternalisasi.

Tradisi halal bi halal Ke-Bugis di Jakarta menunjukkan bagaimana sebuah komunitas diaspora melakukan adaptasi kreatif terhadap praktik kultural dan religiusnya untuk tetap relevan dalam

konteks urban yang terus berubah. Lebih dari sekadar acara silaturahmi, halal bi halal telah menjadi institusi sosial yang berfungsi sebagai Mekanisme pemertahanan identitas kolektif, Arena negosiasi nilai tradisional dan modernitas, Forum transmisi kultural antar generasi, Ruang ekspresi estetika dan gastropolitik dan Platform penguatan jaringan sosial-ekonomi.

Dalam perjalanan historisnya dari ritual informal berbasis kekerabatan hingga acara formal dengan dimensi politik dan ekonomi, halal bi halal Ke-Bugis merefleksikan resiliensi dan adaptabilitas budaya Bugis. Sebagaimana dirangkum oleh sejarawan budaya Pelras (2010) bahwa kekuatan budaya Bugis terletak pada kapasitasnya untuk menyerap unsur-unsur baru tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam keriuhan metropolitan Jakarta yang terus menekan identitas-identitas lokal menuju homogenisasi, tradisi halal bi halal Ke-Bugis berdiri sebagai ruang liminal yakni tempat masa lalu, kini, dan masa depan berdialog; tempat adat dan agama bersintesis; tempat tanah asal dan perantauan berjumpa. Kontinuitas dalam perubahan, itulah esensi dari tradisi yang hidup.

Meskipun komunitas Ke-Bugis berhasil mempertahankan tradisi dalam ruang urban, mereka tetap menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Generasi muda cenderung mengalami distansi kultural terhadap nilai-nilai adat, dan banyak di antara mereka yang lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, komunitas ini secara aktif mengembangkan program edukasi budaya dan agama yang lebih adaptif, seperti kelas bahasa Bugis, kajian online, dan kolaborasi lintas komunitas. Upaya pelestarian tradisi ini menunjukkan bahwa Ke-Bugis tidak hanya merupakan representasi nostalgia atas kampung halaman, tetapi juga entitas kultural yang bertransformasi secara dinamis di tengah kota metropolitan.

Tak dapat dipungkiri, komunitas Ke-Bugis di Jakarta merupakan contoh nyata bagaimana perantauan tidak berarti kehilangan akar,

tetapi justru memperkuat identitas melalui ekspresi sosial dan spiritual yang terorganisir. Dalam dunia yang serba cepat dan seringkali anonim seperti Jakarta, Ke-Bugis menjadi basis kultural dan religius bagi warganya, sebuah rumah kedua yang dibangun atas dasar iman, adat, dan persaudaraan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jaringan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

Pertama, mengenai kajian sejarah tentang keberadaan orang Bugis di Batavia, penelitian ini menunjukkan bahwa Batavia pada abad ke-17 hingga abad ke-19 merupakan pusat perdagangan dan administrasi kolonial yang menarik berbagai kelompok etnis untuk bermigrasi dan menetap di wilayah tersebut. Salah satu komunitas yang signifikan dalam dinamika sosial ekonomi Batavia adalah orang Bugis, yang datang sebagai bagian dari gelombang besar migrasi maritim Nusantara. Orang Bugis di Batavia membentuk suatu perkampungan sebagaimana yang ditemukan pada arsip Universitas Leiden berupa peta dengan judul "*Plattegrond der stad Batavia*" yang menggambarkan terkait kawasan Batavia tahun 1628. Ini membuktikan bahwasanya adanya pengakuan orang Bugis secara administratif dalam wilayah Ommelanden oleh pemerintah Belanda. Hal ini tentu saja menunjukkan juga bahwa adanya peran etnis dalam transformasi sosial kota kolonial tersebut. Selain itu, adanya penemuan arsip Batavia dengan judul "*Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809*" pada Arsip Nasional RI menunjukkan adanya interaksi yang berkelanjutan pemerintah di Makassar dengan pimpinan Gubernur Jenderal di Batavia menjadi catatan administrasi yang penting dalam melihat relasi hubungan pemerintah kolonial dan etnis atau masyarakat lokal. Sebagaimana kedatangan orang Bugis ke Batavia tentu melalui tahap negosiasi dan administrasi yang panjang serta didorong oleh beberapa faktor utama, seperti tekanan politik di tanah asal, peluang ekonomi yang tersedia di pusat perdagangan kolonial, dan tradisi maritim yang telah mengakar dalam budaya Bugis.

Kedua, terkait pentingnya melihat peran orang Bugis dalam perkembangan sosial-ekonomi di Batavia menunjukkan bahwa orang Bugis tidak hanya

hadir sebagai pedagang atau pelaut biasa, tetapi sebagai agen aktif dalam transformasi sosial-ekonomi Batavia. Mereka membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Batavia dengan berbagai pelabuhan di Nusantara, menciptakan sistem ekonomi alternatif yang berdampingan dengan struktur kolonial, dan berkontribusi dalam pembentukan karakter kosmopolitan Batavia sebagai kota pelabuhan. Adanya sistem ekonomi bagi hasil yang dikenal dengan istilah *Te'seng* merupakan bukti kemajuan pengetahuan orang Bugis diranah ekonomi. Hal ini merupakan *local wisdom* yang perlu dilestarikan dan dijaga. Sehingga mereka mampu menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam menavigasi sistem ekonomi, seperti perubahan regulasi perdagangan, sistem perpajakan, dan kebijakan imigrasi. Strategi yang ditempuh meliputi diversifikasi usaha dari perdagangan maritim tradisional ke sektor komoditas rempah, properti dan jasa perkotaan, serta membangun hubungan patron-klien dengan elit kolonial setempat. Dengan menganut filosofi “dimana kapal berlabuh/terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan”, maka mata pencaharian berbau maritim seperti perdagangan dan penyediaan transportasi laut menjadi *value* yang penting bagi orang Bugis. Sebagaimana bukti adanya kapal pinisi dan *sandeq* yang merupakan desain asli perahu dari Sulawesi memungkinkan orang Bugis melakukan aktivitas pelayaran di Nusantara.

Ketiga, dalam hal sosial-keagamaan orang Bugis di Batavia, ditemukan bahwa adanya intregasi yang terjadi antara elemen kepercayaan lokal dan prinsip-prinsip Islam yang masih dianut dan berkembang di lingkungan etnis orang Bugis. Sebagaimana orang Bugis yang dikenal sebagai penganut Islam di Sulawesi Selatan, adanya proses transmisi pengetahuan Islam yang terjadi melalui praktek keagamaan mereka di Batavia. Apalagi dengan adanya sosok Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai ulama Sulawesi menjadikan ajaran-ajaran Islam dan tarekat pasti disalurkan di wilayah yang beliau singgahi termasuk Batavia. Walaupun secara literatur belum spesifik ditemukan terkait aktivitas keagamaannya, namun alam lingkungan urban yang multietnis ini, identitas Bugis mengalami proses negosiasi dan rekonstruksi yang dinamis. Mereka berhasil mempertahankan elemen-elemen kultural inti seperti sistem nilai *siri'*

na pacce', tradisi pelayaran/*sompe'*, dan struktur sosial hierarkis, sambil mengadopsi praktik-praktik lokal Betawi dan elemen-elemen budaya Tionghoa dan Arab. Proses ini tentu saja menghasilkan identitas Bugis yang unik dan berkelanjutan.

Selain itu, jaringan sosial-keagamaan yang berhasil mereka bangun menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mempertahankan identitas budaya dengan adanya komunitas Ke-Bugis di Jakarta yang berfungsi sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan dan migrasi yang menghubungkan Sulawesi, Jawa, dan wilayah Melayu lainnya. Mereka memelihara koneksi reguler dengan kampung halaman melalui sistem remitansi, pertukaran informasi bisnis, dan sirkulasi ulama serta pedagang. Jaringan ini memfasilitasi tidak hanya arus barang dan modal, tetapi juga ide, teknologi, dan praktik keagamaan serta budaya.

Setelah melalui proses penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti merefleksikan bahwa keberadaan orang Bugis di Batavia tahun 1799-1837 jauh lebih signifikan daripada yang selama ini dipahami dalam historiografi konvensional. Keterbatasan beberapa kajian sebelumnya lebih disebabkan oleh bias sumber dan perspektif penelitian yang cenderung Eropa-sentris, bukan karena minimnya peran historis mereka. Pentingnya pendekatan historiografi yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aktor-aktor utama dalam catatan kolonial, tetapi juga komunitas-komunitas kecil yang bisa saja berperan vital, namun seringkali terpinggirkan dalam narasi sejarah mainstream. Dengan mengangkat tema ini, penulis berharap adanya kesinambungan terkait rekonstruksi sejarah lokal di Nusantara khususnya orang Bugis di Batavia. Sehingga hal ini bisa memberikan pandangan-pandangan baru terkait sejarah Indonesia serta sebagai bentuk kontribusi penting dalam memahami sejarah khususnya dinamika sosial-ekonomi dan kebudayaan Batavia (Jakarta) pada masa formatifnya, sekaligus menunjukkan kompleksitas identitas urban dalam konteks kolonial.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa orang Bugis di Batavia memiliki peran penting sebagai bagian dari perkembangan

masyarakat urban di Batavia (Jakarta), maka peneliti mengajak untuk menggiatkan historiografi sejarah dengan beberapa saran sebagai berikut:

1. Riset Lanjutan

Peneliti merekomendasikan untuk terlibat dalam proyek penelitian berkelanjutan ini. Sejarah Indonesia masih menyimpan banyak cerita yang belum terungkap, dan komunitas Bugis di Batavia hanyalah salah satu contoh dari kekayaan yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Melalui penelitian yang berkelanjutan, kolaboratif, dan metodologis yang ketat, kita dapat merekonstruksi narasi sejarah Indonesia yang lebih inklusif, komprehensif, dan relevan untuk generasi mendatang. Penelitian selanjutnya perlu memperpanjang periodisasi hingga akhir abad ke-19 untuk memahami dampak Politik Etis dan intensifikasi kolonialisme terhadap komunitas Bugis. Selain itu, studi komparatif dengan komunitas Bugis di kota-kota kolonial lain seperti Surabaya, Semarang, dan Palembang akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang pola adaptasi dan integrasi mereka

2. Perkaya sumber

Eksplorasi arsip-arsip lokal, manuskrip keluarga, dan tradisi oral komunitas Bugis perlu diintensifkan. Sumber-sumber ini dapat memberikan perspektif "dari bawah" yang selama ini kurang terwakili dalam dokumentasi kolonial. Kolaborasi dengan lembaga kearsipan yang ada di berbagai wilayah seperti Sulawesi, ANRI dan Arsip Belanda juga dapat membuka akses terhadap dokumen-dokumen yang belum dimanfaatkan.

3. Pengembangan Database Digital Terintegrasi

Salah satu tantangan terbesar dalam penelitian ini adalah fragmentasi dan dispersi sumber-sumber historis. Saya merekomendasikan pengembangan database digital terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai arsip yang tersebar di berbagai institusi. Database ini sebaiknya mencakup tidak hanya dokumen tekstual, tetapi juga peta historis, foto-foto lama, dan artefak material. Kerjasama antara Arsip Nasional RI, Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, dan

berbagai institusi pendidikan tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan proyek ambisius ini. Pengalaman saya dalam mengakses arsip di berbagai lokasi menunjukkan betapa tidak efisiennya sistem penelitian yang ada saat ini.

Rekomendasi penguatan infrastruktur penelitian sejarah khususnya digitalisasi koleksi arsip, peningkatan sistem katalogisasi, dan pengembangan fasilitas penelitian yang lebih memadai. Arsip Nasional RI perlu mempercepat program digitalisasi dan mengembangkan sistem pencarian yang lebih user-friendly. Selain itu, museum yang memiliki koleksi relevan dengan sejarah Indonesia perlu mengembangkan program penelitian kolaboratif dengan akademisi dan mahasiswa.

4. Revitalisasi Pengajaran Sejarah Lokal

Temuan penelitian ini menunjukkan betapa kayanya sejarah Jakarta yang belum terekspos dalam kurikulum pendidikan formal. Saya merekomendasikan agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengintegrasikan sejarah komunitas-komunitas diaspora, termasuk orang Bugis, dalam kurikulum sejarah lokal. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman siswa tentang keragaman budaya Jakarta, tetapi juga membangun apresiasi terhadap kontribusi berbagai kelompok etnis dalam pembentukan identitas kota.

Pengalaman saya dalam berinteraksi dengan siswa dan mahasiswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap cerita-cerita sejarah yang dekat dengan kehidupan mereka tetapi selama ini tidak pernah mereka dengar. Sejarah orang Bugis di Batavia memiliki potensi besar sebagai materi pembelajaran yang menarik dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroni, M. (2019). PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI ISLAM. *Jurnal Madaniyah*, 9.
- Amanna Gappa. (1700). [Naskah Kuno]. Perpustakaan Nasional RI.
- Amin, K. F. (2017). *Para Tawanan Perang: Kisah Syekh Yusuf Al-Makasari dan Arung Palakka*. Celebes Media Perkasa.
- Andaya, L. Y. (1975). *The kingdom of Johor 1641—1728*. Oxford Univ. Press.
- Andaya, L. Y. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. University of Hawaii Press.
<https://doi.org/10.1515/9780824890599>
- Andaya, L. Y. (1995). THE BUGIS-MAKASSAR DIASPORAS. *Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*.
- Andaya, L. Y. (2013). *Warisan Arung Palakka*. Innawa.
- Andaya, L. Y. (2015). *The heritage of Arung Palakka: A history of South Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century*. Brill.
<https://doi.org/10.1163/9789004287228>
- Ashmore, R. D., Jussim, L. J., & Wilder, D. (Eds.). (2023). *Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction*. Oxford University Press.
- Azra, A. (1999). *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah wacana & kekuasaan* (Cet. 1). Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII* (Ed. rev). Kencana.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI VI Daring*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diaspora>
- Bakti, A. F. (Ed.). (2010). *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Innawa.
- Bandung, A. B. T. (2020). BUDAYA BUGIS DAN PERSEBARANNYA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI BUDAYA. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15, 27–36.
- Barth, F., & Soesilo, N. I. (1988). *Kelompok Etnik Dan Batasannya: Tatanan Sosial Dari Perbedaan Kebudayaan*. Penerbit Universitas Indonesia.

- Basri, J., Basri, S. A. N., & Indriyani, I. (2022). Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1027. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.991>
- Bellwood, P. (2007). *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago: Revised Edition*. ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459472
- Bennison, A. K. (2009). *The great caliphs: The golden age of the 'Abbasid Empire*. Yale University Press.
- Blussé, L. (Ed.). (2010). *Visible cities: Canton, Nagasaki, and Batavia and the coming of the Americans*. Harvard University Press.
- Boardman, J. (2000). *The Greeks overseas: Their early colonies and trade* (4. ed., reprinted). Thames and Hudson.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Mizan.
- Burt, R. S. (Ed.). (2010). *Structural holes: The social structure of competition*. Harvard University Press.
- Butler, K. D. (2001). Defining Diaspora, Refining a Discourse. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 10(2), 189–219. <https://doi.org/10.1353/dsp.2011.0014>
- Castells, M., & Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed., with a new pref). Wiley-Blackwell.
- Cohen, R. (2023). *Global diasporas: An introduction* (25th anniversary edition, third edition). Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003256526>
- Damanuri, A. (2012). MUSLIM DIASPORA DALAM ISU IDENTITAS, GENDER, DAN TERORISME. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Duncker, A. (1853). *Kaart van Batavia en Omstreken* [Map]. Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/688/fi1e/NL-HaNA_4.MIKO_688

- Farish A. Noor, Sikand, Y., & Bruinessen, M. van (Eds.). (2008). *The madrasa in Asia: Political activism and transnational linkages*. Amsterdam University Press.
- Fathurroja, A., Mumtazah, H., Rosiana, R., Pudoli, S. B. M., & Fridayanti, F. (2018). Gambaran Identitas Etnis Remaja Suku Jawa dan Sunda. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 1(2), 107–112. <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i2.3412>
- Femas, A. (2024). Ciri Khas Bugis dan Segala Keunikannya. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Finley, M. I. (1999). *The ancient economy* (Updated ed). University of California Press.
- Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
- Haif, A. (2016). HADIS SEBAGAI SUMBER SEJARAH. *RIHLAH: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 4.
- Hamdani, Masudi, I., & Muhtarom, A. (2023). Islam Maritim dan Kultur Penjelajah Laut Masyarakat Nusantara. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*.
- Hamid, A. (1985). *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Inti Idayu Press.
- Hamid, A. (1994). *Syekh Yusuf Makassar, seorang ulama, sufi, dan pejuang* (Ed. 1). Yayasan Obor Indonesia.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Pustaka Ilmu Group.
- Haris, T. (2007). *Kota dan masyarakat Jakarta: Dari kota tradisional ke kota kolonial (abad XVI-XVIII)*. Wedatama Widya Sastra.
- Haryanto, S. (2017). PENDEKATAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM. *Manarul Qur'an: Jurnal Iliah Studi Islam*.
- Hendraswati, Dalle, J., & Jamalie, Z. (2017). *Diaspora dan Ketahanan Budaya Orang Bugis Di Pagatan Tanah Bumbu*. Penerbit Kepel Press.

- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Heuken, A. (2016). *Tempat-Tempat Bersejarah Di Jakarta* (8th ed.). Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, M., Agusrianto, E., & Handayani, E. (2020). *Teori Sosial Empirik*. Edulitera.
- Hooijer, G. B., & Havenga, W. J. (1878). *Etappe-kaart van Java en Madoera* [Map]. Topographische Dienst; Leiden University Libraries. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:91535>
- Houben, V. J. H., & Lindblad, J. T. (Eds.). (2002). *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. BRILL.
- Hourani, A. (2002). *A history of the Arab peoples*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Huda, M. D. (2016). PENDEKATAN ANTROPOLOGIS DALAM STUDI ISLAM. *Didaktika Religia: Journal Of Islamic Education*, 4(2).
- Husna, M. (2019). HALAL BIHALAL DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN SYARIAT. *PERADA*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.29>
- Iqbal, M. (2022). *BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK TELLU CAPPa DIKALANGAN POLITISI BUGIS BONE PADA ERA KONTEMPORER*. Universitas Hasanuddin.
- Kaart van de residentie Batavia en de afdeeling Buitenzorg*. (1837). [Map]. Statistiek Bureau der Algemene Secretarie; Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/512/file/NL-HaNA_4.MIKO_512
- Kanumoyoso, B. (2023). *OMMELANDEN: Perkembangan Masyarakat dan Ekonomi di Luar Tembok Kota Batavia 1684-1740* (1st ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (S. Pusposaputro, Ed.; Cet. 2). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Karwur, G. M. F. (2015). ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL. *Lex et Societatis*.
- Kathirithamby-Wells, J. (1993). Hulu-hilir unity and conflict: Malay statecraft in east Sumatra before the mid-nineteenth century. *Archipel-Etudes Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*.
- Kennedy, H., & Barbir, K. (2003). *The Prophet and the age of the Caliphates the Islamic Near East from the 6th to the 11th century* (2nd ed). Longman.
- Kesuma, I. (2004). *Migrasi dan orang Bugis: Penelusuran kehadiran Opu Daeng Rilakka pada abad XVIII di Johor*. Ombak.
- Khusyairi, J. A., Latif, A., & Samidi. (2016). "BERLAYAR MENUJU PULAU DEWATA" MIGRASI ORANG-ORANG BUGIS-MAKASSAR KE BALI UTARA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*.
- Khusyairi, J. A. (with Penerbit Ombak & Universitas Airlangga). (2017). *Berlayar ke Pulau Dewata: Diaspora orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar di Pulau Bali*. Penerbit Ombak ; Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.
- Kila, S. (2016). SYEKH YUSUF TUANTA SALAMAKA: Pemujaannya di Tanah Makassar. *Al-Qalam*, 19(2), 177. <https://doi.org/10.31969/alq.v19i2.166>
- Knaap, G. J. (with Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands)). (1996). *Shallow waters, rising tide: Shipping and trade in Java around 1775*. KITLV Press.
- Knaap, G. J., & Sutherland, H. A. (Eds.). (2004). *Monsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth-Century Makassar*. BRILL.
- koentjaraningrat. (2007). *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu Antropologi* (Cet. 9, ed. rev). Rineka Cipta.
- Kolff, G. J. C. (1628). *Plattegrond der stad Batavia* [Map]. G.Kolff en Co.; Leiden University Libraries. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2011504>

- Krisnadi, A. R. (2018). GASTRONOMI MAKANAN BETAWI SEBAGAI SALAH SATU IDENTITAS BUDAYA DAERAH. *National Conference of Creative Industry*. <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1221>
- Kurniawan, R., Tarisa, H., & Suhendro Lukitoyo, P. (2023). Syekh Yusuf Al-Makassari: Berawal dari Pengasingan Hingga Menjadi Tokoh Penyebar Agama Islam di Afrika Selatan. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(1), 133. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v13i1.404>
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies* (Third edition). Cambridge University Press.
- Lee, E. S. (1976). *Suatu Teori Migrasi*. Lembaga Kependudukan UGM.
- Leur, J. C. V. (2015). *Perdagangan & Masyarakat Indonesia: Esai-esai tentang sejarah sosial dan ekonomi Asia*. Ombak.
- Lineton, J. A. (1947). AN INDONESIAN SOCIETY AND ITS UNIVERSE: A SruDY OF THE BUGIS OF SOUTH SULAWESI (CELEBES) AND THEIR ROLE WITHIN A WIDER SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM. *School of Oriental and African Studies: University of London*, 17(2), 137–137. <https://doi.org/10.1017/S0001972000021033>
- Locher-Scholten, E., & Rietbergen, P. J. A. N. (2004). *Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720 opgedragen aan Jurrien van Goor*. KITLV uitg.
- Luthfi, A. N., Tohari, A., & Nughroho, T. (2010). *Pemikiran Agraria Bulaksumur*. STPN Press.
- Mahyudi, D. (2023). PENDEKATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*.
- Makasser Geheime Brieven Naar Batavia 1785-1809*. (1801). [Arsip Kolonial]. Arsip Nasional Indonesia.
- Mudiarta, K. G. (2009). JARINGAN SOSIAL (NETWORKS) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1).

- Mufida, K. (2024). Halal bi Halal Sebagai Momentum Rekonsiliasi dan Penguatan Silaturahmi. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Naping, H. (2017). *Laut, Manusia, dan Kebudayaan*. Kaukaba Dirgantara.
- Naufanita, H., Yudono, R. M., & Soetjipto, A. (2018). ANALISIS WACANA DIASPORA INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Kajian Wilayah*.
- Niemeijer, H. E. (2012). *Batavia: Masyarakat kolonial abad XVII* (T. Mualim, Trans.; Cetakan pertama). Masup Jakarta.
- Osborne, R. (2009). *Greece in the making: 1200 - 479 BC* (2. ed). Routledge.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktek*. Penerbit JSI Press.
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Blackwell Publishers.
- Plan van Batavia en omstreek*. (1850). [Map]. Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/644/file/NL-HaNA_4.MIKO_644
- Plan VI. Schets van Batavia en Omstreken*. (1859). [Map]. Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/5053.8/file/NL-HaNA_4.MIKO_5053.8
- Prabowo, M. A., & Kalsum, U. (2021). TE'SENG ACCOUNTING AS AN ALTERNATIVE IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32>
- Prabowo, M. A., Meutia, M., Mulyasari, W., & Yulianto, A. S. (2025). Business ethics of te'seng in the agricultural sector in Indonesia. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, 4, 1429. <https://doi.org/10.56294/sctconf20251429>
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Putri, A. A., & Nurjihan, F. (2024). PENGEMBANGAN TEKS LAPORAN PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN HISTORIOGRAFI SEJARAH. 5(1).
- Rahmatiah, S. (2019). *GERAKAN DAKWAH SYEKH YUSUF AL-MAKASSARI*. 13.

- Rahmatullah, M. A. (2021). *HIDUP DAN PERJUANGAN SYEKH YUSUF*. 15(2).
- Ramadani, N. F., Marzaman, A. P., & Hasanuddin, U. (2023). *IMPLEMENTASI HUKUM AMANNA GAPPA TERHADAP KEBIJAKAN MARITIM NASIONAL INDONESIA*. 10(2).
- Rauf, S. H. B. A., Bakar Ah, S. H. A., & Wahab, H. B. (2019). Konsep Jaringan dan Aplikasi Teori Jaringan Sosial ke dalam Jaringan Perkhidmatan Kebajikan Kanak-kanak. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(3).
- Reid, A. (2003). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume One: The Lands below the Winds*. Yale University Press.
<https://doi.org/10.12987/9780300159455>
- Reid, A. (2005). *An Indonesian frontier: Acehnese and other histories of Sumatra*. Singapore university press.
- Reid, A. (2019). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. LP3ES.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Robinson, C. F. (2018). *Islamic civilization in thirty lives: The first 1,000 years* (Compact paperback edition). Thames & Hudson.
- Romdiati, H. (2015). GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89.
<https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>
- Rosyadi, I. (2022). *Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari: Sosok Seorang Ulama, Mursyid Tarekat, Dan Pejuang Nusantara Yang Fenomenal*. 2(JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN).
- Safran, W. (2005). The Jewish Diaspora in a Comparative and Theoretical Perspective. *Israel Studies*, 10(1), 36–60.
<https://doi.org/10.2979/ISR.2005.10.1.36>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Said, I. (2019). HUBUNGAN ETNIS CINA DENGAN PRIBUMI: (Sebuah Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2.

- Salim, S. (2024). Jaringan Teluk Bone: Aktivitas Pelayaran dan Diaspora Bugis abad XVIII—XIX. *JAWI*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.24042/00202372140200>
- Salis Irvan Fuadi & Robingun Suyud El Syam. (2023). Esensi Kesalehan Sosial dalam Tradisi Halalbihalal di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 12–20. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1585>
- Santoso, I. (2014). *Diaspora, globalisasi, keamanan, dan keimigrasian* (Cetakan I). Pustaka Reka Cipta.
- Satryo Pringgo Sejati & Ahmad Burhan Hakim. (2023). Politik Primordial dan Politik Identitas dalam Perkembangan Demokrasi dan Politik Lokal Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 154–163. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.533>
- Schets van Batavia en omstreken*. (1844). [Map]. Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/4013.2/file/NL-HaNA_4.MIKO_4013.2
- Sibarani, B. (2013). BAHASA, ETNISITAS DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK ETNIS. *Academia.edu*.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sjamsuddin, H. (2017). IDENTITAS-IDENTITAS ETNIK DAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *UPI.Edu*.
- Staveren, V. (1849). *Kaart der rivieren, wegen, particuliere landgoederen en van de verdere indeeling der residentie Batavia* [Map]. Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/794/file/NL-HaNA_4.MIKO_794
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Cet. 6). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>

- Susilowati, E. (2017). ETNIS MARITIM DAN PERMASALAHANNYA. *Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*.
- Sutherland, H. (2000). Trepang and wangkang: The China trade of eighteenth-century Makassar c. 1720s-1840s. In R. G. Tol, C. (Kees) Van Dijk, & G. Acciaoli (Eds.), *Authority and Enterprise* (pp. 73–94). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004486409_005
- Sutherland, H. (2001). The Makassar Malays: Adaptation and Identity, c. 1660-1790. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(3), 397–421. <https://doi.org/10.1017/S0022463401000224>
- Sutherland, H. (2011). A Sino-Indonesian Commodity Chain: The Trade in Tortoiseshell in the Late Seventeenth and Eighteenth Centuries. In E. Tagliacozzo & W. Chang (Eds.), *Chinese Circulations* (pp. 172–199). Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822393573-009>
- Tirtosudarmo, R. (2009). Mobility and Human Development in Indonesia. *United Nations Development Programme*.
- Tirtosudarmo, R. (2022). Managing Multicultural Society in Indonesia, with Jakarta as a Show Case National Research and Innovation Agency. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*.
- Topographische kaart der residentie Batavia*. (1869). [Map]. Topografisch Bureau; Nationaal Archief Nederland. https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/1116/file/NL-HaNA_4.MIKO_1116
- Topographische kaart der residentie Batavia*. (1882). [Map]. Topographische Inrichting; Leiden University Libraries. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:91555>
- UN-DESA | Departemen Ekonomi dan Sosial. (n.d.). Retrieved 14 December 2024, from <https://www.un.org/development/desa/dpad/category/un-desa/>
- Utami, S. (2014). BAHASA SEBAGAI MAHA IDENTITAS MANUSIA. *Cemerlang: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Wafa, M. (Ed.). (2023). *Nyame Braya, Nyame Slam (Tradisi Islam Nusantara)*. Buku Republika.

- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.
- Wekke, I. S. (2013). *ISLAM DAN ADAT: TINJAUAN AKULTURASI BUDAYA DAN AGAMA DALAM MASYARAKAT BUGIS*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku.
- Wellman, B. (1997). Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. *Contemporary Studies in Sociology*.
- Wiharyanto, A. K. (2006). *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. USD Press.
- Yuliani. (2020). *Modul Pembelajaran Sejarah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Istilah/Glosarium

<i>Adat Istiadat</i>	: Kebiasaan masyarakat
<i>Ade' Alloping-loping Bicaranna Pabbalue</i>	: Naskah kuno, nama lain Amanna Gappa
<i>Amanna Gappa</i>	: Hukum pelayaran orang Bugis
<i>Anreguru</i>	: Gelar tuan untuk seorang ulama di Bugis
<i>ANRI</i>	: Arsip Nasional Republik Indonesia
<i>Archief Nationaal</i>	: Lembaga arsip nasional suatu negara yang menyimpan dan memelihara arsip penting negara tersebut
<i>Asseajingeng</i>	: Ikatan kekerabatan
<i>Attorioloang</i>	: Kepercayaan masyarakat kuno di Sulawesi Selatan yang berarti “anutan leluhur”
<i>Baju Bodo</i>	: Busana tradisional khas orang Bugis
<i>Balo Renni</i>	: Corak-corak atau pernik-pernik kecil yang bergantung di tembok atau dinding-dinding
<i>Basa to Riolo</i>	: Bahasa lama orang dulu
<i>Batavia</i>	: Nama lama kota Jakarta yang pernah digunakan oleh Belanda sebagai nama kota dan pusat pemerintahan Hindia Belanda
<i>Boegis</i>	: Penamaan orang Bugis dalam peta Belanda
<i>Bongaya</i>	: Nama sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada 18 November 1667 antara Kesultanan Gowa, yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin, dan VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda), yang diwakili oleh Cornelis Speelman
<i>Bosara'</i>	: Wadah makanan tradisional Bugis
<i>Cappa Kawali</i>	: Ujung badik (jaga diri)
<i>Cappa Lase'</i>	: Ujung kemaluan (jaga kemaluan)
<i>Cappa Lilla</i>	: Ujung lidah (jaga bicara)
<i>Cultuur Stelsel</i>	: Sistem Tanam Paksa, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1830

<i>Devide at Impera</i>	: Sebuah strategi politik, militer, dan ekonomi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah-belah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lebih mudah dikuasai
Hibrid	: Campuran, penggabungan, atau hasil persilangan
Historiografi	: Proses penulisan sejarah
Homogen	: Sejenis atau serupa
Kampoeng	: Penamaan kampung dalam peta Belanda
Katalisator	: Seseorang atau sesuatu yg menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.
Kelompok Marginal	: Kelompok masyarakat yang mengalami peminggiran, diskriminasi, atau eksploitasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
Kohesi sosial (social cohesion):	Suatu keadaan di mana anggota masyarakat memiliki rasa kebersamaan, saling percaya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama
Kolonialisme	: Penguasaan dan eksploitasi suatu wilayah atau masyarakat oleh negara lain, seringkali melibatkan dominasi politik, ekonomi, dan budaya
Kooperatif	: Bersifat kerja sama
Lanskap	: Bentang alam yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati melalui indera manusia
<i>Mallakke' dapureng</i>	: Memindahkan dapur
<i>Mappatabe'</i>	: Ritual meminta izin sebelum acara dimulai
Maritim Kontemporer:	Segala hal yang berhubungan dengan laut, samudra, dan sungai, khususnya pada masa kini atau modern
<i>Massalama'</i>	: Doa bersama meminta keselamatan
<i>Massappa Dalle'</i>	: Proses mencari nafkah
<i>Matoa</i>	: Tokoh adat
Multikulturalisme	: Ideologi dan pendekatan yang mengakui serta menghargai

	keberagaman budaya, suku, agama, dan etnis dalam masyarakat
Nusantara	: Sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia
Ommelanden	: Wilayah luar tembok Batavia atau daerah sekitar yang mengelilingi Batavia
<i>Opperpriester</i>	: Bahasa Belanda berarti Pendeta tinggi
Oral History	: Sejarah lisan, suatu metode penelitian sejarah yang mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi atau menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah
<i>Pangaddereng</i>	: Sistem norma sosial atau sistem adat orang Bugis
<i>Pappaseng To Riolo</i>	: Pesan atau nasehat orang dulu
<i>Passompe’/Sompe’</i>	: Tradisi migrasi orang Bugis dengan melakukan perjalanan meninggalkan kampung halamannya yang biasa disebut merantau
PERPUSNAS RI	: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Perspektif	: Cara seseorang melihat, memahami, dan memaknai suatu hal
Pesse	: Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menyalakan semangat api
Post-kolonial	: Teori yang muncul setelah berakhirnya penjajahan kolonial untuk menganalisis dampak kolonialisme terhadap suatu objek tertentu
Privilege	: Hak istimewa atau khusus
<i>Sense of Belonging</i>	: Rasa memiliki atau rasa terikat
<i>Siri’</i>	: Suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota dalam masyarakat. Pandangan hidup ini bertujuan untuk mempertahankan harkat dan martabat pribadi, orang lain, atau kelompok

	terutama negara. Rela berkorban, bekerja keras, dan pantang mundur
<i>Sipakainge'</i>	: Saling mengingatkan
<i>Sipakalebbi</i>	: Saling memuliakan
<i>Sipakatau</i>	: Saling memanusiakan
<i>Songkok Recca</i>	: Penutup kepala tradisional yang terbuat dari serat pelepahdaun lontar
<i>Tellu Cappa'</i>	: Salah satu falsafah hidup orang Bugis yang berarti tiga ujung
Transnasionalisme	: Konsep yang menggambarkan hubungan dan fenomena yang melampaui batas-batas Negara
Urban	: Segala sesuatu yang terkait dengan kota, baik itu wilayah, penduduk, aktivitas, atau budaya
VOC	: Verenigde Oost-Indische Compagnie atau organisasi perdagangan Belanda
<i>Wanua</i>	: Kampung asal

Lampiran 2: Lembar Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS ISLAM NUSANTARA

Alamat Kampus Jl. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
Telp. 021 390 6501 Fax. 021 315 6864
Email info@fin-unusia.ac.id www.fin-unusia.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syakiman Bur
NIM : 21220012
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Islam Nusantara
Judul Skripsi : Jaringan Orang Bugis Di Batavia Tahun 1799-1837
Pembimbing : Alanuari, MA.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Pembimbing	TTD Pembimbing
1	Jum'at, 11 April 2025	Revisian Proposal	Tabel kerangka berpikir diperbaharui	
2	Selasa, 15 April 2025	Revisian Proposal part 2	Ubah judul menyesuaikan sumber	
3	Senin, 28 April 2025	Revisian Proposal part 3	Format penulisan mengacu pada field research	
4	Jum'at, 2 Mei 2025	BAB 4 Pembahasan	Sub BAB cukup tiga pembahasan	
5	Jum'at, 9 Mei 2025	BAB 4 Pembahasan part 2	Sub BAB pertama tentang konteks jaringan orang Bugis Abad 17-19	
6	Jum'at 16 Mei 2025	BAB 4 Pembahasan part 3	Sub BAB Kedua tentang sosial ekonomi orang Bugis Abad 17-19	
7	Selasa, 20 Juni 2025	BAB 4 Pembahasan part 4	Sub BAB ketiga tentang sosial keagamaan orang Bugis abad 17-19	
8	Jum'at 23 Mei 2025	BAB 5 Penutup	Kesimpulan harus menyangkup semua aspek rumusan masalah penelitian	
9	Selasa, 27 Mei 2025	General Review BAB 1-5	Fokus periode dispesifikkan menjadi Tahun 1799-1837 menyesuaikan dengan	

			sumber yang ditemukan	
10	Selasa, 3 Juni 2025	General Review Skripsi	Sumber yang ditemukan diperjelas dan cari sumber sekunder untuk memperkuat dan pembahasan komunitas Bugis lebih ditambahkan	
11				

Catatan Tambahan:

- Format penulisan menyesuaikan library research
- Perbaiki daftar pustaka
- Lampiran dilengkapi

Tanggal Selesai Bimbingan: Selasa, 3 Juni 2025

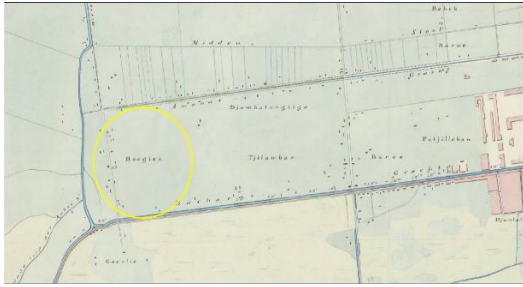
Mengetahui,
Ketua Program Studi


FuadulUmam, M.Hum

Pembimbing


Alanuari, MA.

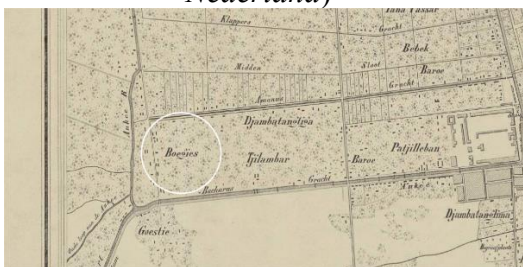
Lampiran 3: Dokumentasi Sumber Data Peta



Boegies, (*Schets van Batavia en omstreken*, 1844)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)



Boegies, (Staveren, 1849)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)



Boegies, (*Plan van Batavia en omstreek*, 1850)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)



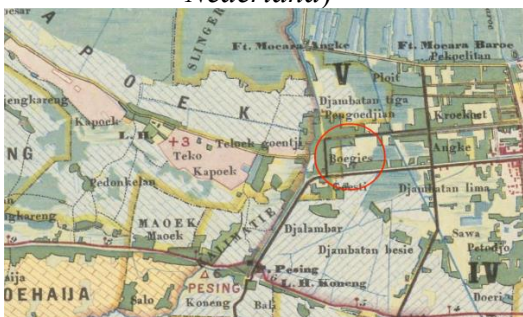
Boegies, (Duncker, 1853)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)



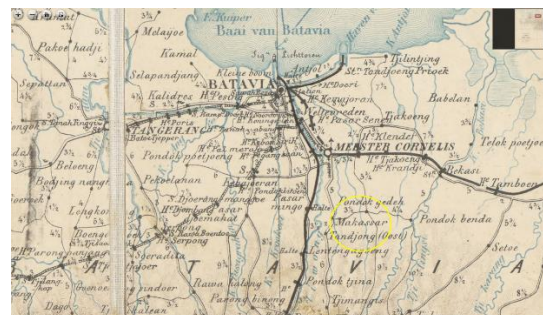
Boegies, (*Plan VI. Schets van Batavia en Omstreken*, 1859)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)



Boegies, (*Topographische kaart der residentie Batavia*, 1869)
(Sumber: *Nationaal Archief Nederland*)

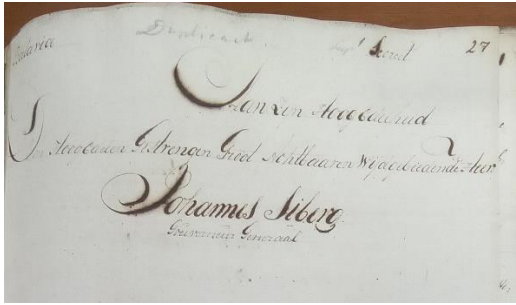


Boegies, (*Topographische kaart der residentie Batavia*, 1882)
(Sumber: *Leiden University Libraries*)



Makasar, (Hooijer & Havenga, 1878)
(Sumber: *Leiden University Libraries*)

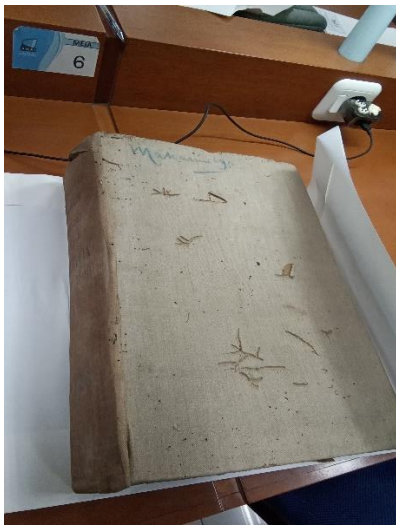
Lampiran 4: Dokumentasi Sumber Data Arsip



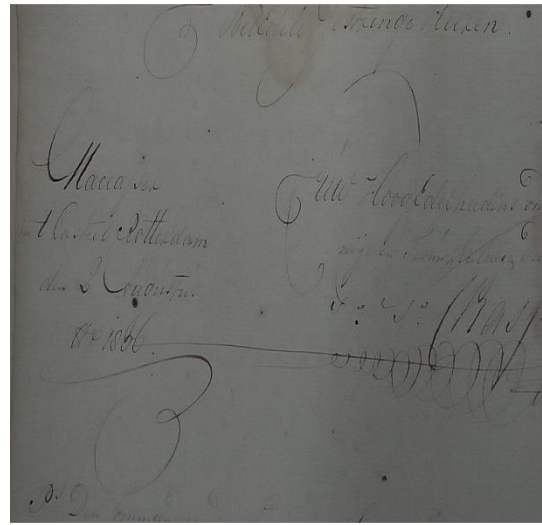
**Surat Untuk Gubernur Jenderal
Johannes Siberg**
(Sumber: ANRI)



**Surat untuk Gubernur Jenderal
Albericus Henricus Wiese**
(Sumber: ANRI)



Tampilan Depan Arsip
(Sumber: ANRI)



**Surat Dibuat di Makassar, Kastel
Rotterdam 2 Agustus 1806**
(Sumber: ANRI)

Lampiran 5: Dokumentasi Observasi



Kunjungan Ke ANRI
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Kunjungan Ke ANRI
(Sumber: Adenkoes)



Kunjungan Ke PERPUSNAS
(Sumber: SyaheerDe)



Kunjungan Ke PERPUSNAS
(Sumber: Adenkoes)



**Menghadiri Acara Halal bi Halal
Ke-Bugis**
(Sumber: Dokumen Pribadi)



**Bersama IKAMI SULSEL Dalam
Acara Halal bi Halal Ke-Bugis**
(Sumber: Daeng Andika)

Lampiran 6: Dokumentasi Diskusi



Diskusi Pendidikan: Kembali Ke Akar Tradisi Bersama Abdi Mahesa (Budayawan Muda SULSEL)
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Bersama Kak Abdi Mahesa (Budayawan Muda Sulsel)
(Sumber: Dokumen Pribadi)



Ngopi Bersama Mahasiswa Perantau Dari Sulawesi di Kopi Pendawa
(Sumber: Daeng Rahmat)

Lampiran 7: Hasil Turnitin

Skripsi Syakiman Bur

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

1%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

3

unusia.ac.id

Internet Source

<1%

4

core.ac.uk

Internet Source

<1%

5

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

6

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1%

7

www.scribd.com

Internet Source

<1%

8

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1%

9

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1%

10

jmb.lipi.go.id

Internet Source

<1%

11

nanopdf.com

Internet Source

<1%

12

docplayer.info

Internet Source

<1%